



# **RANCANGAN AKHIR RENJA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH 2026**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kebutuhan pendanaan yang disusun secara sistematis dan terukur guna mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, untuk itu saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan, Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2025

a.n SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

**TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT**

Pembina Tingkat I

NIP 197301031999031010

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, Desember 2025

a.n SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b

Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

**TEMMY PURBOYONO, ST, SH, MM, MT**

Pembina Tingkat I

NIP. 197301061999031010

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renja yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada RKPD serta berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran pentahapan tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah.

Selain itu, dokumen renja Setda tahun 2026 disusun mempedomani RPJPD Tahun 2025-2045 dan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2026, dan memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Tahun 2025. Selain itu juga untuk mengakomodir visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan periode Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan daerah yang semakin dinamis ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam menopang upaya transformasi agar dapat bekerja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Setda untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen sistem pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku unsur pendukung urusan pemerintahan daerah. Penyusunan Renja Setda Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Setda yaitu “Meningkatkan Kualitas Kebijakan daerah” dengan sasaran yaitu Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil.

Renja Setda dalam pelaksanaan program pembangunan daerah menjadi dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi disertai alokasi pembiayaannya yang tepat dan terarah. Guna menjamin kesesuaian kinerja program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Oleh karena itu, dokumen Renja Setda Tahun 2026 sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), selanjutnya setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD akan dituangkan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2026.

Perumusan rencana program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan berikut indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 mengikuti dinamika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029
25. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 000.7.2.4/0000932 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Daerah, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Setda adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2026 dan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2024

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa selama tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 30 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp594.975.083.000,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
  - 1.2. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
  - 1.3. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
2. Program Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
  - 2.1. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
  - 2.2. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
  - 2.3. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dari 3 kegiatan sebagai berikut:
  - 3.1. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
  - 3.2. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
  - 3.3. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
4. Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:
  - 4.1. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

- 4.2. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
- 4.3. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
- 4.4. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
5. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
  - 5.1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - 5.2. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:
  - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  - 6.2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
  - 6.3. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
7. Program Penataan Organisasi terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
  - 7.1. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
  - 7.2. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
8. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 13 kegiatan sebagai berikut:
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 1.4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
  - 1.5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 1.6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.10. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - 1.11. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  - 1.12. Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
  - 1.13. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d 2025

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan             | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                              | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                              |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                          | (3)                                                                                                                  | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                          |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti | %       | 95                                                                                                 | 100                                                                                                         | 95                                                                            | 100                                           | 105,26                              | 95,00                                                              | 50,00                                                                     | 95,00                                                                 | 100,00                                                |
|     | Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan                      |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ                                  | Dokumen | 60                                                                                                 | 10                                                                                                          | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 26,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan                                                  | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum        |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum                                                         | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah                     |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                     | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                              | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                                                            | %       | 95                                                                                                 | 100                                                                                                         | 95                                                                            | 100                                           | 105,26                              | 95,00                                                              | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 105,26                                                |
|     | Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah                          |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM                                                           | Dokumen | 45                                                                                                 | 3                                                                                                           | 3                                                                             | 3                                             | 100,00                              | 3                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 13,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan        |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM                                                      | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                              | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD                                                                           | %       | 95                                                                                                 | 100                                                                                                         | 95                                                                            | 100                                           | 105,26                              | 95,00                                                              | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 105,26                                                |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  |                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                  | Dokumen | 115                                                                                                | 45                                                                                                          | 45                                                                            | 46                                            | 102,22                              | 45                                                                 | 38                                                                        | 91                                                                    | 79,13                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                       | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                             |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                         | (3)                                                                                           | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                             | Persentase pemenuhan dokumen<br>evaluasi dan Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                  | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Evaluasi dan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan<br>Penyelenggaraan Pemerintahan                             | Laporan | 111                                                                                                | 39                                                                                                          | 37                                                                            | 37                                            | 100,00                              | 37                                                                 | 12                                                                        | 74                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | <b>Tingkat efektivitas kerjasama<br/>daerah</b>                                               | %       | <b>95</b>                                                                                          | <b>100</b>                                                                                                  | <b>95</b>                                                                     | <b>100</b>                                    | <b>105,26</b>                       | <b>95,00</b>                                                       | <b>50,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                         | <b>105,26</b>                                         |
|     | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama<br>Daerah                                     |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Persentase naskah kerjasama antar<br>pemerintah yang ditindaklanjuti                          | %       | 95                                                                                                 | 100                                                                                                         | 95                                                                            | 100                                           | 105,26                              | 95,00                                                              | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 105,26                                                |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Kerjasama antar Pemerintah                       |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah naskah kerjasama antar<br>pemerintah dalam negeri                                      | Dokumen | 30                                                                                                 | 16                                                                                                          | 9                                                                             | 10                                            | 111,11                              | 10                                                                 | 6                                                                         | 22                                                                    | 73,33                                                 |
|     |                                                                             | Jumlah naskah kerjasama antar<br>pemerintah luar negeri                                       | Dokumen | 18                                                                                                 | 1                                                                                                           | 5                                                                             | 5                                             | 100,00                              | 6                                                                  | 2                                                                         | 11                                                                    | 61,11                                                 |
|     |                                                                             | Persentase naskah kerjasama<br>Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta<br>yang ditindaklanjuti        | %       | 95                                                                                                 | 100                                                                                                         | 95                                                                            | 100                                           | 105,26                              | 95,00                                                              | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 105,26                                                |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Kerjasama Badan<br>Usaha /Swasta                 |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah naskah kerjasama Lembaga,<br>Badan Usaha Dan Swasta Dalam<br>Negeri                    | Dokumen | 21                                                                                                 | 6                                                                                                           | 6                                                                             | 6                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 10                                                                    | 47,62                                                 |
|     |                                                                             | Jumlah naskah kerjasama Lembaga,<br>Badan Usaha Dan Swasta Luar<br>Negeri                     | Dokumen | 15                                                                                                 | 16                                                                                                          | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 53,33                                                 |
|     |                                                                             | Persentase rekomendasi atas<br>evaluasi kerjasama daerah                                      | %       | 95                                                                                                 | 100                                                                                                         | 95                                                                            | 100                                           | 105,26                              | 95,00                                                              | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 105,26                                                |
|     | Sub Kegiatan Evaluasi<br>Pelaksanaan Kerja Sama                             |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri<br>yang Dievaluasi                                             | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang<br>Dievaluasi                                              | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | Persentase layanan izin perjalanan<br>ke Luar Negeri                                          | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     |                                                                             |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | <b>Persentase capaian kinerja<br/>program kesejahteraan rakyat<br/>bidang pelayanan dasar</b> | %       | <b>85</b>                                                                                          | <b>95</b>                                                                                                   | <b>81</b>                                                                     | <b>81</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>83,00</b>                                                       | <b>30,00</b>                                                              | <b>83,00</b>                                                          | <b>97,65</b>                                          |
|     | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan<br>Kesejahteraan Rakyat Pelayanan<br>Dasar |                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah rekomendasi pelaksanaan<br>kebijakan bidang Kesehatan                                  | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                           | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                               | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan Fasilitas,<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat Bidang           |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan<br>Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian<br>Kinerja Kebijakan Kesejahteraan<br>Rakyat Bidang Kesehatan              | Dokumen | 24                                                                                                 | 3                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah rekomendasi pelaksanaan<br>kebijakan bidang Pendidikan                                                                                     | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 4                                                                     | 33,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitas,<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat Bidang           |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Fasilitas, Koordinasi,<br>Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian<br>Kinerja Kebijakan Kesejahteraan<br>Rakyat Bidang Pendidikan                | Dokumen | 24                                                                                                 | 3                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah rekomendasi pelaksanaan<br>kebijakan Bidang Sosial                                                                                         | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitas,<br>Koordinasi, Sinkronisasi,<br>Evaluasi, dan Capaian<br>Kinerja Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat Bidang           |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan<br>Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian<br>Kinerja Kebijakan Kesejahteraan<br>Rakyat Bidang Sosial                 | Dokumen | 24                                                                                                 | 3                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                             | <b>Persentase capaian kinerja<br/>program kesejahteraan rakyat<br/>bidang pelayanan non dasar</b>                                                 | %       | <b>85</b>                                                                                          | <b>95</b>                                                                                                   | <b>82</b>                                                                     | <b>82</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>84,00</b>                                                       | <b>40,00</b>                                                              | <b>84,00</b>                                                          | <b>98,82</b>                                          |
|     | Kegiatan Fasilitas Pengembangan<br>Kesejahteraan Rakyat Non<br>Pelayanan Dasar                                                              |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan<br>Kebijakan Bidang Kepemudaan,<br>Olahraga, Kebudayaan dan<br>Perpustakaan                                        | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat Bidang<br>Kepemudaan, Olahraga,<br>Kebudayaan, dan Pariwisata |                                                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                             | Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Kebijakan<br>Kesejahteraan Rakyat Bidang<br>Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan<br>dan Perpustakaan | Dokumen | 24                                                                                                 | 3                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                              | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                     | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dokumen | 24                                                                                                 | 3                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan                                                                                                         | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan                                                                    | Dokumen | 24                                                                                                 | 3                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik                                                                                                                                                                | %       | 63                                                                                                 | 42                                                                                                          | 54                                                                            | 54                                            | 100,00                              | 60,00                                                              | 20,00                                                                     | 60,00                                                                 | 95,24                                                 |
|     | Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku                                                                                                                                             | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                        | Satuan             | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                         |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                     | (3)                                                                                                            | (4)                | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Spiritual           |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah<br>sarana prasarana keagamaan                                              | Unit               | 2400                                                                                               | 3                                                                                                           | 750                                                                           | 2033                                          | 271,07                              | 800                                                                | 460                                                                       | 3634                                                                  | 151,42                                                |
|     |                                                                         | Jumlah Dokumen Laporan<br>Pelaksanaan pelayanan keagamaan                                                      | Dokumen            | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Kelembagaan Bina Spiritual                   |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan<br>Penyelenggaraan Haji                                                          | Kegiatan           | 1                                                                                                  | 1                                                                                                           | 1                                                                             | 1                                             | 100,00                              | 1                                                                  | 1                                                                         | 1                                                                     | 100,00                                                |
|     |                                                                         | Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari<br>Besar Keagamaan                                                          | Kegiatan           | 24                                                                                                 | 10                                                                                                          | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                         |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Persentase bantuan hukum dan<br>sengketa hukum yang tertangani                                                 | %                  | 96                                                                                                 | 100                                                                                                         | 96                                                                            | 100                                           | 104,17                              | 96,00                                                              | 46,30                                                                     | 102,00                                                                | 106,25                                                |
|     | Kegiatan Fasilitasi Bantuan<br>Hukum                                    |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah Dokumen Penyelesaian<br>Penanganan Perkara                                                              | Dokumen            | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Penyelesaian Masalah                         |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah Fasilitasi penanganan<br>Perkara                                                                        | Perkara            | 36                                                                                                 | 14                                                                                                          | 11                                                                            | 17                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 15                                                                        | 39                                                                    | 108,33                                                |
|     |                                                                         | Jumlah pemberian bantuan hukum<br>kepada masyarakat tidak mampu                                                | Perkara            | 600                                                                                                | 200                                                                                                         | 200                                                                           | 200                                           | 154,55                              | 200                                                                | 148                                                                       | 540                                                                   | 90,00                                                 |
|     |                                                                         | Persentase kabupaten/kota peduli<br>HAM                                                                        | %                  | 96                                                                                                 | 100                                                                                                         | 96                                                                            | 100                                           | 104,17                              | 96,00                                                              | 51,42                                                                     | 100,00                                                                | 104,17                                                |
|     | Kegiatan Fasilitasi Bantuan<br>Hukum                                    |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah Dokumen Penyelesaian<br>Sengketa Hukum Pemerintah<br>Provinsi Jawa Tengah                               | Dokumen            | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Penyelesaian Masalah Non<br>Litigasi dan HAM |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah dokumen kebijakan yang<br>telah diharmonisasi berdasarkan<br>perspektif HAM                             | Dokumen            | -                                                                                                  | -                                                                                                           | -                                                                             | 0                                             | -                                   | 0                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                     |                                                       |
|     |                                                                         | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM<br>Kabupaten/kota                                                           | Kabupaten<br>/Kota | 105                                                                                                | 35                                                                                                          | 35                                                                            | 35                                            | 100,00                              | 35                                                                 | 18                                                                        | 70                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                         | Jumlah Fasilitasi Penanganan<br>sengketa hukum Pemerintah Provinsi<br>Jawa Tengah                              | Sengketa           | 21                                                                                                 | 8                                                                                                           | 12                                                                            | 18                                            | 150,00                              | 12                                                                 | 19                                                                        | 78                                                                    | 371,43                                                |
|     |                                                                         | Persentase rancangan produk<br>hukum daerah yang dihasilkan<br>sesuai kaidah pembentukan<br>perundang-undangan | %                  | 97                                                                                                 | 100                                                                                                         | 96                                                                            | 100                                           | 104,17                              | 97,00                                                              | 84,00                                                                     | 100,00                                                                | 103,09                                                |
|     | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan<br>Perundang-Undangan                    |                                                                                                                |                    |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                             | Satuan   | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                              |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                          | (3)                                                                                                                                 | (4)      | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                              | Jumlah dokumen kajian produk hukum                                                                                                  | Dokumen  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan<br>Pendokumentasian Produk<br>Hukum dan Naskah Hukum<br>Lainnya |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah dokumentasi dan Informasi<br>Produk Hukum dan Naskah Hukum<br>Lainnya                                                        | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 8                                                                         | 28                                                                    | 77,78                                                 |
|     |                                                                              | Jumlah Pengkajian Produk Hukum<br>dan Naskah Hukum Lainnya                                                                          | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 8                                                                         | 30                                                                    | 83,33                                                 |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Penyusunan dan<br>Harmonisasi Rancangan Keputusan<br>Gubernur                                                        | Dokumen  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Penyusunan Produk Hukum<br>Penetapan              |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Harmonisasi dan<br>Sinkronisasi Rancangan Keputusan<br>Gubernur Jawa Tengah                                                  | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 8                                                                         | 26                                                                    | 72,22                                                 |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Penyusunan dan<br>Harmonisasi Rancangan Peraturan<br>Daerah dan Peraturan Gubernur                                   | Dokumen  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Penyusunan Produk Hukum<br>Pengaturan             |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Harmonisasi dan<br>Sinkronisasi Rancangan<br>Peraturan Gubernur Jawa Tengah                                                  | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 7                                                                         | 25                                                                    | 69,44                                                 |
|     |                                                                              | Jumlah Penyusunan Raperda<br>Provinsi Jawa Tengah                                                                                   | Laporan  | 36                                                                                                 | 15                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 8                                                                         | 26                                                                    | 72,22                                                 |
|     |                                                                              | <b>Persentase rancangan produk<br/>hukum kabupaten/kota yang<br/>dikaji</b>                                                         | <b>%</b> | <b>96</b>                                                                                          | <b>100</b>                                                                                                  | <b>96</b>                                                                     | <b>100</b>                                    | <b>104,17</b>                       | <b>97,00</b>                                                       | <b>60,00</b>                                                              | <b>103,00</b>                                                         | <b>107,29</b>                                         |
|     | Kegiatan Fasilitasi Penyusunan<br>Perundang-Undangan                         |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan<br>Evaluasi Rancangan Produk Hukum<br>serta dokumen klarifikasi produk<br>hukum Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen  | 42                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 57,14                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi dan<br>Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi<br>Rancangan Produk Hukum Daerah<br>Kabupaten/Kota Wilayah I                                         | Dokumen  | 345                                                                                                | 120                                                                                                         | 120                                                                           | 210                                           | 175,00                              | 115                                                                | 59                                                                        | 376                                                                   | 108,99                                                |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                        | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                                |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                                                                                            | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                                | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II                         | Dokumen | 360                                                                                                | 116                                                                                                         | 127                                                                           | 243                                           | 191,34                              | 120                                                                | 74                                                                        | 448                                                                   | 124,44                                                |
|     |                                                                                                | Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III                        | Dokumen | 360                                                                                                | 117                                                                                                         | 120                                                                           | 200                                           | 166,67                              | 120                                                                | 76                                                                        | 372                                                                   | 103,33                                                |
| 4   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                           |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur                                                        | %       | 85                                                                                                 | 96                                                                                                          | 85                                                                            | 97,33                                         | 114,51                              | 85,00                                                              | 48,00                                                                     | 96,00                                                                 | 112,94                                                |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                 |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang               | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                    |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman          | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                    |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan                                    | %       | 85                                                                                                 | 95                                                                                                          | 85                                                                            | 99,3                                          | 116,82                              | 85,00                                                              | 53,39                                                                     | 88,14                                                                 | 103,69                                                |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                 |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM                                                           | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup |                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM                                                    | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                               | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                                            |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                   | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                                            | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan        | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                            | <b>Persentase capaian kinerja program bidang pertanian</b>                            | %       | <b>87</b>                                                                                          | <b>90</b>                                                                                                   | <b>87</b>                                                                     | <b>89,01</b>                                  | <b>102,31</b>                       | <b>87,00</b>                                                       | <b>28,26</b>                                                              | <b>90,22</b>                                                          | <b>103,70</b>                                         |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                             |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                            | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan                | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan         | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                            | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan                      | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan               | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                            | Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian                             | Dokumen | 6                                                                                                  | 3                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                            | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT                                             | Laporan | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian                      | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                            | <b>Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha</b>                                  | %       | <b>83</b>                                                                                          | <b>83,33</b>                                                                                                | <b>81</b>                                                                     | <b>81</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>82,00</b>                                                       | <b>35,00</b>                                                              | <b>82,00</b>                                                          | <b>98,80</b>                                          |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                |                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                          | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                              | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha                                     | Dokumen | 6                                                                                                  | 5                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha | Laporan | 12                                                                                                 | 6                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                               | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan                                                                                  | %       | 87                                                                                                 | 85                                                                                                          | 85                                                                            | 85                                            | 100,00                              | 86,00                                                              | 35,00                                                                     | 86,00                                                                 | 98,85                                                 |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                                   |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan                                                           | Dokumen | 6                                                                                                  | 4                                                                                                           | 85                                                                            | 85                                            | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan                        | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan                                                                | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan                                                                   |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan                                   | Laporan | 12                                                                                                 | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 1                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                                                               | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                                                | %       | 57                                                                                                 | 55                                                                                                          | 55                                                                            | 55                                            | 100,00                              | 56,00                                                              | 47,00                                                                     | 56,00                                                                 | 98,25                                                 |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                                   |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD                                                                         | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               |                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                           | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                             |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                         | (3)                                                                                                               | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah  | Laporan | 6                                                                                                  | 4                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD                                                            | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUD dan Evaluasi Kebijakan |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah | Laporan | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | <b>Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan</b>                       | %       | <b>85</b>                                                                                          | <b>86</b>                                                                                                   | <b>83</b>                                                                     | <b>83</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>84,00</b>                                                       | <b>55,00</b>                                                              | <b>84,00</b>                                                          | <b>98,82</b>                                          |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                  |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan                                                           | Dokumen | 12                                                                                                 | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                 |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan                                 | Laporan | 24                                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro                                                                | Dokumen | 15                                                                                                 | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 53,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                 |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro                               | Laporan | 24                                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | <b>Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan</b>                       | %       | <b>80</b>                                                                                          | <b>77</b>                                                                                                   | <b>78</b>                                                                     | <b>78</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>79,00</b>                                                       | <b>35,00</b>                                                              | <b>79,00</b>                                                          | <b>98,75</b>                                          |
|     | Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                  |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro                                                                | Dokumen | 14                                                                                                 | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 57,14                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                 |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                             | Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro                               | Laporan | 24                                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 2                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                             | Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan                             | Dokumen | 12                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                 |                                                                                                                   |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                     | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                       | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                  | (3)                                                                                                                                                           | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                      | Jumlah Fasilitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan                                                            | Laporan | 24                                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 2                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
| 5   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA            |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa                                                                                                                   | %       | 92                                                                                                 | 95                                                                                                          | 90                                                                            | 79,07                                         | 87,86                               | 91,00                                                              | 52,74                                                                     | 92,39                                                                 | 100,42                                                |
|     | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                       |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                     | Laporan | 12                                                                                                 | 5                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa          |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa                                                                                                  | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Penyusunan SHB                                                                                                                                 | Laporan | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                   |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)                                          | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal                                                                                                                    | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa       |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                        | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                      | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | %       | 83                                                                                                 | 92                                                                                                          | 81                                                                            | 81,25                                         | 100,31                              | 82,00                                                              | 42,56                                                                     | 83,22                                                                 | 100,27                                                |
|     | Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa            |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa                                                                                          | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                      | Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah                                                                                       | Laporan | 6                                                                                                  | 4                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                                     |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)                                                                                        | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan Pembinaan<br>Kelembagaan Pengadaan<br>Barang dan Jasa                                  |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan<br>Kelembagaan<br>UKPBJ                                     | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pendampingan,<br>Konsultasi, dan/atau<br>Bimbingan Teknis Pengadaan<br>Barang dan Jasa |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan pendampingan dan<br>konsultasi permasalahan pengadaan<br>barang/jasa        | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                                                     | Tingkat efektivitas pengadaan<br>secara elektronik                                         | %       | 85                                                                                                 | 90                                                                                                          | 80                                                                            | 80,33                                         | 100,41                              | 82,00                                                              | 54,92                                                                     | 86,37                                                                 | 101,61                                                |
|     | Kegiatan Pengelolaan Layanan<br>Pengadaan Secara Elektronik                                         |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan Kegiatan<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Pengadaan Barang/Jasa           | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Sistem Pengadaan secara<br>Elektronik                                   |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan<br>layanan pengadaan barang/jasa<br>secara elektronik | Laporan | 12                                                                                                 | 12                                                                                                          | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengembangan<br>Sistem Informasi Pengadaan<br>Barang dan Jasa                          |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengembangan<br>Sistem Informasi Pengadaan Barang<br>dan Jasa               | Laporan | 6                                                                                                  | 12                                                                                                          | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan<br>Informasi Pengadaan Barang<br>dan Jasa                                  |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengelolaan<br>Informasi Pengadaan Barang dan<br>Jasa                       | Laporan | 12                                                                                                 | 12                                                                                                          | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
| 6   | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                                                                         |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Persentase perangkat daerah yang<br>skor kematangan organisasinya<br>dalam kategori tinggi | %       | 74                                                                                                 | 155,37                                                                                                      | 66                                                                            | 66                                            | 100,00                              | 70                                                                 | 35                                                                        | 70                                                                    | 94,59                                                 |
|     | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan<br>dan Analisis Jabatan                                             |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi<br>Penataan Kelembagaan dan Penilaian<br>Kematangan Organisasi  | Dokumen | 3                                                                                                  | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 1                                                                  | 0                                                                         | 5                                                                     | 166,67                                                |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Penataan Kelembagaan<br>Provinsi                                         |                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah Fasilitasi Penataan<br>Kelembagaan Perangkat Daerah                                 | Laporan | 12                                                                                                 | 8                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 3                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 33,33                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                               | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                                                                   | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                   | Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah | Laporan | 6                                                                                                  | -                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 1                                                                  | 0                                                                         | 2                                                                     | 33,33                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya</b>                                         | %       | <b>91,43</b>                                                                                       | <b>80</b>                                                                                                   | <b>85,71</b>                                                                  | <b>85,71</b>                                  | <b>100,00</b>                       | <b>88,57</b>                                                       | <b>42,86</b>                                                              | <b>88,57</b>                                                          | <b>96,87</b>                                          |
|     | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota                    | Dokumen | 6                                                                                                  | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota       |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota                          | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif</b>                     | %       | <b>93,88</b>                                                                                       | <b>87,80</b>                                                                                                | <b>88,1</b>                                                                   | <b>92</b>                                     | <b>104,43</b>                       | <b>90,00</b>                                                       | <b>30,00</b>                                                              | <b>96,00</b>                                                          | <b>102,26</b>                                         |
|     | Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota                           | Dokumen | 3                                                                                                  | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 1                                                                  | 0                                                                         | 5                                                                     | 166,67                                                |
|     | Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan                            |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota                                                     | Laporan | 12                                                                                                 | 8                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 5                                                                     | 41,67                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A</b>          | %       | <b>82</b>                                                                                          | <b>95,92</b>                                                                                                | <b>60</b>                                                                     | <b>61,22</b>                                  | <b>102,03</b>                       | <b>36,59</b>                                                       | <b>18,59</b>                                                              | <b>36,59</b>                                                          | <b>44,62</b>                                          |
|     | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD                                                                      | Dokumen | 6                                                                                                  | 8                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi            |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD                                                                 | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB</b>                                                 | %       | <b>20</b>                                                                                          | <b>94,28</b>                                                                                                | <b>14,29</b>                                                                  | <b>48,57</b>                                  | <b>339,89</b>                       | <b>48,57</b>                                                       | <b>24,28</b>                                                              | <b>48,57</b>                                                          | <b>242,85</b>                                         |
|     | Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                 | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/ d Tahun 2025          |                                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                                                     | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota                                                   | Dokumen | 9                                                                                                  | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 3                                                                  | 1                                                                         | 7                                                                     | 77,78                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi            |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota                                               | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A                                                        | %       | 71,43                                                                                              | 85,37                                                                                                       | 64,28                                                                         | 64,28                                         | 100,00                              | 69,05                                                              | 34,52                                                                     | 95,24                                                                 | 133,33                                                |
|     | Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya                                                      | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas                |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota                                                        | Laporan | 12                                                                                                 | 76                                                                                                          | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan                                     | %       | 94                                                                                                 | 100                                                                                                         | 50                                                                            | 57,7                                          | 115,40                              | 92                                                                 | 46                                                                        | 92                                                                    | 97,87                                                 |
|     | Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan                                            | Dokumen | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                 |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Fasilitas Tatalaksana Pemerintahan                                                               | Laporan | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 12                                                                    | 100,00                                                |
|     |                                                                   | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan                       | %       | 93,86                                                                                              | 100,83                                                                                                      | 88,73                                                                         | 88,73                                         | 100,00                              | 91,01                                                              | 45,5                                                                      | 91,01                                                                 | 96,96                                                 |
|     | Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik                                                                | Dokumen | 12                                                                                                 | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 50,00                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik               |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik                                                           | Laporan | 18                                                                                                 | 2                                                                                                           | 6                                                                             | 6                                             | 100,00                              | 6                                                                  | 3                                                                         | 7                                                                     | 38,89                                                 |
| 7   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Persentase capaian pelaksanaan APBD                                                                     | %       | 98,85                                                                                              | 99,45                                                                                                       | 98,7                                                                          | 99,76                                         | 101,07                              | 98,8                                                               | 40,64                                                                     | 91,68                                                                 | 92,75                                                 |
|     | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD | Dokumen | 15                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 53,33                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                    | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                          | (3)                                                                                                                                        | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan APBD    |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi dan Pengendalian<br>pelaksanaan pembangunan Bidang<br>Ekonomi yang bersumber dari APBD      | Laporan | 36                                                                                                 | 4                                                                                                           | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Percepatan pelaksanaan<br>pembangunan Bidang Pemsosbud<br>yang bersumber dari APBD                         | Dokumen | 15                                                                                                 | 3                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 53,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan APBD    |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi dan Pengendalian<br>pelaksanaan pembangunan Bidang<br>Pemsosbud yang bersumber dari<br>APBD | Laporan | 36                                                                                                 | 4                                                                                                           | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                              | <b>Persentase capaian pelaksanaan<br/>APBN</b>                                                                                             | %       | <b>95,5</b>                                                                                        | <b>99,32</b>                                                                                                | <b>95,5</b>                                                                   | <b>96,58</b>                                  | <b>101,13</b>                       | <b>95,5</b>                                                        | <b>33,17</b>                                                              | <b>95,5</b>                                                           | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah      |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Percepatan pelaksanaan<br>pembangunan yang bersumber dari<br>APBN                                          | Dokumen | 15                                                                                                 | 2                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 53,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan APBN    |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi dan Pengendalian<br>pelaksanaan pembangunan yang<br>bersumber dari APBN                     | Laporan | 24                                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 12                                                                    | 50,00                                                 |
|     |                                                                              | <b>Persentase realisasi bantuan<br/>keuangan</b>                                                                                           | %       | <b>85</b>                                                                                          | <b>96.07</b>                                                                                                | <b>85</b>                                                                     | <b>99,21</b>                                  | <b>116,72</b>                       | <b>85,00</b>                                                       | <b>53,38</b>                                                              | <b>98,15</b>                                                          | <b>115,47</b>                                         |
|     | Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah      |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Percepatan pelaksanaan<br>pembangunan Wil I                                                                | Dokumen | 27                                                                                                 | 8                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 59,26                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Wilayah |                                                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi dan Pengendalian<br>pelaksanaan pembangunan di wil I                                        | Dokumen | 24                                                                                                 | 8                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                  | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                              |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                          | (3)                                                                                                                      | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Percepatan pelaksanaan<br>pembangunan Wil II                                             | Dokumen | 27                                                                                                 | 8                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 59,26                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Wilayah |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi dan Pengendalian<br>pelaksanaan pembangunan di wil II                     | Dokumen | 24                                                                                                 | 8                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Percepatan pelaksanaan<br>pembangunan Wil III                                            | Dokumen | 24                                                                                                 | 8                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengendalian<br>Administrasi Pelaksanaan<br>Pembangunan Wilayah |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Fasilitasi dan Pengendalian<br>pelaksanaan pembangunan di wil III                    | Dokumen | 24                                                                                                 | 8                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 8                                                                  | 4                                                                         | 16                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                              | <b>Persentase pemenuhan data dan<br/>informasi bagi pengendalian dan<br/>analisis pelaksanaan pembangunan<br/>daerah</b> | %       | <b>87</b>                                                                                          | <b>85</b>                                                                                                   | <b>85</b>                                                                     | <b>85</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>86,00</b>                                                       | <b>90,62</b>                                                              | <b>86,00</b>                                                          | <b>98,85</b>                                          |
|     | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah                         |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi<br>Capaian Kinerja Pembangunan<br>Daerah                                                   | Dokumen | 15                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 53,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Analisis<br>Capaian Kinerja<br>Pembangunan Daerah               |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah dokumen Koordinasi,<br>Analisis dan Evaluasi capaian kinerja<br>pembangunan daerah                                | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     |                                                                              | Persentase OPD dan Kab/Kota yang<br>melaksanakan pelaporan<br>pembangunan daerah secara lengkap                          | %       | 93                                                                                                 | 93,23                                                                                                       | 91                                                                            | 93                                            | 102,20                              | 92,00                                                              | 93,29                                                                     | 93,00                                                                 | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Pelaporan<br>Pelaksanaan Pembangunan<br>Daerah                  |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah dokumen Koordinasi dan<br>Fasilitasi pelaporan pembangunan<br>daerah                                              | Dokumen | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 3                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                              | <b>Persentase rekomendasi kebijakan<br/>teknis pembangunan daerah yang<br/>direalisasi</b>                               | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                               | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah                         |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan<br>Teknis Pembangunan Daerah                                                                | Dokumen | 9                                                                                                  | 4                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 0                                                                         | 4                                                                     | 44,44                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Perumusan Kebijakan Teknis<br>Pembangunan Daerah  |                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                              | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                  | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                           | Dokumen | 6                                                                                                  | 4                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 0                                                                         | 4                                                                     | 66,67                                                 |
| 8   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (1)                                           |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                                                    | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                                                | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                  |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah                                                                                                     | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                                                 | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 12                                                                    | 33,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                                                                                        | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                     | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan                                                                                     | Paket   | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 9                                                                     | 75,00                                                 |
|     |                                                                                                     | Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan                                                                               | Paket   | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 4                                                                     | 33,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                               | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>s/d Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                        | (3)                                                                                                                                   | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                            | Jumlah orang yang mengikuti<br>medical check up kepala daerah                                                                         | Orang   | 4                                                                                                  | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 4                                                                         | 4                                                                     | 100,00                                                |
|     |                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Medical Check Up Wakil Kepala<br>Daerah                                                                | Orang   | 4                                                                                                  | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 4                                                                         | 4                                                                     | 100,00                                                |
|     | Kegiatan Fasilitasi<br>Kerumahtanggaan Sekretariat<br>Daerah               |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Persentase layanan fasilitasi<br>kerumahtanggaan sekretariat daerah<br>yang dipenuhi sesuai kebutuhan                                 | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>Kepala Daerah         |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah paket kebutuhan rumah<br>tangga kepala daerah yang<br>disediakan                                                               | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>Wakil Kepala Daerah   |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah paket kebutuhan rumah<br>tangga wakil kepala daerah yang<br>disediakan                                                         | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah    |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah paket kebutuhan rumah<br>tangga sekretariat daerah yang<br>disediakan                                                          | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                            | <b>Persentase tingkat pelayanan<br/>umum, kepegawaian, dan<br/>keuangan perangkat daerah Biro<br/>Administrasi Pembangunan Daerah</b> | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>100,00</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                             |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Persentase layanan administrasi<br>umum perangkat daerah yang sesuai<br>standar layanan Biro Administrasi<br>Pembangunan Daerah       | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan<br>rapat koordinasi dan konsultasi<br>perangkat daerah di Biro<br>Administrasi Pembangunan Daerah      | Laporan | 72                                                                                                 | 12                                                                                                          | 24                                                                            | 24                                            | 100,00                              | 24                                                                 | 12                                                                        | 48                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                      |                                                                                                                                       |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                        | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                                                                            | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                   | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan                              | Laporan | 48                                                                                                 | 12                                                                                                          | 16                                                                            | 16                                            | 100,00                              | 16                                                                 | 8                                                                         | 32                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa</b>       | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>100,00</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa  | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa                | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum</b>                                | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>60,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum                     | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan             |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT                                                    | Orang   | 2700                                                                                               | -                                                                                                           | 1650                                                                          | 1650                                          | 100,00                              | 900                                                                | 900                                                                       | 1750                                                                  | 64,81                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |                                                                                                                                |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum                                   | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                  | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                            |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                        | (3)                                                                                                                                                      | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan<br>rapat koordinasi dan konsultasi<br>perangkat daerah di Biro Hukum                                                      | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                      |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah dokumen penatausahaan<br>arsip dinamis pada perangkat daerah<br>di Biro Hukum                                                                     | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                            | <b>Persentase tingkat pelayanan<br/>umum, kepegawaian, dan<br/>keuangan perangkat daerah Biro<br/>ISDA dan Asisten Ekbang</b>                            | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>100,00</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                      |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Persentase layanan administrasi<br>kepegawaian perangkat daerah yang<br>sesuai dengan standar layanan pada<br>Biro Infrastruktur dan Sumber Daya<br>Alam | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan               |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah orang yang mengikuti<br>sosialisasi peraturan perundang-<br>undangan di Bidang Cukai                                                              | Orang   | 24000                                                                                              | 8000                                                                                                        | 8000                                                                          | 8000                                          | 100,00                              | 8000                                                               | 0                                                                         | 8000                                                                  | 33,33                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                             |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Persentase layanan administrasi<br>umum perangkat daerah yang sesuai<br>standar layanan Biro Infrastruktur<br>dan Sumber Daya Alam dan Asisten<br>Ekbang | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100                                                                | 100,00                                                                    | 100                                                                   | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan<br>rapat koordinasi dan konsultasi<br>perangkat daerah di Asisten Ekonomi<br>dan Pembangunan                              | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan<br>rapat koordinasi dan konsultasi<br>perangkat daerah di Biro<br>Infrastruktur dan SDA                                   | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                      |                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah dokumen penatausahaan<br>arsip dinamis pada perangkat daerah<br>di Asisten Ekonomi dan<br>Pembangunan                                             | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                        | (3)                                                                                                                    | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                            | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA                         | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                            | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat                | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat            | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat           | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat                          | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                            | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi        | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                                                 | Paket   | 0                                                                                                  | 0                                                                                                           | 0                                                                             | 0                                             | 0,00                                | 0                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                     | 0,00                                                  |
|     | Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                            | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                                                       | Dokumen | 12                                                                                                 | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                                        |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                          | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                   |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                                                                                                              | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                   | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                              | Orang   | 105                                                                                                | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 10                                                                 | 2                                                                         | 12                                                                    | 11,43                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi                                       | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi                                                          | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi                                                               | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi                                                                         | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi                                                                              | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                   | <b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan</b>    | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>50,00</b>                                                              | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 50,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                     | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                       | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                         | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                        |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                        |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                    | (3)                                                                                                                             | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                        | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                        | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                        | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                        | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama             | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 3                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                        | <b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian</b>                          | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>100,00</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                        | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian                             | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                        | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian                            | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                        | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian                                           | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                        | <b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol</b>             | %       | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>100,00</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                        | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol                     | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan |                                                                                                                                 |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                             | Satuan   | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                     |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                 | (3)                                                                                                                 | (4)      | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                     | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                                        | Dokumen  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah                   | Dokumen  | 12                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan                                  |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan                                            | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 12                                                                    | 33,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan                                              |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan                                                                       | Dokumen  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                         |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan                                                                 | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                       |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan                                                                     | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan                                                    |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun                                                                 | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 12                                                                    | 33,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan                                  |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara                                                    | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah                                | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                      |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                     | Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan                                                                    | Laporan  | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 2                                                                     | 5,56                                                  |
|     |                                                                                     | <b>Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda</b> | <b>%</b> | <b>100</b>                                                                                         | <b>100</b>                                                                                                  | <b>100</b>                                                                    | <b>100</b>                                    | <b>100,00</b>                       | <b>100,00</b>                                                      | <b>100,00</b>                                                             | <b>100,00</b>                                                         | <b>100,00</b>                                         |
|     | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     |                                                                                                                     |          |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                  | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                      | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                             | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun                                                                                                 | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 12                                                                    | 33,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                        | Bulan   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN                                                                                                       | Dokumen | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah                               | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah                                                                                              | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                            |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah                                                                                                      | Dokumen | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                             | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah                                                                                                   | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                     | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                                    | (3)                                                                                                         | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                        | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah                 | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pelaporan<br>Pengelolaan Retribusi Daerah                                 |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah                                                                 | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                         |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                          | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor                        |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                              | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                                         | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                                          | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                             |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                                 | Paket   | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                              |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                                    | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD             |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                        | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah                             | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah        |                                                                                                             |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                    | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                            | (3)                                                                                                        | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     |                                                                                | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan                        | Paket   | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 6                                                                     | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel                                                   |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                                         | Paket   | 6                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 0                                                                         | 5                                                                     | 83,33                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                                    | Unit    | 150                                                                                                | 50                                                                                                          | 50                                                                            | 50                                            | 100,00                              | 50                                                                 | 25                                                                        | 100                                                                   | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                      |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan                                                              | Unit    | 0                                                                                                  | 0                                                                                                           | 0                                                                             | 0                                             | 0,00                                | 0                                                                  | 0                                                                         | 0                                                                     |                                                       |
|     | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                     | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                           | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum                                    |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                       | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum                                                                       | Laporan | 36                                                                                                 | 12                                                                                                          | 12                                                                            | 12                                            | 100,00                              | 12                                                                 | 6                                                                         | 24                                                                    | 66,67                                                 |
|     |                                                                                | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah                                                           | Laporan | 9                                                                                                  | 3                                                                                                           | 3                                                                             | 3                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 1                                                                         | 4                                                                     | 44,44                                                 |
|     | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                            |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan           | Unit    | 2499                                                                                               | 833                                                                                                         | 833                                                                           | 833                                           | 100,00                              | 833                                                                | 400                                                                       | 2499                                                                  | 100,00                                                |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                                                                                | Satuan | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan/<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
| (1) | (2)                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                    | (4)    | (5)                                                                                                 | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah kendaraan perorangan dinas<br>atau kendaraan dinas jabatan yang<br>dipelihara dan dibayarkan pajaknya                                                           | Unit   | 12                                                                                                  | 4                                                                                                           | 4                                                                             | 4                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 2                                                                         | 8                                                                     | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan       |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah kendaraan dinas operasional<br>atau lapangan yang dipelihara dan<br>dibayarkan pajak dan perizinannya                                                           | Unit   | 546                                                                                                 | 182                                                                                                         | 182                                                                           | 182                                           | 100,00                              | 182                                                                | 90                                                                        | 364                                                                   | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pemeliharaan<br>Mebel                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah mebel yang dipelihara                                                                                                                                           | Unit   | 90                                                                                                  | 30                                                                                                          | 30                                                                            | 30                                            | 100,00                              | 30                                                                 | 10                                                                        | 60                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                       |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah peralatan dan mesin lainnya<br>yang dipelihara                                                                                                                  | Unit   | 900                                                                                                 | 300                                                                                                         | 300                                                                           | 300                                           | 100,00                              | 300                                                                | 150                                                                       | 600                                                                   | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                             |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah gedung kantor dan<br>bangunan lainnya yang<br>dipelihara/direhabilitasi                                                                                         | Unit   | 51                                                                                                  | 17                                                                                                          | 17                                                                            | 17                                            | 100,00                              | 17                                                                 | 7                                                                         | 34                                                                    | 66,67                                                 |
|     | Sub Kegiatan<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Jumlah sarana dan prasarana<br>gedung kantor atau bangunan<br>lainnya yang dipelihara/<br>direhabilitasi                                                               | Unit   | 900                                                                                                 | 300                                                                                                         | 300                                                                           | 300                                           | 100,00                              | 300                                                                | 150                                                                       | 600                                                                   | 66,67                                                 |
|     | Kegiatan Administrasi Keuangan<br>dan Operasional Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                                                                                | Persentase layanan administrasi<br>keuangan dan operasional kepala<br>daerah dan wakil kepala daerah yang<br>dipenuhi sesuai standar pada Bagian<br>Rumah Tangga Setda | %      | 100                                                                                                 | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 100,00                                                                    | 100,00                                                                | 100,00                                                |

| NO  | Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                                 | Satuan  | Target Kinerja<br>Akhir Capaian<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan<br>RPD Tahun<br>2024-2026 | Realisasi Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan/<br>Sub Kegiatan s/d<br>Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan Tahun 2024 |                                               |                                     | Target Program<br>dan Kegiatan<br>(Renja PD periode<br>Tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD s/d Tahun 2025           |                                                                       |                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             | Target Renja PD<br>(periode Tahun<br>2024)                                    | Realisasi Renja<br>PD (periode Tahun<br>2024) | Tingkat Realisasi<br>Tahun 2024 (%) |                                                                    | Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025<br>(Triwulan II) | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD<br>s/d Tahun 2025 | Tingkat Capaian<br>Realisasi Target<br>Renstra PD (%) |
|     |                                                                                          |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                     | (4)     | (5)                                                                                                | (6)                                                                                                         | (7)                                                                           | (8)                                           | (9)                                 | (10)                                                               | (11)                                                                      | (12)                                                                  | (13)                                                  |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                          | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah                     | Orang   | 2                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 2                                                                         | 2                                                                     | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                          | Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah             | Orang   | 2                                                                                                  | 2                                                                                                           | 2                                                                             | 2                                             | 100,00                              | 2                                                                  | 2                                                                         | 2                                                                     | 100,00                                                |
|     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2)                                |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                          | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah                                                | %       | 90                                                                                                 | 100                                                                                                         | 90                                                                            | 90                                            | 100,00                              | 90,00                                                              | 80,00                                                                     | 90,00                                                                 | 100,00                                                |
|     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                          | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan | %       | 100                                                                                                | 100                                                                                                         | 100                                                                           | 100                                           | 100,00                              | 100,00                                                             | 55,00                                                                     | 100,00                                                                | 100,00                                                |
|     | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                          | Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah                                                           | Dokumen | 18                                                                                                 | 8                                                                                                           | 6                                                                             | 6                                             | 100,00                              | 4                                                                  | 0                                                                         | 10                                                                    | 55,56                                                 |
|     | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                               |                                               |                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                       |                                                       |
|     |                                                                                          | Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah                                                      | Laporan | 24                                                                                                 | 4                                                                                                           | 8                                                                             | 8                                             | 100,00                              | 6                                                                  | 3                                                                         | 14                                                                    | 58,33                                                 |

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024–2026, secara umum tingkat capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai 100 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah telah berjalan secara efektif dan selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra.

Pada tingkat program, capaian kinerja Tahun 2024 berada pada kisaran capaian tinggi, di mana hampir seluruh indikator program mampu memenuhi target yang direncanakan. Persentase capaian indikator program menunjukkan konsistensi antara target Renja Tahun 2024 dengan realisasi pelaksanaan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026.

Selanjutnya, pada tingkat kegiatan dan subkegiatan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas indikator kinerja mencapai target sebesar 100 persen, baik dari sisi keluaran (output) berupa dokumen, laporan, maupun fasilitasi kegiatan pemerintahan. Beberapa indikator kinerja lainnya menunjukkan capaian mendekati target, yaitu berada pada rentang capaian tinggi (di atas 90 persen), yang secara umum masih mencerminkan kinerja yang optimal dan dapat diterima.

Capaian kinerja Renja Tahun 2024 tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap capaian kinerja Renstra Tahun 2024–2026. Persentase realisasi indikator Renstra hingga Tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah berada pada jalur pencapaian yang sesuai dengan target akhir Renstra. Dengan capaian tahunan yang tinggi, maka akumulasi capaian kinerja hingga periode berjalan telah mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis Renstra secara bertahap dan berkelanjutan.

Meskipun capaian kinerja secara umum telah mencapai target, evaluasi juga menunjukkan adanya sebagian kecil indikator dengan capaian yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam penguatan koordinasi, ketepatan waktu pelaksanaan, serta peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan persentase capaian indikator kinerja, pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat dinilai sangat berhasil, serta telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024–2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan capaian Tahun 2025 mengacu pada APBD Tahun 2024 yang tersebar di 9 (sembilan) Biro lingkup Setda yang berada pada unsur pendukung urusan pemerintahan provinsi, secara ringkas sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan ketercapaian kinerja 3 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Efektivitas kerjasama daerah; Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan

- wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti; dan Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah.
2. Program Kesejahteraan Rakyat  
Dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat dengan ketercapaian kinerja 3 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase Capaian Kinerja Program Bidang Pelayanan Dasar, Persentase Capaian Kinerja Program Bidang Pelayanan Non Dasar, dan Persentase Fasilitas Keagamaan Dalam Kondisi Baik.
  3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum  
Dilaksanakan oleh Biro Hukum dengan ketercapaian kinerja 4 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan; Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi; Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani; dan Persentase kabupaten/kota peduli HAM.
  4. Program Perekonomian dan Pembangunan  
Terdapat 8 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% yang dilaksanakan oleh dua Biro Setda, yaitu:
    - a. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dengan 3 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase capaian kinerja program bidang pertanian; Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan; serta Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur.
    - b. Biro Perekonomian dengan 5 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan; Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan; Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan; Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha; dan Persentase nilai kemandirian BLUD.
  5. Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa  
Dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketercapaian kinerja 3 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa; Persentase efektivitas pengadaan secara elektronik; dan Persentase permasalahan kelembagaan UKPBJ dan proses pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi
  6. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan  
Dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan ketercapaian kinerja 5 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Capaian pelaksanaan APBD; Capaian pelaksanaan APBN; Persentase realisasi bantuan keuangan; Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah; dan Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah.

## 7. Program Penataan Organisasi

Dilaksanakan oleh Biro Organisasi dengan ketercapaian kinerja 8 indikator program secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu indikator Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi; Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya; Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif; Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A; Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A; Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan; dan Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan. Sedangkan indikator Persentase kabupaten/ kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB mengalami lonjakan capaian terhadap target kinerja IRB 14,29% sebanyak 5 Kab/Kota terealisasi 19 Kab/Kota atau sebesar 54,29%.

## 8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Sekretariat Daerah)

Dilaksanakan oleh 9 Biro lingkup Setda sejumlah 12 indikator kinerja yang secara keseluruhan tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu:

- a. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Organisasi dan Asisten Administrasi.
- b. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Isda dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Pemotda KS dan Asisten Pemerintahan.
- d. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Perekonomian.
- e. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
- f. Persentase Tingkat Pelayanan Umum, Kepegawaian, Dan Keuangan Perangkat Biro Hukum.
- g. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Kesejahteraan Rakyat.
- h. Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan 2 indikator kinerja Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Biro Administrasi Pembangunan Daerah; dan Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah.
- i. Biro Umum dengan 3 indikator kinerja Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda; Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan; serta Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah merupakan capaian kinerja Setda yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja

pelayanan Sekretariat Daerah dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Adapun kinerja pelayanan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2024. Berikut kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
 Provinsi Jawa Tengah 2024

| No. | Indikator                                                                                                              | Satuan | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD |      | Realisasi capaian Tahun 2024 | Proyeksi Capaian Tahun 2025 | Catatan Analisis |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|-------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                        |        |                      |     | 2025              | 2026 |                              |                             |                  |
| (1) | (2)                                                                                                                    | (3)    | (4)                  | (5) | (7)               | (6)  | (8)                          | (9)                         | (10)             |
| 1   | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti * | %      |                      |     | 95                | 95   | 100                          | 95                          | Tercapai         |
| 2   | Tingkat efektivitas kerjasama daerah                                                                                   | %      |                      |     | 95                | 95   | 100                          | 95                          | Tercapai         |
| 3   | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                                                              | %      |                      |     | 95                | 95   | 100                          | 95                          | Tercapai         |
| 4   | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar                                         | %      |                      |     | 83                | 85   | 81                           | 83                          | Tercapai         |
| 5   | Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non                                           | %      |                      |     | 84                | 85   | 82                           | 84                          | Tercapai         |

| No. | Indikator                                                                                             | Satuan | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target<br>Renstra PD |       | Realisasi<br>capaian<br>Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Catatan<br>Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                       |        |                             |     | 2025                 | 2026  |                                       |                                      |                     |
| 6   | dasar<br><br>Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik                                        | %      |                             |     | 60                   | 63    | 54                                    | 60                                   |                     |
| 7   | Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan | %      |                             |     | 97                   | 97    | 100                                   | 97                                   | Tercapai            |
| 8   | Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kot a yang dikaji                                         | %      |                             |     | 96                   | 96    | 100                                   | 96                                   | Tercapai            |
| 9   | Persentase kabupaten/kot a peduli HAM                                                                 | %      |                             |     | 96                   | 96    | 100                                   | 96                                   | Tercapai            |
| 10  | Persentase capaian kinerja program bidang pertanian                                                   | %      |                             |     | 87                   | 87    | 89,01                                 | 87                                   | Tercapai            |
| 11  | Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan                           | %      |                             |     | 85                   | 85    | 99,3                                  | 85                                   | Tercapai            |
| 12  | Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur                                               | %      |                             |     | 85                   | 85    | 97,33                                 | 85                                   | Tercapai            |
| 13  | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang                                              | %      |                             |     | 84                   | 85,00 | 83                                    | 84                                   | Tercapai            |

| No. | Indikator                                                                                                                                                     | Satuan | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target<br>Renstra PD |      | Realisasi<br>capaian<br>Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Catatan<br>Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                               |        |                             |     | 2025                 | 2026 |                                       |                                      |                     |
|     | diusulkan sebagai kebijakan                                                                                                                                   |        |                             |     |                      |      |                                       |                                      |                     |
| 14  | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan                                                                          | %      |                             |     | 79                   | 80   | 78                                    | 79                                   | Tercapai            |
| 15  | Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan                                                                                                               | %      |                             |     | 86                   | 87   | 89,88                                 | 86                                   | Tercapai            |
| 16  | Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha                                                                                                                 | %      |                             |     | 82                   | 83   | 100,68                                | 82                                   |                     |
| 17  | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                                                                             | %      |                             |     | 56                   | 57   | 71,78                                 | 56                                   | Tercapai            |
| 18  | Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa                                                                                                                   | %      |                             |     | 91                   | 92   | 94,78                                 | 91                                   |                     |
| 19  | Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik                                                                                                               | %      |                             |     | 82                   | 85   | 88,67                                 | 82                                   | Tercapai            |
| 20  | Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa | %      |                             |     | 82                   | 83   | 81,25                                 | 82                                   | Tercapai            |

| No. | Indikator                                                                                             | Satuan | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target<br>Renstra PD |       | Realisasi<br>capaian<br>Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Catatan<br>Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                       |        |                             |     | 2025                 | 2026  |                                       |                                      |                     |
| 21  | Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi                  | %      |                             |     | 70                   | 74    | 66                                    | 70                                   | Tercapai            |
| 22  | Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya                                | %      |                             |     | 88,57                | 91,43 | 85,71                                 | 88,57                                | Tercapai            |
| 23  | Persentase perangkat daerah yang mengimplemen-<br>tasikan hasil analisis jabatan secara efektif       | %      |                             |     | 90                   | 93,88 | 92                                    | 90                                   | Tercapai            |
| 24  | Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A | %      |                             |     | 36,59                | 82    | 61,22                                 | 36,59                                | Tercapai            |
| 25  | Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB                                        | %      |                             |     | 48,87                | 20    | 54,29                                 | 48,87                                | Tercapai            |
| 26  | Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A                                                      | %      |                             |     | 69,05                | 71,43 | 64,28                                 | 69,05                                | Tercapai            |
| 27  | Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan                                   | %      |                             |     | 92                   | 94    | 57,7                                  | 92                                   | Tercapai            |

| No. | Indikator                                                                                                  | Satuan | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target<br>Renstra PD |       | Realisasi<br>capaian<br>Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Catatan<br>Analisis |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                            |        |                             |     | 2025                 | 2026  |                                       |                                      |                     |
| 28  | Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplemen-<br>tasikan standar pelayanan                     |        |                             |     | 91,01                | 93,86 | 88,73                                 | 91,01                                | Tercapai            |
| 29  | Persentase capaian pelaksanaan APBD                                                                        | %      |                             |     | 98,8                 | 98,85 | 99,76                                 | 98,8                                 | Tercapai            |
| 30  | Persentase capaian pelaksanaan APBN                                                                        | %      |                             |     | 95,5                 | 95,5  | 96,72                                 | 95,5                                 | Tercapai            |
| 31  | Persentase realisasi bantuan keuangan                                                                      | %      |                             |     | 85                   | 85    | 99,21                                 | 85                                   | Tercapai            |
| 32  | Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah      | %      |                             |     | 86                   | 87    | 85                                    | 86                                   | Tercapai            |
| 33  | Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi                                | %      |                             |     | 100                  | 100   | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 34  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang | %      |                             |     | 100                  | 100   | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |

| No. | Indikator                                                                                                          | Satuan | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target<br>Renstra PD |      | Realisasi<br>capaian<br>Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Catatan<br>Analisis |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                    |        |                             |     | 2025                 | 2026 |                                       |                                      |                     |
| 35  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum                           | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 36  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 37  | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah                                                           | %      |                             |     | 90                   | 90   | 90                                    | 90                                   | Tercapai            |
| 38  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian                    | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 39  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat            | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 40  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian,                                                                    | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |

| No. | Indikator                                                                                                                                                                     | Satuan | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK | Target<br>Renstra PD |      | Realisasi<br>capaian<br>Tahun<br>2024 | Proyeksi<br>Capaian<br>Tahun<br>2025 | Catatan<br>Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|----------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                               |        |                             |     | 2025                 | 2026 |                                       |                                      |                     |
|     | dan keuangan<br>perangkat<br>daerah Biro<br>Organisasi dan<br>Asisten<br>Administrasi                                                                                         |        |                             |     |                      |      |                                       |                                      |                     |
| 41  | Persentase<br>tingkat<br>pelayanan<br>umum,<br>kepegawaian,<br>dan keuangan<br>perangkat<br>daerah pada<br>Bagian Rumah<br>Tangga Setda                                       | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 42  | Persentase<br>tingkat<br>pelayanan<br>umum,<br>kepegawaian,<br>dan keuangan<br>perangkat<br>daerah Bagian<br>TU dan Rumah<br>Tangga<br>Pimpinan                               | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 43  | Persentase<br>tingkat<br>pelayanan<br>umum,<br>kepegawaian,<br>dan keuangan<br>perangkat<br>daerah pada<br>Bagian Humas<br>dan Protokol                                       | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |
| 44  | Persentase<br>tingkat<br>pelayanan<br>umum,<br>kepegawaian,<br>dan keuangan<br>perangkat<br>daerah Biro<br>Pemerintahan,<br>Otonomi<br>Daerah dan<br>Kerjasama dan<br>Asisten | %      |                             |     | 100                  | 100  | 100                                   | 100                                  | Tercapai            |

| No. | Indikator                                                                                                         | Satuan | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD |      | Realisasi capaian Tahun 2024 | Proyeksi Capaian Tahun 2025 | Catatan Analisis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----|-------------------|------|------------------------------|-----------------------------|------------------|
|     |                                                                                                                   |        |                      |     | 2025              | 2026 |                              |                             |                  |
|     | Pemerintahan                                                                                                      |        |                      |     |                   |      |                              |                             |                  |
| 45  | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa | %      |                      |     | 100               | 100  | 100                          | 100                         | Tercapai         |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan proyeksi dalam RKPD Tahun 2025.

RKPD Tahun 2026 juga memuat hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025, disamping rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan berpedoman pada kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, maka RKPD Tahun 2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Untuk itu, pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”.

Adapun permasalahan Pembangunan Daerah Jawa Tengah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, yaitu:

1. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.
2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kondisi global yang semakin terbuka,
3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur.

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Reformasi Birokrasi melalui peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur.
6. Kondusivitas daerah melalui upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan isu dan permasalahan utama unsur sekretariat daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan memiliki fungsi koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah adalah belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan antara lain masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah.

Memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan mampu menghasilkan kinerja yang baik, berikut agenda-agenda penting di lingkup Sekretariat Daerah, antara lain:

- 1) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah;
- 2) Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah
- 3) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Pengiriman delegasi dalam forum UCLG;
- 5) Perluasan kerjasama di bidang pendidikan dengan Turkey atau Mesir;
- 6) Fasilitasi Forum Komunitas peningkatan kerjasama lingkup Luar Negeri (Diaspora);
- 7) Perluasan kerjasama bidang kesehatan dan pariwisata dengan Fujian Republik Rakyat Tiongkok;
- 8) Koordinasi Pencegahan *Bullying* dari aspek Religius;
- 9) Optimalisasi peran Tim Koordinasi Pendidikan dan pelatihan Vokasi (TKDV);
- 10) Pemenuhan SDM Petugas Haji Daerah;
- 11) Koordinasi Penciptaan/Perluasan Kesempatan Kerja;
- 12) Koordinasi Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah dan Swasta (Revitalisasi BLK)
- 13) Hibah pesantren;
- 14) Penyelenggaraan Jateng Bersholawat;
- 15) Insentif pengajar agama;
- 16) Insentif penghafal kitab;
- 17) Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi;

- 18) Penyusunan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan Produk Hukum Pusat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pembangunan di Jawa Tengah;
- 19) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jawa Tengah;
- 20) Fasilitasi penanganan gugatan perkara perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi;
- 21) Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Jawa Tengah;
- 22) Fasilitasi aduan masyarakat terkait permasalahan hukum dan pelanggaran HAM;
- 23) Fasilitasi penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 24) Mengkoordinasikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan pokok;
- 25) Mendorong BUMD agar lebih produktif dan efisien;
- 26) Merumuskan kebijakan ekonomi makro yang adaptif dan berorientasi pada hasil, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh dalam mempercepat pemulihan ekonomi;
- 27) Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Jawa Tengah;
- 28) Sinergisitas Pengembangan Geopark Jateng;
- 29) Pemantauan pelaksanaan SPPG untuk program MBG di Jateng;
- 30) Pemantauan capaian Program Daerah yakni Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan, penghapusan hutang petani dan nelayan, program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida, dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
- 31) Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender;
- 32) Konsolidasi Pengadaan Barrang/Jasa Melalui Katalog;
- 33) Sosialisasi Migrasi Sistem Tokodaring ke Inaproc;
- 34) Pendampingan UKPBJ menuju tingkat kematangan level 3 (Proaktif);
- 35) Mendukung kegiatan Selapanan Gubernur Jawa Tengah;
- 36) Pengendalian pelaksanaan 136 Program Daerah yang dibarengi dengan pelaksanaan pengendalian APBD/APBN, pengendalian kewilayahan serta pengendalian kinerja Perangkat Daerah;
- 37) Fasilitasi dan koordinasi monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni;
- 38) Dukungan pengendalian program Daerah pembangunan Gelanggang Olah Raga, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan;
- 39) Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 40) Pembinaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- 41) Pembinaan dan penataan kelembagaan provinsi dan kabupaten/kota;

- 42) Pembinaan dan evaluasi kematangan organisasi dan kualitas kebijakan daerah;
- 43) Pembinaan dan penataan analisis jabatan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 44) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah provinsi;
- 45) Pelaksanaan fasilitasi tata laksana pemerintahan;
- 46) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Pengadaan Solar shell pada sebagian kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah;
- 47) Peningkatan fasilitasi komunikasi pimpinan antara lain publikasi dan hubungan media;
- 48) Pemeliharaan barang inventaris secara komprehensif untuk meningkatkan pelayanan umum kepada pimpinan dan masyarakat;

#### 2.4 Reviu terhadap RKPD

Mencermati realisasi, tingkat ketercapaian indikator kinerja, kondisi keuangan daerah, kondisi makro ekonomi, dan tantangan berbagai bidang, maka dilakukan reviu terhadap RKPD tahun 2026 yang dituangkan dalam Hasil Analisis Kebutuhan sebagaimana dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

| RANCANGAN AWAL RKPD |                                                            |                                                       |                                                                                                                                |                   |                 | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN |                                            |                                                               |                                                                                                                                |                   |                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| No.                 | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                         | Lokasi                                                | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                                       | Target<br>Kinerja | Pagu Renstra    | No.                      | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)         | Lokasi                                                        | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                                       | Target<br>Kinerja | Pagu RPD        |
|                     |                                                            |                                                       |                                                                                                                                | 2026              |                 |                          |                                            |                                                               |                                                                                                                                | 2026              |                 |
| (1)                 | (2)                                                        | (3)                                                   | (4)                                                                                                                            | (5)               | (6)             | (1)                      | (2)                                        | (3)                                                           | (4)                                                                                                                            | (5)               | (6)             |
| I                   | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN OTONOMI DAERAH                 | BIRO PEMERINTAHAN,<br>OTONOMI DAERAH DAN<br>KERJASAMA |                                                                                                                                |                   | 2.715.000.000   | I                        | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN OTONOMI DAERAH | BIRO PEMERINTAHAN,<br>OTONOMI DAERAH DAN<br>KERJASAMA         |                                                                                                                                |                   | 2.919.557.000   |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase rekomendasi<br>bidang administrasi<br>pemerintahan, penataan<br>wilayah dan pemerintahan<br>umum yang tindaklanjuti | 100%              | 900.000.000     |                          |                                            |                                                               | Persentase rekomendasi<br>bidang administrasi<br>pemerintahan, penataan<br>wilayah dan pemerintahan<br>umum yang tindaklanjuti | 100%              | 675.000.000     |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase tertib<br>administrasi pelaksanaan<br>otonomi daerah                                                                | 100%              | 780.000.000     |                          |                                            |                                                               | Persentase tertib<br>administrasi pelaksanaan<br>otonomi daerah                                                                | 100%              | 558.263.000     |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase pemetaan<br>potensi kerjasama daerah<br>yang ditindaklanjuti                                                        | 100%              | 1.035.000.000   |                          |                                            |                                                               | Persentase pemetaan<br>potensi kerjasama daerah<br>yang ditindaklanjuti                                                        | 100%              | 1.686.294.000   |
| II                  | PROGRAM FASILITASI DAN<br>KOORDINASI HUKUM                 | BIRO HUKUM                                            |                                                                                                                                |                   | 2.312.898.000   | II                       | PROGRAM FASILITASI DAN<br>KOORDINASI HUKUM | BIRO HUKUM                                                    |                                                                                                                                |                   | 2.856.000.000   |
|                     |                                                            |                                                       | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                         | 92%               | 843.129.000     |                          |                                            |                                                               | Indeks Reformasi Hukum                                                                                                         | 92%               | 866.821.000     |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase Efektifitas<br>Pengawasan Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota                                                            | 96%               | 490.313.000     |                          |                                            |                                                               | Persentase Efektifitas<br>Pengawasan Produk<br>Hukum Kabupaten/Kota                                                            | 96%               | 516.313.000     |
|                     |                                                            |                                                       | Capaian Pemberian Bantuan<br>Hukum                                                                                             | 100%              | 827.916.000     |                          |                                            |                                                               | Capaian Pemberian<br>Bantuan Hukum                                                                                             | 100%              | 1.321.326.000   |
|                     |                                                            |                                                       | Nilai Capaian Pelaksanaan<br>Aksi HAM                                                                                          | 86%               | 151.540.000     |                          |                                            |                                                               | Nilai Capaian Pelaksanaan<br>Aksi HAM                                                                                          | 86%               | 151.540.000     |
| III                 | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT DAN PENGENTASAN<br>KEMISKINAN | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT                          |                                                                                                                                |                   | 349.881.025.000 | III                      | PROGRAM<br>KESEJAHTERAAN RAKYAT            | BIRO KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT DAN<br>PENGENTASAN<br>KEMISKINAN |                                                                                                                                |                   | 422.418.757.000 |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase capaian kinerja<br>program Kesejahteraan<br>Rakyat bidang pelayanan<br>dasar                                        | 85%               | 825.000.000     |                          |                                            |                                                               | Persentase capaian kinerja<br>program Kesejahteraan<br>Rakyat bidang pelayanan<br>dasar                                        | 85%               | 600.000.000     |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase capaian kinerja<br>program Kesejahteraan<br>Rakyat bidang pelayanan<br>non dasar                                    | 85%               | 1.725.000.000   |                          |                                            |                                                               | Persentase capaian kinerja<br>program Kesejahteraan<br>Rakyat bidang pelayanan<br>non dasar                                    | 85%               | 650.000.000     |
|                     |                                                            |                                                       | Persentase fasilitas<br>keagamaan dalam kondisi<br>baik                                                                        | 63%               | 337.709.994.000 |                          |                                            |                                                               | Persentase fasilitas<br>keagamaan dalam kondisi<br>baik                                                                        | 63%               | 421.168.757.000 |

| No. | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)            | Lokasi                                  | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                                                    | Target<br>Kinerja | Pagu Renstra  | No. | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)            | Lokasi                                                                                                                                      | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan) | Target<br>Kinerja | Pagu RPD      |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|     |                                               |                                         |                                                                                                                                             | 2026              |               |     |                                               |                                                                                                                                             |                                                          | 2026              |               |
| (1) | (2)                                           | (3)                                     | (4)                                                                                                                                         | (5)               | (6)           | (1) | (2)                                           | (3)                                                                                                                                         | (4)                                                      | (5)               | (6)           |
| IV  | PROGRAM PEREKONOMIAN<br>DAN PEMBANGUNAN       |                                         |                                                                                                                                             |                   | 7.351.000.000 | IV  | PROGRAM PEREKONOMIAN<br>DAN PEMBANGUNAN       |                                                                                                                                             |                                                          |                   | 4.640.000.000 |
|     |                                               | BIRO PEREKONOMIAN                       |                                                                                                                                             |                   | 2.647.952.000 |     |                                               | BIRO PEREKONOMIAN                                                                                                                           |                                                          |                   | 2.660.000.000 |
|     |                                               |                                         | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan                                                        | 80%               | 347.000.000   |     |                                               | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan                                                        | 80%                                                      | 215.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *** | 85%               | 797.000.000   |     |                                               | Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *** | 85%                                                      | 600.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ***                                                 | 87%               | 818.952.000   |     |                                               | Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan ***                                                 | 87%                                                      | 1.462.912.000     |               |
|     |                                               |                                         | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan                                                                 | 85%               | 338.000.000   |     |                                               | Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan                                                                 | 85%                                                      | 175.870.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral ***                                                                    | 85%               | 347.000.000   |     |                                               | Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral ***                                                                    | 85%                                                      | 206.218.000       |               |
|     |                                               | BIRO BUMD DAN BLUD                      |                                                                                                                                             |                   | 2.075.000.000 |     |                                               | BIRO BUMD DAN BLUD                                                                                                                          |                                                          |                   | 1.980.000.000 |
|     |                                               |                                         | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan ***                                                                                      | 1,95%             | 875.000.000   |     |                                               | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan ***                                                                                      | 1,95%                                                    | 875.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha ***                                                                                   | 2,30%             | 800.000.000   |     |                                               | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha ***                                                                                   | 2,30%                                                    | 750.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                                                           | 55%               | 400.000.000   |     |                                               | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                                                           | 55%                                                      | 355.000.000       |               |
|     |                                               |                                         |                                                                                                                                             |                   |               |     |                                               |                                                                                                                                             |                                                          |                   |               |
| V   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                                             |                   | 3.325.000.000 | V   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN | BIRO ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                     |                                                          |                   | 1.755.000.000 |
|     |                                               |                                         | Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN                                                                                              | 90,00%            | 1.525.000.000 |     |                                               | Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN                                                                                              | 90,00%                                                   | 625.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase realisasi bantuan keuangan                                                                                                       | 86%               | 1.000.000.000 |     |                                               | Persentase realisasi bantuan keuangan                                                                                                       | 86%                                                      | 740.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 86,5%             | 300.000.000   |     |                                               | Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | 86,5%                                                    | 195.000.000       |               |
|     |                                               |                                         | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan                                                                  | 100%              | 500.000.000   |     |                                               | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan                                                                  | 100%                                                     | 195.000.000       |               |

| No.  | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                        | Lokasi                                      | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                  | Target<br>Kinerja | Pagu Renstra    | No.  | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                        | Lokasi                                      | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                  | Target<br>Kinerja | Pagu RPD        |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|      |                                                           |                                             |                                                                                                           | 2026              |                 |      |                                                           |                                             |                                                                                                           | 2026              |                 |
| (1)  | (2)                                                       | (3)                                         | (4)                                                                                                       | (5)               | (6)             | (1)  | (2)                                                       | (3)                                         | (4)                                                                                                       | (5)               | (6)             |
| VI   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                                                                                           |                   | 2.279.314.000   | VI   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA |                                                                                                           |                   | 1.781.081.000   |
|      |                                                           |                                             | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa                                                               | 92%               | 1.112.084.000   |      |                                                           |                                             | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa                                                               | 92%               | 839.176.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik                                                        | 85%               | 556.900.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik                                                        | 85%               | 475.139.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ                             | 83%               | 610.330.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ                             | 83%               | 466.766.000     |
| VII  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | BIRO ORGANISASI                             |                                                                                                           |                   | 1.739.028.000   | VII  | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | BIRO ORGANISASI                             |                                                                                                           |                   | 2.056.666.000   |
|      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi ***                  | 71,00%            | 257.352.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi ***                  | 71,00%            | 199.101.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya ***                                | 91,43%            | 207.400.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan                                                  | 91,43%            | 144.920.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif ***            | 92,00%            | 207.800.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif ***            | 92,00%            | 164.094.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A ***                                              | 59,52%            | 140.000.000     |      |                                                           |                                             | Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A ***                                              | 59,52%            | 145.202.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ***                                        | 71,42%            | 155.860.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ***                                        | 71,42%            | 120.398.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat ***                                              | 70,00%            | 235.160.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat ***                                              | 71,43%            | 214.847.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan ***                                   | 93,00%            | 271.140.000     |      |                                                           |                                             | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan ***                                   | 93,00%            | 217.896.000     |
|      |                                                           |                                             | Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP ( Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas *** | 39,21%            | 264.316.000     |      |                                                           |                                             | Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP ( Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas *** | 39,21%            | 850.208.000     |
| VIII | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI *** |                                             |                                                                                                           |                   | 257.107.143.000 | VIII | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI *** |                                             |                                                                                                           |                   | 275.716.004.000 |

| No. | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan) | Lokasi                                          | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                                   | Target<br>Kinerja | Pagu Renstra    | No. | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan) | Lokasi                                               | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)                                                               | Target<br>Kinerja | Pagu RPD        |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|     |                                    |                                                 |                                                                                                                            | 2026              |                 |     |                                    |                                                      |                                                                                                                        | 2026              |                 |
| (1) | (2)                                | (3)                                             | (4)                                                                                                                        | (5)               | (6)             | (1) | (2)                                | (3)                                                  | (4)                                                                                                                    | (5)               | (6)             |
|     |                                    | BIRO UMUM                                       | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ***       | 100,00%           | 218.430.804.000 |     |                                    | BIRO UMUM                                            | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ***   | 100,00%           | 228.284.149.000 |
|     |                                    |                                                 | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ***                    | 100,00%           | 8.611.000.000   |     |                                    |                                                      | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                    | 100,00%           | 10.535.000.000  |
|     |                                    |                                                 | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ***                         | 100,00%           | 25.760.000.000  |     |                                    |                                                      | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ***                     | 100,00%           | 32.173.932.000  |
|     |                                    | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan ***             | 100,00%           | 929.526.000     |     |                                    | BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA      | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan             | 100,00%           | 511.956.000     |
|     |                                    | BIRO HUKUM                                      | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum ***                                                                           | 100,00%           | 387.694.000     |     |                                    | BIRO HUKUM                                           | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum ***                                                                       | 100,00%           | 631.018.000     |
|     |                                    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ***                | 100,00%           | 550.000.000     |     |                                    | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ***            | 100,00%           | 1.630.155.000   |
|     |                                    | BIRO PEMBANGUNAN DAERAH                         | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah ***                  | 100,00%           | 420.524.000     |     |                                    | BIRO PEMBANGUNAN DAERAH                              | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan                         | 100,00%           | 346.500.000     |
|     |                                    | BIRO PEREKONOMIAN                               | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ***                        | 100,00%           | 245.000.000     |     |                                    | BIRO PEREKONOMIAN                                    | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian                        | 100,00%           | 217.884.000     |
|     |                                    | BIRO BUMD                                       | Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ***                                        | 100,00%           | 655.000.000     |     |                                    | BIRO BUMD dan BLUD                                   | Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ***                                    | 100,00%           | 421.074.000     |
|     |                                    | BIRO ORGANISASI                                 | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi *** | 100,00%           | 642.169.000     |     |                                    | BIRO ORGANISASI                                      | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | 100,00%           | 590.064.000     |
|     |                                    | BIRO ADM. PENGADAAN BARANG/JASA                 | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ***                                                  | 100,00%           | 225.426.000     |     |                                    | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                           | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ***                                              | 100,00%           | 204.272.000     |

| No.   | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan) | Lokasi                     | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)             | Target<br>Kinerja | Pagu Renstra    | No.   | Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan) | Lokasi                     | Indikator Kinerja<br>(Program/Kegiatan<br>(Sub Kegiatan)             | Target<br>Kinerja | Pagu RPD        |
|-------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|       |                                    |                            |                                                                      | 2026              |                 |       |                                    |                            |                                                                      | 2026              |                 |
| (1)   | (2)                                | (3)                        | (4)                                                                  | (5)               | (6)             | (1)   | (2)                                | (3)                        | (4)                                                                  | (5)               | (6)             |
|       |                                    | BIRO PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Persentase tingkat<br>ketercapaian kinerja<br>Sekretariat Daerah *** | 100,00%           | 250.000.000     |       |                                    | BIRO PEMBANGUNAN<br>DAERAH | Persentase tingkat<br>ketercapaian kinerja<br>Sekretariat Daerah *** | 100,00%           | 170.000.000     |
| TOTAL |                                    |                            |                                                                      |                   | 626.710.408.000 | TOTAL |                                    |                            |                                                                      |                   | 714.143.065.000 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan usulan kegiatan dari masyarakat karena bukan lembaga teknis. Usulan kegiatan masyarakat yang masuk ke Setda dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (OPD/SKPD) Teknis.

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

RKPD tahun 2026 diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDG's); dan Dokumen perencanaan pembangunan tematik di tingkat daerah.

Prioritas Nasional Tahun 2026, meliputi:

- 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru,
- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif,
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesenian, Kesetaraan, Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas,
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri,
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan,
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan,
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Arah kebijakan strategis nasional menjadi penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, meliputi: (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (4) Penguatan daya saing; (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; dan (6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.

Terkait arah kebijakan strategis nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merumuskan prioritas pembangunan Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2025-2029, pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diarahkan pada tema “Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis”, yang dijabarkan dalam Prioritas Daerah dan fokusnya tahun 2026, antara lain:

1. Prioritas Daerah pertama, Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan Infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Prioritas Daerah kedua, Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Prioritas Daerah ketiga, Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Prioritas Daerah keempat, Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Telaah terhadap hubungan antara kebijakan nasional dan kebijakan di tingkat provinsi Jawa Tengah memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai aspek kebijakan yang saling terkait. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pembangunan di tingkat provinsi.

3.1.1. Inflasi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dijaga kestabilannya pada level rendah. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meliputi pengeluaran bahan makanan dan makanan jadi ditambah dengan minuman dan tembakau.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Jawa Tengah pada Desember 2024 secara year-on-year (yoy) menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Jawa Tengah di Sembilan kabupaten/kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi yoy sebesar 1,67%. Meskipun terjadi peningkatan harga, namun angka ini tidak lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,57%.

Selama tiga tahun terakhir, inflasi Jawa Tengah berfluktuasi di kisaran 1,56% hingga 5,63%. Hal ini didorong oleh tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM. Selain itu, meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi juga mendorong laju inflasi. Inflasi kembali terkendali di bawah 3% pada tahun 2023 dan semakin rendah pada tahun 2024. Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2013-2024 (%) sebagaimana Tabel berikut:

| Inflasi (yoy) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nasional      | 8,38 | 8,36 | 3,35 | 3,02 | 3,61 | 3,13 | 2,72 | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 2,61 | 1,57 |
| Jawa Tengah   | 7,98 | 8,82 | 2,73 | 2,36 | 3,71 | 2,82 | 2,81 | 1,56 | 1,70 | 5,63 | 2,89 | 1,67 |

Tren penurunan inflasi di Jawa Tengah hingga tahun 2024 memiliki pola yang sama dengan tren penurunan nasional. Hal ini berarti bahwa perilaku inflasi di Jawa Tengah mempengaruhi perilaku dan kinerja inflasi nasional.

Pengendalian inflasi di Jawa Tengah sebagai wujud kinerja antara Pemprov, Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Bulog, BUMD dan stakeholder lainnya, yang dilakukan melalui 2 sisi yaitu sisi hulu dan sisi hilir. Pengendalian sisi hulu antara lain melalui bantuan benih cabai, fasilitasi pupuk bersubsidi, sosialisasi gerakan menanam di pekarangan, pembangunan green house dalam optimalisasi budidaya cabai. Pengendalian sisi hilir dengan cara penyaluran beras cadangan pemerintah (CPP), pemberian subsidi pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran fasilitasi distribusi pupuk pada petani/Gapoktan/pelaku pangan lainnya, pengawasan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Inovasi dalam pengendalian inflasi di Jawa Tengah antara lain melalui BUMD Jateng Peduli Inflasi, inisiasi pembentukan ekosistem/distribusi cabai/bawang merah, perluasan area greenhouse, penguatan *Early Warning System* harga komoditi, gerakan 1.000 petani peduli inflasi, serta kios TPID Pandawa Kita.

Penghargaan yang diraih dalam pengendalian inflasi Jawa Tengah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah Berkinerja Terbaik kategori provinsi untuk Regional Jawa Bali.

3.1.2. Kualitas Sumber Daya Manusia, meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga
- 5) Meningkatkan literasi masyarakat dan peningkatan minat baca masyarakat.
- 6) Meningkatkan pembangunan kepemudaan yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda
- 7) Meningkatkan pemajuan kebudayaan.
- 8) Meningkatkan harmoni sosial antar pemeluk agama, suku dan ras.
- 9) Meningkatkan pembangunan berbasis gender.
- 10) Meningkatkan ketahanan keluarga.
- 11) Penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif.

Pemerintah semakin fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia karena perannya yang sangat penting. Untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu daerah,

digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menjadi standar dalam menilai kualitas sumber daya manusia. IPM mencakup tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga memungkinkan perbandingan antarwilayah.

Dalam penghitungan IPM, tahun 2020 hingga 2023 menggunakan 2 metode, khususnya pada penghitungan komponen Umur Harapan Hidup (UHH) berbasis data hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan data hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Hasil penghitungan UHH Jawa Tengah tahun 2024 dengan basis data hasil proyeksi penduduk hasil SP2020 tercatat sebesar 74,91 tahun, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 74,69 tahun. Sementara penghitungan UHH berbasis hasil Long Form SP2020 menghasilkan angka yang sama, yaitu sebesar 74,69 tahun di tahun 2023. Pada level provinsi hasil penghitungan UHH menunjukkan angka yang sama, namun di level Kabupaten Kota terlihat ada perbedaan angka hasil penghitungan UHH. Angka ini tidak untuk diperbandingkan namun disandingkan sebagai pengetahuan, bahwa telah dilakukan penghitungan UHH dengan metode dan sumber data yang berbeda.

Sedangkan untuk penghitungan komponen Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menggunakan sumber yang sama yaitu Survei Sosial Ekonomi (Susenas).

Pada gambar di atas terlihat bahwa trend IPM baik di Jawa Tengah maupun secara nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, IPM Jawa Tengah naik 0,65 poin menjadi 73,87 dari sebelumnya 73,39. Kenaikan ini sedikit melambat jika dibandingkan pada tahun 2023 yang naik 0,81 poin, demikian pula tahun 2022 yang naik 0,87 poin. Semakin meningkatnya nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional.

Sementara itu capaian IPM menurut Kabupaten/Kota, di tahun 2024 rata-rata mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Adapun nilai IPM dengan status sangat tinggi dicapai oleh Kota Salatiga sebesar 85,72, lalu diikuti dengan Kota Semarang sebesar 85,24, Kota Surakarta 84,41 dan Kota Magelang sebesar 82,15. Sedangkan Kabupaten Pemalang memiliki capaian IPM terkecil sebesar 68,65, diikuti Kabupaten Banjarnegara sebesar 69,62 dan Kabupaten Brebes 70,18. Kota Surakarta mencapai pertumbuhan IPM tertinggi, yakni sebesar 1,21%. Sedangkan Kota Tegal mempunyai pertumbuhan terendah yaitu sebesar 0,57%. Seluruh Kabupaten/Kota meningkat dalam rentang 0,5-1,2%. Data lengkap IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel berikut:

| Provinsi/Kab/Kota      | Indeks Pembangunan Manusia |       |       |
|------------------------|----------------------------|-------|-------|
|                        | 2022                       | 2023  | 2024  |
| PROVINSI JAWA TENGAH   | 72,79                      | 73,39 | 73,88 |
| Kabupaten Cilacap      | 70,99                      | 71,83 | 72,38 |
| Kabupaten Banyumas     | 73,17                      | 73,86 | 74,52 |
| Kabupaten Purbalingga  | 69,54                      | 70,24 | 70,69 |
| Kabupaten Banjarnegara | 68,61                      | 69,14 | 69,60 |
| Kabupaten Kebumen      | 70,79                      | 71,37 | 71,93 |
| Kabupaten Purworejo    | 73,60                      | 74,28 | 75,11 |
| Kabupaten Wonosobo     | 68,89                      | 69,37 | 69,82 |
| Kabupaten Magelang     | 70,85                      | 71,45 | 71,99 |
| Kabupaten Boyolali     | 74,97                      | 75,41 | 75,96 |
| Kabupaten Klaten       | 76,95                      | 77,59 | 78,16 |
| Kabupaten Sukoharjo    | 77,94                      | 78,65 | 79,30 |
| Kabupaten Wonogiri     | 71,04                      | 71,97 | 72,55 |
| Kabupaten Karanganyar  | 76,58                      | 77,31 | 78,11 |
| Kabupaten Sragen       | 74,65                      | 75,10 | 75,53 |
| Kabupaten Grobogan     | 70,97                      | 71,49 | 72,02 |
| Kabupaten Blora        | 69,95                      | 70,63 | 71,39 |
| Kabupaten Rembang      | 71,00                      | 71,89 | 72,53 |
| Kabupaten Pati         | 73,14                      | 73,59 | 74,10 |
| Kabupaten Kudus        | 75,89                      | 76,71 | 77,22 |
| Kabupaten Jepara       | 73,15                      | 73,85 | 74,32 |
| Kabupaten Demak        | 73,36                      | 74,07 | 74,57 |
| Kabupaten Semarang     | 74,67                      | 75,13 | 75,67 |
| Kabupaten Temanggung   | 70,77                      | 71,33 | 71,87 |
| Kabupaten Kendal       | 73,19                      | 73,86 | 74,34 |
| Kabupaten Batang       | 69,45                      | 70,20 | 70,74 |
| Kabupaten Pekalongan   | 70,81                      | 71,40 | 71,84 |
| Kabupaten Pemalang     | 67,19                      | 68,03 | 68,55 |
| Kabupaten Tegal        | 69,53                      | 70,23 | 70,77 |
| Kabupaten Brebes       | 67,03                      | 67,95 | 68,46 |
| Kota Magelang          | 80,39                      | 81,17 | 82,15 |
| Kota Surakarta         | 83,08                      | 83,54 | 84,40 |
| Kota Salatiga          | 84,35                      | 84,99 | 85,72 |
| Kota Semarang          | 84,08                      | 84,43 | 85,25 |
| Kota Pekalongan        | 75,90                      | 76,71 | 77,22 |
| Kota Tegal             | 76,15                      | 77,02 | 77,43 |

3.1.3. Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, meliputi:

- 1) Peningkatan pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 2) Peningkatan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif.
- 3) Peningkatan ketahanan sumber daya air.
- 4) Menurunkan risiko bencana.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam

dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, ketahanan energi, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambien*, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya

penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.

#### 3.1.4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, meliputi:

- 1) Penguatan birokrasi yang adaptif.
- 2) Penguatan pemerintahan yang kolaboratif.

Tata kelola pemerintahan yang dinamis atau *dynamic governance* adalah salah satu sasaran daerah yang akan menjadi *mainstreaming* pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah. Tata kelola pemerintahan yang dinamis ini akan dapat terwujud dengan memperkuat pemerintahan yang adaptif dan birokrasi yang kolaboratif. Birokrasi yang dinamis adalah birokrasi yang senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*).

Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Kolaborasi dalam proses pemerintahan untuk pembangunan daerah saat ini menjadi mutlak karena dependensi antar daerah pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antar daerah, namun daerah dengan pemangku kepentingan lainnya pun harus semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah ini yang diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi, telah dilakukan melalui berbagai macam strategi dan upaya yang sejalan dengan prioritas daerah antara lain dengan upaya:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung

dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non pemerintah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

#### 3.2.1 Tujuan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perumusan tujuan dalam memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, maka ditetapkan dua tujuan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah.

#### 3.2.2 Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka dirumuskan Sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pertama Setda, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil.

Sedangkan Tujuan kedua Setda, Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memiliki dua sasaran, yaitu:

- (1). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- (2). Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran Sekretariat Daerah tersebut dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui sejumlah program mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sasaran pada Tujuan Pertama Setda, “Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil” akan dilaksanakan melalui program pada unsur pendukung urusan pemerintahan, yaitu:

- (1). Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- (2). Program Kesejahteraan Rakyat;
- (3). Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- (4). Program Perekonomian dan Pembangunan;
- (5). Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- (6). Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
- (7). Program Penataan Organisasi.

Sedangkan sasaran pada Tujuan kedua Setda, “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya

Manajemen Risiko Perangkat Daerah”, keduanya akan dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 beserta targetnya dituangkan sebagaimana dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2026

| Tujuan                                                       | Sasaran                                                                 | Indikator Tujuan dan Sasaran                                              | Satuan | Target |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah                       |                                                                         | Indeks Kualitas Kebijakan                                                 | Angka  | 66,4   |
|                                                              | Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi                          | %      | 29,5   |
|                                                              |                                                                         | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan                   | %      | 44     |
|                                                              |                                                                         | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | %      | 37     |
| Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah |                                                                         | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                               | Angka  | 76     |
|                                                              | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                | Angka  | 83     |

| Tujuan | Sasaran                                        | Indikator Tujuan dan Sasaran | Satuan | Target |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
|        | Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah | Nilai MRI Perangkat Daerah   | Angka  | 3      |

3.3 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Sekretarat Daerah pada konteks Strategis, dilakukan proses manajemen risiko level Strategis dituangkan sebagaimana dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2

Manajemen Risiko Strategis Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

| Tujuan/Sasaran Strategis PD                                             | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD                                       | Pernyataan Risiko                                                                  | Skala Risiko | Sebab                                                                        | Dampak                                                                                                            | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                              | Penanggung Jawab             | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (1)                                                                     | (2)                                                                       | (3)                                                                                | (4)          | (5)                                                                          | (6)                                                                                                               | (7)                                                                                                                      | (8)                          | (9)                       |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | MOU tidak terlaksana                                                               | 12           | Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta      | Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.                                                                     | Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak                                   | Asisten Pemerintah dan Kesra | September 2026            |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Gagal tercapainya kesepakatan batas                                                | 16           | Perbedaan arah kebijakan antar daerah                                        | Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah                                                                     | 1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah<br>2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota | Asisten Pemerintah dan Kesra | November 2026             |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani | 10           | Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum | kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan | Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko                                                             | Asisten Pemerintah dan Kesra | Triwulan IV 2026          |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD                                             | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD                                       | Pernyataan Risiko                                   | Skala Risiko | Sebab                                                                                                  | Dampak                                                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                        | Penanggung Jawab             | Target Waktu Penyelesaian           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                         |                                                                           |                                                     |              |                                                                                                        | daerah                                                                                                             |                                                                                                    |                              |                                     |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan          | 12           | Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi                                    | Hibah tidak sesuai dengan peruntukan                                                                               | NPHD ; Monitoring, evaluasi dan sosialisasi                                                        | Asisten Pemerintah dan Kesra | Triwulan II dan IV 2026             |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan                   | Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro | 12           | Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota | - Monev pelaksanaan hasil rekomendasi<br>- FGD pembahasan isu terkini terkait bidang ekonomi makro | Asisten ekonomi Pembangunan  | - TW II (Mei)<br>- TW IV (Nopember) |

| <b>Tujuan/Sasaran Strategis PD</b>                                      | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD</b>              | <b>Pernyataan Risiko</b>                                                                              | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                                                                       | <b>Dampak</b>                                                                             | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Penanggung Jawab</b>     | <b>Target Waktu Penyelesaian</b>                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan        | 12                  | Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan                         | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampuan dan stakeholder terkait | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal, diantaranya pada SPPG</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terhadap keamanan pangan seperti diantaranya terhadap bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG</li> </ul> | Asisten Ekonomi Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- TW I (Maret)</li> <li>- TW II (Juni)</li> </ul> |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan | 12                  | Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi) | Berpengaruh terhadap penerimaan PAD                                                       | Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asisten Ekonomi Pembangunan | 2026                                                                                     |

| <b>Tujuan/Sasaran Strategis PD</b>                                      | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD</b>              | <b>Pernyataan Risiko</b>                                                                                     | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                                                                              | <b>Dampak</b>                                                                 | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Penanggung Jawab</b>     | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD | 12                  | Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan | Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan | 1. Melaksanakan pemantauan langsung di lapangan secara rutin/berkala<br>2. Desk validasi data pelaporan                                                                                                                    | Asisten Ekonomi Pembangunan | 2026                             |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi        | Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku                                                               | 12                  | Perubahan regulasi belum tersosialisasi                                                                   | Pemberian TPP tidak tepat sasaran                                             | Evaluasi instrumen pemberian TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah. | Asisten Administrasi        | Triwulan III s.d IV              |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada       | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup                     | Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan                                                                         | 12                  | Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat                                                                     | Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan                                    | Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan                                                                                                                                                                        | Asisten Administrasi        | Triwulan I 2026                  |

Renja Setda 2026

| <b>Tujuan/Sasaran Strategis PD</b>                                      | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD</b>                     | <b>Pernyataan Risiko</b>                                                 | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                                   | <b>Dampak</b>                                            | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                                      | <b>Penanggung Jawab</b> | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| hasil                                                                   | Administrasi                                                   |                                                                          |                     |                                                                |                                                          |                                                                                                         |                         |                                  |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Proses pembangunan ZI tidak berjalan                                     | 12                  | Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI       | Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik | Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD                                           | Asisten Administrasi    | Triwulan IV 2026                 |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/pihak lain         | 10                  | Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender      | Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai                 | Dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan-peraturan Pengadaan Barang/Jasa                                | Asisten Administrasi    | TW II 2026                       |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda                              | 12                  | Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid            | Nilai PEKPPP Setda rendah                                | 1. Melaksanakan Konsinyering penyempurnaan instrumen<br>2. Melakukan Evaluasi berkala pada PEKPPP Setda | Asisten Administrasi    | TW III 2026                      |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa | 12                  | Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah. | PAD sewa gedung tidak optimal                            | Menyusun SOP peminjaman dan Pembayaran sewa                                                             | Asisten Administrasi    | Semester I Tahun 2026            |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD                                                     | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD                         | Pernyataan Risiko                                  | Skala Risiko | Sebab                                                                   | Dampak                                        | Rencana Tindak Pengendalian                           | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah | Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama | 12           | Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda | Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal | Melaksanakan konsinyering penyusunan Manajemen risiko | Asisten Administrasi | TW II 2026                |

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Penetapan target dan pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renja PD Setda telah menggunakan pendekatan *money follow program* dan Tematik, Holistic, Integratif dan Spasial (THIS). Perencanaan dan penganggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Renstra Setda 2025-2029 untuk mendukung tujuan dan sasaran Setda tahun 2026.

Adapun kerangka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berikut dengan target dan pagu indikatif rencana pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

| Program                     | Indikator Program                                                   | Kegiatan                                                 | Indikator Kegiatan                                           | Sub Kegiatan                                  | Indikator Sub Kegiatan                                             | Satuan     | Target |       | Anggaran      |               | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    |            |        |       | 2026          | 2027          |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    |            | 2026   | 2027  | Rp            | Rp            |                                |                            |
| 1                           | 2                                                                   | 3                                                        | 4                                                            | 5                                             | 6                                                                  | 7          | 8      | 9     | 10            | 11            | 12                             | 13                         |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    |            |        |       | 2.056.666.000 | 2.116.618.000 | Biro Organisasi                |                            |
|                             | Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB      |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    | %          | 71,42  | 74,28 | 120.398.000   | 155.860.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                              |                                               |                                                                    |            |        |       | 120.398.000   | 155.860.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota        |                                               |                                                                    | Dokumen    | 2      | 2     | 120.398.000   | 155.860.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     |                                                                    |            |        |       | 120.398.000   | 155.860.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota | Dokumen    | 4      | 4     | 120.398.000   | 155.860.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                             | Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A            |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    | %          | 59,52  | 66,66 | 145.202.000   | 155.000.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                              |                                               |                                                                    |            |        |       | 145.202.000   | 155.000.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD             |                                               |                                                                    | Dokumen    | 2      | 2     | 145.202.000   | 155.000.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi     |                                                                    |            |        |       | 145.202.000   | 155.000.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi               | Dokumen    | 4      | 4     | 145.202.000   | 155.000.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                             | Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat            |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    | %          | 71,43  | 70    | 214.847.000   | 300.150.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                              |                                               |                                                                    |            |        |       | 214.847.000   | 300.150.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya           |                                               |                                                                    | Dokumen    | 2      | 2     | 214.847.000   | 300.150.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja |                                                                    |            |        |       | 214.847.000   | 300.150.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Dokumen    | 2      | 2     | 120.000.000   | 175.000.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                             |                                                                     |                                                          |                                                              |                                               | Jumlah unit kerja yang difasilitasi pembangunan zona integritasnya | Unit Kerja | 15     | 15    | 94.847.000    | 125.150.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                             | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan |                                                          |                                                              |                                               |                                                                    | %          | 93     | 94    | 217.896.000   | 336.140.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                              |                                               |                                                                    |            |        |       | 217.896.000   | 336.140.000   |                                |                            |
|                             |                                                                     |                                                          | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan |                                               |                                                                    | Dokumen    | 2      | 2     | 217.896.000   | 336.140.000   |                                |                            |

| Program | Indikator Program                                                                                     | Kegiatan                                                 | Indikator Kegiatan                                                                                 | Sub Kegiatan                                   | Indikator Sub Kegiatan                                                                        | Satuan  | Target |       | Anggaran    |             | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    |                                                |                                                                                               |         |        |       | 2026        | 2027        |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    |                                                |                                                                                               |         | 2026   | 2027  | Rp          | Rp          |                             |                            |
| 1       | 2                                                                                                     | 3                                                        | 4                                                                                                  | 5                                              | 6                                                                                             | 7       | 8      | 9     | 10          | 11          | 12                          | 13                         |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan           |                                                                                               |         |        |       | 217.896.000 | 336.140.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                    | Dokumen | 4      | 4     | 217.896.000 | 336.140.000 |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP ( Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas |                                                          |                                                                                                    |                                                |                                                                                               | %       | 39,21  | 45,75 | 850.208.000 | 329.316.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja |                                                                                                    |                                                |                                                                                               |         |        |       | 850.208.000 | 329.316.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik                                                           |                                                |                                                                                               | Dokumen | 2      | 2     | 850.208.000 | 329.316.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik        |                                                                                               |         |        |       | 850.208.000 | 329.316.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                  | Dokumen | 4      | 4     | 850.208.000 | 329.316.000 |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya                                |                                                          |                                                                                                    |                                                |                                                                                               | %       | 91,43  | 91,43 | 144.920.000 | 290.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                                                                                    |                                                |                                                                                               |         |        |       | 144.920.000 | 290.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota |                                                |                                                                                               | Dokumen | 1      | 1     | 144.920.000 | 290.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota |                                                                                               |         |        |       | 144.920.000 | 290.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                           | Dokumen | 4      | 4     | 144.920.000 | 290.000.000 |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif            |                                                          |                                                                                                    |                                                |                                                                                               | %       | 92     | 92    | 164.094.000 | 227.800.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                                                                                    |                                                |                                                                                               |         |        |       | 164.094.000 | 227.800.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota        |                                                |                                                                                               | Dokumen | 1      | 1     | 164.094.000 | 227.800.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    | Penataan Analisis Jabatan                      |                                                                                               |         |        |       | 164.094.000 | 227.800.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       |                                                          |                                                                                                    |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan | Dokumen | 4      | 4     | 164.094.000 | 227.800.000 |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi                  |                                                          |                                                                                                    |                                                |                                                                                               | %       | 71     | 72    | 199.101.000 | 322.352.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                       | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan              |                                                                                                    |                                                |                                                                                               |         |        |       | 199.101.000 | 322.352.000 |                             |                            |

| Program                                                          | Indikator Program                                         | Kegiatan                                        | Indikator Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                            | Indikator Sub Kegiatan                                                 | Satuan  | Target    |           | Anggaran             |                      | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah    | Lokasi                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         |                                                                        |         |           |           | 2026                 | 2027                 |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         |                                                                        |         | 2026      | 2027      | Rp                   | Rp                   |                                   |                            |
| 1                                                                | 2                                                         | 3                                               | 4                                                                                              | 5                                                       | 6                                                                      | 7       | 8         | 9         | 10                   | 11                   | 12                                | 13                         |
|                                                                  |                                                           |                                                 | Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi |                                                         |                                                                        | Dokumen | 2         | 2         | 199.101.000          | 322.352.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                |                                                                        |         |           |           | 199.101.000          | 322.352.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi          | Dokumen | 2         | 2         | 189.071.000          | 200.000.000          |                                   | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         | Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi      | Laporan | 2         | 2         | 10.030.000           | 122.352.000          |                                   | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         |                                                                        |         |           |           | <b>1.781.081.000</b> | <b>2.562.950.000</b> | <b>Biro Pengadaan Barang/Jasa</b> |                            |
|                                                                  | <b>Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik</b> |                                                 |                                                                                                |                                                         |                                                                        | %       | <b>85</b> | <b>86</b> | <b>475.139.000</b>   | <b>654.350.000</b>   |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik |                                                                                                |                                                         |                                                                        |         |           |           | 475.139.000          | 654.350.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa                     |                                                         |                                                                        | Dokumen | 4         | 4         | 475.139.000          | 654.350.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik          |                                                                        |         |           |           | 130.282.000          | 223.300.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik          | Laporan | 4         | 4         | 130.282.000          | 223.300.000          |                                   | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                        |         |           |           | 300.374.000          | 280.700.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan | 4         | 4         | 300.374.000          | 280.700.000          |                                   | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         |                                                                        |         |           |           | 44.483.000           | 150.350.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa         | Laporan | 4         | 4         | 44.483.000           | 150.350.000          |                                   | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                                  | <b>Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa</b>        |                                                 |                                                                                                |                                                         |                                                                        | %       | <b>92</b> | <b>93</b> | <b>839.176.000</b>   | <b>1.226.300.000</b> |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa           |                                                                                                |                                                         |                                                                        |         |           |           | 839.176.000          | 1.226.300.000        |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                                      |                                                         |                                                                        | Dokumen | 4         | 4         | 529.326.000          | 920.900.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                   |                                                                        |         |           |           | 312.326.000          | 550.000.000          |                                   |                            |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                |                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa             | Laporan | 12        | 12        | 312.326.000          | 550.000.000          |                                   | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                                                  |                                                           |                                                 |                                                                                                | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa       |                                                                        |         |           |           | 217.000.000          | 370.900.000          |                                   |                            |

| Program                              | Indikator Program                                                             | Kegiatan                                         | Indikator Kegiatan                                                   | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                         | Satuan  | Target |      | Anggaran      |               | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               |                                                                                                                |         |        |      | 2026          | 2027          |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               |                                                                                                                |         | 2026   | 2027 | Rp            | Rp            |                             |                            |
| 1                                    | 2                                                                             | 3                                                | 4                                                                    | 5                                                                             | 6                                                                                                              | 7       | 8      | 9    | 10            | 11            | 12                          | 13                         |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | Laporan | 4      | 4    | 137.000.000   | 210.300.000   |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal                                                                     | Laporan | 4      | 4    | 80.000.000    | 160.600.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  | Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif        |                                                                               |                                                                                                                | %       | 75     | 75   | 309.850.000   | 305.400.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                |                                                                                                                |         |        |      | 309.850.000   | 305.400.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                                                        | Laporan | 4      | 4    | 165.118.000   | 220.000.000   |                             | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Laporan Penyusunan SHB                                                                                  | Laporan | 2      | 2    | 144.732.000   | 85.400.000    |                             | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                      | Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ |                                                  |                                                                      |                                                                               |                                                                                                                | %       | 83     | 85   | 466.766.000   | 682.300.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                      |                                                                               |                                                                                                                |         |        |      | 466.766.000   | 682.300.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  | Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa |                                                                               |                                                                                                                | Dokumen | 4      | 4    | 466.766.000   | 682.300.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       |                                                                                                                |         |        |      | 130.063.000   | 142.300.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                            | Orang   | 8      | 8    | 130.063.000   | 142.300.000   |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               |                                                                                                                |         |        |      | 86.703.000    | 215.000.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | Dokumen | 4      | 4    | 86.703.000    | 215.000.000   |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |                                                                                                                |         |        |      | 250.000.000   | 325.000.000   |                             |                            |
|                                      |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen | 4      | 4    | 250.000.000   | 325.000.000   |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |                                                                               |                                                  |                                                                      |                                                                               |                                                                                                                |         |        |      | 4.640.000.000 | 5.520.000.000 |                             |                            |
|                                      | Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral          |                                                  |                                                                      |                                                                               |                                                                                                                | %       | 85     | 85   | 206.218.000   | 465.000.000   | Biro Perekonomian           |                            |

| Program | Indikator Program                                                                       | Kegiatan                                              | Indikator Kegiatan                                              | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                  | Satuan  | Target |      | Anggaran      |             | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|-------------|--------------------------------|--------|
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         |         |        |      | 2026          | 2027        |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         |         | 2026   | 2027 | Rp            | Rp          |                                |        |
| 1       | 2                                                                                       | 3                                                     | 4                                                               | 5                                                                                             | 6                                                                                                       | 7       | 8      | 9    | 10            | 11          | 12                             | 13     |
|         |                                                                                         | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         |         |        |      | 206.218.000   | 465.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       | Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral         |                                                                                               |                                                                                                         | Dokumen | 2      | 2    | 206.218.000   | 465.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                |                                                                                                         |         |        |      | 206.218.000   | 465.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                     | Dokumen | 4      | 4    | 206.218.000   | 465.000.000 |                                |        |
|         | Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup                              |                                                       |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         | %       | 85     | 85   | 175.870.000   | 430.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         |         |        |      | 175.870.000   | 430.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       | Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup                   |                                                                                               |                                                                                                         | Dokumen | 2      | 2    | 175.870.000   | 430.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             |                                                                                                         |         |        |      | 175.870.000   | 430.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup  | Dokumen | 4      | 4    | 175.870.000   | 430.000.000 |                                |        |
|         | Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                       |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         | %       | 87     | 87   | 1.462.912.000 | 955.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                         |         |        |      | 1.462.912.000 | 955.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       | Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                               |                                                                                                         | Dokumen | 2      | 2    | 106.133.000   | 300.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                         |         |        |      | 106.133.000   | 300.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Dokumen | 4      | 4    | 106.133.000   | 300.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       | Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan                             |                                                                                               |                                                                                                         | Dokumen | 2      | 2    | 125.000.000   | 315.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                         |         |        |      | 125.000.000   | 315.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pangan                             | Dokumen | 4      | 4    | 125.000.000   | 315.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       | Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian                          |                                                                                               |                                                                                                         | Dokumen | 2      | 2    | 1.231.779.000 | 340.000.000 |                                |        |
|         |                                                                                         |                                                       |                                                                 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                         |         |        |      | 1.231.779.000 | 340.000.000 |                                |        |

| Program | Indikator Program                                                                                                                       | Kegiatan                                           | Indikator Kegiatan                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Sub Kegiatan                                                                                               | Satuan  | Target |       | Anggaran      |               | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      |         |        |       | 2026          | 2027          |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      |         | 2026   | 2027  | Rp            | Rp            |                             |                            |
| 1       | 2                                                                                                                                       | 3                                                  | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                    | 7       | 8      | 9     | 10            | 11            | 12                          | 13                         |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan   | Dokumen | 4      | 4     | 231.779.000   | 340.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   | Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)                                              | Laporan | 2      | 2     | 1.000.000.000 | -             |                             |                            |
|         | Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      | %       | 85     | 85    | 600.000.000   | 1.000.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian  |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      |         |        |       | 600.000.000   | 1.000.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |                                                                                                   |                                                                                                                      | Dokumen | 4      | 4     | 600.000.000   | 1.000.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                    |                                                                                                                      |         |        |       | 600.000.000   | 1.000.000.000 |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Dokumen | 4      | 4     | 400.000.000   | 475.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                             | Dokumen | 4      | 4     | 200.000.000   | 525.000.000   |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan                                                    |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      | %       | 80     | 80    | 215.000.000   | 485.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian  |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      |         |        |       | 215.000.000   | 485.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                      | Dokumen | 4      | 4     | 215.000.000   | 485.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                    |                                                                                                                      |         |        |       | 215.000.000   | 485.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                             | Dokumen | 4      | 4     | 215.000.000   | 485.000.000   |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      | %       | 55     | 55,25 | 355.000.000   | 430.000.000   | Biro BUMD dan BLUD          |                            |
|         |                                                                                                                                         | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                      |         |        |       | 355.000.000   | 430.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                      | Dokumen | 2      | 2     | 180.000.000   | 215.000.000   |                             |                            |
|         |                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                    | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah |                                                                                                                      |         |        |       | 180.000.000   | 215.000.000   |                             |                            |

| Program | Indikator Program                                     | Kegiatan                                           | Indikator Kegiatan                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                | Satuan  | Target |      | Anggaran    |             | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|--------|
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |        |      | 2026        | 2027        |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         | 2026   | 2027 | Rp          | Rp          |                                |        |
| 1       | 2                                                     | 3                                                  | 4                                                                                              | 5                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                     | 7       | 8      | 9    | 10          | 11          | 12                             | 13     |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Dokumen | 2      | 2    | 180.000.000 | 215.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD                                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Dokumen | 2      | 2    | 175.000.000 | 215.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                  |                                                                                                                                                       |         |        |      | 175.000.000 | 215.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD                                                                   | Dokumen | 2      | 2    | 175.000.000 | 215.000.000 |                                |        |
|         | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | %       | 2,3    | 2,5  | 750.000.000 | 840.000.000 |                                |        |
|         |                                                       | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |        |      | 750.000.000 | 840.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Dokumen | 4      | 4    | 750.000.000 | 840.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi |                                                                                                                                                       |         |        |      | 750.000.000 | 840.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Non Keuangan                                                            | Dokumen | 4      | 4    | 400.000.000 | 420.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Dokumen | 4      | 4    | 350.000.000 | 420.000.000 |                                |        |
|         | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan    |                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | %       | 1,95   | 2    | 875.000.000 | 915.000.000 |                                |        |
|         |                                                       | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD |                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |         |        |      | 875.000.000 | 915.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | Dokumen | 4      | 4    | 875.000.000 | 915.000.000 |                                |        |
|         |                                                       |                                                    |                                                                                                | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |                                                                                                                                                       |         |        |      | 875.000.000 | 915.000.000 |                                |        |

| Program                                           | Indikator Program                                     | Kegiatan                                                 | Indikator Kegiatan                                                              | Sub Kegiatan                                              | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                               | Satuan  | Target    |           | Anggaran             |                      | Unit Kerja Perangkat Daerah        | Lokasi                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      |         |           |           | 2026                 | 2027                 |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      |         | 2026      | 2027      | Rp                   | Rp                   |                                    |                            |
| 1                                                 | 2                                                     | 3                                                        | 4                                                                               | 5                                                         | 6                                                                                                                                                    | 7       | 8         | 9         | 10                   | 11                   | 12                                 | 13                         |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan                                                          | Dokumen | 4         |           | 400.000.000          | 425.000.000          |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Dokumen | 4         |           | 475.000.000          | 490.000.000          |                                    |                            |
| <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b> |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      |         |           |           | <b>1.755.000.000</b> | <b>3.325.000.000</b> | <b>Biro Adm Pembangunan Daerah</b> |                            |
|                                                   | <b>Persentase realisasi bantuan keuangan</b>          |                                                          |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      | %       | <b>86</b> | <b>87</b> | <b>740.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b> |                                    |                            |
|                                                   |                                                       | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      |         |           |           | 740.000.000          | 1.000.000.000        |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah |                                                           |                                                                                                                                                      | Dokumen | 4         | 4         | 740.000.000          | 1.000.000.000        |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah |                                                                                                                                                      |         |           |           | 740.000.000          | 1.000.000.000        |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                                                       | Laporan | 4         | 4         | 370.000.000          | 500.000.000          |                                    | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II                                                                    | Laporan | 4         | 4         | 370.000.000          | 500.000.000          |                                    | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                   | <b>Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN</b> |                                                          |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      | %       | <b>90</b> | <b>91</b> | <b>625.000.000</b>   | <b>1.525.000.000</b> |                                    |                            |
|                                                   |                                                       | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                      |         |           |           | 625.000.000          | 1.525.000.000        |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah  |                                                           |                                                                                                                                                      | Dokumen | 4         | 4         | 625.000.000          | 1.525.000.000        |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD    |                                                                                                                                                      |         |           |           | 575.000.000          | 1.325.000.000        |                                    |                            |
|                                                   |                                                       |                                                          |                                                                                 |                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD                                 | Laporan | 12        | 12        | 75.000.000           | 200.000.000          |                                    |                            |

| Program | Indikator Program                                                          | Kegiatan                                 | Indikator Kegiatan                                               | Sub Kegiatan                                             | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                       | Satuan  | Target |      | Anggaran    |             | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |         |        |      | 2026        | 2027        |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |         | 2026   | 2027 | Rp          | Rp          |                                |                               |
| 1       | 2                                                                          | 3                                        | 4                                                                | 5                                                        | 6                                                                                                                                            | 7       | 8      | 9    | 10          | 11          | 12                             | 13                            |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD | Laporan | 12     | 12   | 225.000.000 | 475.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD                  | Laporan | 12     | 12   | 125.000.000 | 250.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan                                                     | Laporan | 4      | 4    | 150.000.000 | 400.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN   |                                                                                                                                              |         |        |      | 50.000.000  | 200.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                  | Laporan | 4      | 4    | 50.000.000  | 200.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan |                                          |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              | %       | 100    | 100  | 195.000.000 | 500.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |         |        |      | 195.000.000 | 500.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah           |                                                          |                                                                                                                                              | Dokumen | 1      | 1    | 195.000.000 | 500.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                 |                                                                                                                                              |         |        |      | 95.000.000  | 325.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                          | Laporan | 4      | 4    | 95.000.000  | 325.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah |                                                                                                                                              |         |        |      | 100.000.000 | 175.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                | Dokumen | 2      | 2    | 100.000.000 | 175.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah                   |                                          |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              | %       | 86,5   | 87   | 195.000.000 | 300.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                              |         |        |      | 195.000.000 | 300.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah |                                                          |                                                                                                                                              | Dokumen | 4      |      | 195.000.000 | 300.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah              |                                                                                                                                              |         |        |      | 195.000.000 | 300.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                            |                                          |                                                                  |                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan                                                             | Dokumen | 4      |      | 195.000.000 | 300.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |

| Program                                 | Indikator Program                                                                                                  | Kegiatan                       | Indikator Kegiatan                                                                  | Sub Kegiatan                                    | Indikator Sub Kegiatan                                              | Satuan  | Target |      | Anggaran      |               | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah                | Lokasi                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 |                                                                     |         | 2026   | 2027 | 2026          | 2027          |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 |                                                                     |         |        |      | Rp            | Rp            |                                               |                            |
| 1                                       | 2                                                                                                                  | 3                              | 4                                                                                   | 5                                               | 6                                                                   | 7       | 8      | 9    | 10            | 11            | 12                                            | 13                         |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 |                                                                     |         |        |      | 2.919.557.000 |               | Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama |                            |
|                                         | Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti                                                  |                                |                                                                                     |                                                 |                                                                     | %       | 100    | 100  | 1.686.294.000 | 1.450.000.000 |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    | Fasilitasi Kerja Sama Daerah   |                                                                                     |                                                 |                                                                     |         |        |      | 1.686.294.000 | 1.450.000.000 |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti                   |                                                 |                                                                     | %       | 100    | 100  | 1.214.294.000 | 700.000.000   |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah          |                                                                     |         |        |      | 1.214.294.000 | 700.000.000   |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                | Dokumen | 8      | 9    | 524.294.000   | 450.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri                | Dokumen | 4      | 4    | 690.000.000   | 250.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         |                                                                                                                    |                                | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti    |                                                 |                                                                     | %       | 100    | 100  | 347.000.000   | 300.000.000   |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta        |                                                                     |         |        |      | 347.000.000   | 300.000.000   |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi              | Dokumen | 4      | 4    | 75.000.000    | 150.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri | Dokumen | 4      | 4    | 272.000.000   | 150.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         |                                                                                                                    |                                | Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah                                    |                                                 |                                                                     | %       | 95     | 95   | 125.000.000   | 450.000.000   |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                 |                                                                     |         |        |      | 125.000.000   | 450.000.000   |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi                       | Laporan | 4      | 4    | 40.000.000    | 150.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                   | Laporan | 4      | 4    | 60.000.000    | 150.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     |                                                 | Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri                   | %       | 100    | 100  | 25.000.000    | 150.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                                         | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti |                                |                                                                                     |                                                 |                                                                     | %       | 100    | 100  | 675.000.000   | 1.040.000.000 |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan |                                                                                     |                                                 |                                                                     |         |        |      | 675.000.000   | 1.040.000.000 |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ |                                                 |                                                                     | Dokumen | 8      | 8    | 675.000.000   | 1.040.000.000 |                                               |                            |
|                                         |                                                                                                                    |                                |                                                                                     | Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan |                                                                     |         |        |      | 480.000.000   | 550.000.000   |                                               |                            |

| Program                      | Indikator Program                                                              | Kegiatan                                                     | Indikator Kegiatan                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Sub Kegiatan                                                          | Satuan  | Target |      | Anggaran        |                 | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah                | Lokasi                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |         |        |      | 2026            | 2027            |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |         | 2026   | 2027 | Rp              | Rp              |                                               |                            |
| 1                            | 2                                                                              | 3                                                            | 4                                                                      | 5                                                                                                                   | 6                                                                               | 7       | 8      | 9    | 10              | 11              | 12                                            | 13                         |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan            | Dokumen | 4      | 4    | 480.000.000     | 550.000.000     |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                                                                            |                                                                                 |         |        |      | 90.000.000      | 220.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum                   | Dokumen | 4      | 4    | 90.000.000      | 220.000.000     |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                                                         |                                                                                 |         |        |      | 105.000.000     | 270.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah                                | Dokumen | 4      | 4    | 105.000.000     | 270.000.000     |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                              | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                      |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 | %       | 100    | 100  | 558.263.000     | 900.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                   |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |         |        |      | 558.263.000     | 900.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM             |                                                                                                                     |                                                                                 | Dokumen | 3      | 3    | 80.000.000      | 210.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan                                                                            |                                                                                 |         |        |      | 80.000.000      | 210.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan | Dokumen | 4      | 4    | 80.000.000      | 210.000.000     |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                              |                                                                                |                                                              | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD                             |                                                                                                                     |                                                                                 | %       | 100    | 100  | 100.000.000     | 240.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD                                                                      |                                                                                 |         |        |      | 100.000.000     | 240.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD             | Dokumen | 7      | 9    | 100.000.000     | 240.000.000     |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|                              |                                                                                |                                                              | Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan |                                                                                                                     |                                                                                 | %       | 100    | 100  | 378.263.000     | 450.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                           |                                                                                 |         |        |      | 378.263.000     | 450.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                  | Laporan | 37     | 37   | 378.263.000     | 450.000.000     |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
| PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT |                                                                                |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |         |        |      | 422.418.757.000 | 334.905.700.000 | Biro Kesejahteraan dan Pemgentasan Kemiskinan |                            |
|                              | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar |                                                              |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 | %       | 85     | 86   | 600.000.000     | 825.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar |                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                 |         |        |      | 600.000.000     | 825.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar                    |                                                                                                                     |                                                                                 | Dokumen | 4      | 4    | 600.000.000     | 825.000.000     |                                               |                            |
|                              |                                                                                |                                                              |                                                                        | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan |                                                                                 |         |        |      | 200.000.000     | 275.000.000     |                                               |                            |

| Program | Indikator Program                                                                  | Kegiatan                                                         | Indikator Kegiatan                                      | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Satuan  | Target |      | Anggaran    |               | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |        |      | 2026        | 2027          |                                |                               |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         | 2026   | 2027 | Rp          | Rp            |                                |                               |
| 1       | 2                                                                                  | 3                                                                | 4                                                       | 5                                                                                                                     | 6                                                                                                                                                            | 7       | 8      | 9    | 10          | 11            | 12                             | 13                            |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                    | Dokumen | 4      | 4    | 200.000.000 | 275.000.000   |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |                                                                                                                                                              |         |        |      | 200.000.000 | 275.000.000   |                                |                               |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                     | Dokumen | 4      | 4    | 160.000.000 | 185.000.000   |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB  | Dokumen | 4      | 4    | 40.000.000  | 90.000.000    |                                |                               |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial    |                                                                                                                                                              |         |        |      | 200.000.000 | 275.000.000   |                                |                               |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                        | Dokumen | 4      | 4    | 157.043.000 | 185.000.000   |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi | Dokumen | 4      | 4    | 42.957.000  | 90.000.000    |                                |                               |
|         | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar |                                                                  |                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | %       | 85     | 86   | 650.000.000 | 1.725.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                    | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar |                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |         |        |      | 650.000.000 | 1.725.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                    |                                                                  | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar |                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Dokumen | 4      | 4    | 650.000.000 | 1.725.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                    |                                                                  |                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata    |                                                                                                                                                              |         |        |      | 200.000.000 | 275.000.000   |                                |                               |

| Program | Indikator Program                                 | Kegiatan                              | Indikator Kegiatan                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | Satuan  | Target |      | Anggaran        |                 | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 2026   | 2027 | 2026            | 2027            |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      | Rp              | Rp              |                                |                            |
| 1       | 2                                                 | 3                                     | 4                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7       | 8      | 9    | 10              | 11              | 12                             | 13                         |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata                                                                                                                                                            | Dokumen | 4      | 4    | 200.000.000     | 275.000.000     |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                   |                                       |                                                                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      | 450.000.000     | 1.450.000.000   |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Dokumen | 4      | 4    | 200.000.000     | 450.000.000     |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                  | Dokumen | 4      | 4    | 250.000.000     | 1.000.000.000   |                                |                            |
|         | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 63     | 64   | 421.168.757.000 | 332.355.700.000 |                                |                            |
|         |                                                   | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      | 421.168.757.000 | 332.355.700.000 |                                |                            |
|         |                                                   |                                       | Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 100    | 100  | 3.061.700.000   | 3.905.700.000   |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      | 3.061.700.000   | 3.905.700.000   |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen | 1      | 1    | 1.206.000.000   | 2.150.000.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Lembaga | 4      | 4    | 1.855.700.000   | 1.755.700.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                   |                                       | Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %       | 85     | 85   | 418.107.057.000 | 328.450.000.000 |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |      | 418.107.057.000 | 328.450.000.000 |                                |                            |
|         |                                                   |                                       |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan                                                                                                                                                                                                                                                 | Dokumen | 2      | 2    | 250.000.000     | 450.000.000     |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Program                                        | Indikator Program                         | Kegiatan                                 | Indikator Kegiatan                                                                                                     | Sub Kegiatan                                           | Indikator Sub Kegiatan                                   | Satuan       | Target     |             | Anggaran             |                      | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        |                                                          |              |            |             | 2026                 | 2027                 |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        |                                                          |              | 2026       | 2027        | Rp                   | Rp                   |                                |                            |
| 1                                              | 2                                         | 3                                        | 4                                                                                                                      | 5                                                      | 6                                                        | 7            | 8          | 9           | 10                   | 11                   | 12                             | 13                         |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola      | Unit         | 900        | 2500        | 417.857.057.000      | 328.000.000.000      |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
| <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b> |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        |                                                          |              |            |             | <b>2.856.000.000</b> | <b>2.955.302.000</b> | <b>Biro Hukum</b>              |                            |
|                                                | <b>Capaian Pemberian Bantuan Hukum</b>    |                                          |                                                                                                                        |                                                        |                                                          | %            | <b>100</b> | <b>100</b>  | <b>1.321.326.000</b> | <b>1.058.616.000</b> |                                |                            |
|                                                |                                           | Fasilitasi Bantuan Hukum                 |                                                                                                                        |                                                        |                                                          |              |            |             | 1.321.326.000        | 1.058.616.000        |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          | Persentase bantuan hukum yang tertangani                                                                               |                                                        |                                                          | %            | 100        | 100         | 1.321.326.000        | 1.058.616.000        |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                  |                                                          |              |            |             | 1.321.326.000        | 1.058.616.000        |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                   | Kasus        | 12         | 12          | 301.326.000          | 386.802.000          |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        | Jumlah Pemberian Bantuan Hukum                           | Kasus        | 340        | 340         | 1.020.000.000        | 671.814.000          |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                | <b>Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</b> |                                          |                                                                                                                        |                                                        |                                                          | <b>Angka</b> | <b>86</b>  | <b>87</b>   | <b>151.540.000</b>   | <b>193.401.000</b>   |                                |                            |
|                                                |                                           | Fasilitasi Bantuan Hukum                 |                                                                                                                        |                                                        |                                                          |              |            |             | 151.540.000          | 193.401.000          |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          | Persentase Fasilitasi HAM Daerah                                                                                       |                                                        |                                                          | %            | 100        | 100         | 58.199.000           | 98.397.000           |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM   |                                                          |              |            |             | 58.199.000           | 98.397.000           |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        | Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah                | Laporan      | 4          | 4           | 58.199.000           | 98.397.000           |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                |                                           |                                          | Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani                                                                  |                                                        |                                                          | %            | 85         | 85          | 93.341.000           | 95.004.000           |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM   |                                                          |              |            |             | 93.341.000           | 95.004.000           |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan    | Kasus        | 20         | 20          | 93.341.000           | 95.004.000           |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                | <b>Indeks Reformasi Hukum</b>             |                                          |                                                                                                                        |                                                        |                                                          | <b>Angka</b> | <b>92</b>  | <b>92,5</b> | <b>866.821.000</b>   | <b>1.065.401.000</b> |                                |                            |
|                                                |                                           | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan |                                                                                                                        |                                                        |                                                          |              |            |             | 866.821.000          | 1.065.401.000        |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          | Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan                            |                                                        |                                                          | %            | 30         | 35          | 169.967.000          | 179.829.000          |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya |                                                          |              |            |             | 169.967.000          | 179.829.000          |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        |                                                        | Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi | Dokumen      | 13         | 14          | 169.967.000          | 179.829.000          |                                | OPD Provinsi               |
|                                                |                                           |                                          | Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum |                                                        |                                                          | %            | 91         | 92          | 175.530.000          | 220.545.000          |                                |                            |
|                                                |                                           |                                          |                                                                                                                        | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya |                                                          |              |            |             | 175.530.000          | 220.545.000          |                                |                            |

| Program                                               | Indikator Program                                                                                                | Kegiatan                                 | Indikator Kegiatan                                                                                        | Sub Kegiatan                                        | Indikator Sub Kegiatan                                                          | Satuan  | Target |      | Anggaran        |                 | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 |         |        |      | 2026            | 2027            |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 |         | 2026   | 2027 | Rp              | Rp              |                                |                               |
| 1                                                     | 2                                                                                                                | 3                                        | 4                                                                                                         | 5                                                   | 6                                                                               | 7       | 8      | 9    | 10              | 11              | 12                             | 13                            |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya                | Dokumen | 350    | 400  | 175.530.000     | 220.545.000     |                                | OPD Provinsi                  |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          | Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan  |                                                     |                                                                                 | %       | 91     | 92   | 64.361.000      | 82.110.000      |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan        |                                                                                 |         |        |      | 64.361.000      | 82.110.000      |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                      | Dokumen | 250    | 300  | 64.361.000      | 82.110.000      |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          | Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan |                                                     |                                                                                 | %       | 89,5   | 90   | 456.963.000     | 582.917.000     |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan       |                                                                                 |         |        |      | 456.963.000     | 582.917.000     |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                     | Dokumen | 40     | 45   | 456.963.000     | 582.917.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|                                                       | Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota                                                    |                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 | %       | 96     | 97   | 516.313.000     | 637.884.000     |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 |         |        |      | 516.313.000     | 637.884.000     |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          | Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji                                              |                                                     |                                                                                 | %       | 96     | 97   | 516.313.000     | 637.884.000     |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota |                                                                                 |         |        |      | 516.313.000     | 637.884.000     |                                |                               |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi             | Dokumen | 125    | 130  | 162.480.000     | 203.580.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II  | Dokumen | 130    | 135  | 179.093.000     | 217.152.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|                                                       |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III | Dokumen | 130    | 135  | 174.740.000     | 217.152.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                                  |                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 |         |        |      | 275.546.004.000 | 280.130.905.000 | Setda Provinsi Jawa Tengah     |                               |
|                                                       | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda |                                          |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 | %       | 100    | 100  | 228.284.149.000 | 237.635.913.000 | Biro Umum                      |                               |
|                                                       |                                                                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                                                                                                           |                                                     |                                                                                 |         |        |      | 103.449.553.000 | 126.186.917.000 |                                |                               |

| Program | Indikator Program | Kegiatan                                                   | Indikator Kegiatan                                                                          | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                                                           | Satuan      | Target |      | Anggaran        |                 | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                  |             |        |      | 2026            | 2027            |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                  |             | 2026   | 2027 | Rp              | Rp              |                                |                               |
| 1       | 2                 | 3                                                          | 4                                                                                           | 5                                                                             | 6                                                                                                                                                | 7           | 8      | 9    | 10              | 11              | 12                             | 13                            |
|         |                   |                                                            | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun                    |                                                                               |                                                                                                                                                  | Dokumen     | 12     | 12   | 103.449.553.000 | 126.186.917.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |                                                                                                                                                  |             |        |      | 100.824.553.000 | 123.354.417.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | Orang/Bulan | 12     | 12   | 100.824.553.000 | 123.354.417.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 |                                                                                                                                                  |             |        |      | 2.000.000.000   | 2.200.000.000   |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                               | Dokumen     | 12     | 12   | 2.000.000.000   | 2.200.000.000   |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              |                                                                                                                                                  |             |        |      | 475.000.000     | 495.000.000     |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                              | Dokumen     | 12     | 12   | 475.000.000     | 495.000.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                                                                                  |             |        |      | 150.000.000     | 137.500.000     |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan     | 12     | 12   | 150.000.000     | 137.500.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                  |             |        |      | 1.250.000.000   | 880.000.000     |                                |                               |
|         |                   |                                                            | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah                 |                                                                               |                                                                                                                                                  | Dokumen     | 12     | 12   | 1.250.000.000   | 880.000.000     |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           |                                                                                                                                                  |             |        |      | 750.000.000     | 550.000.000     |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                               | Dokumen     | 12     | 12   | 750.000.000     | 550.000.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   |                                                                                                                                                  |             |        |      | 500.000.000     | 330.000.000     |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | Laporan     | 12     | 12   | 500.000.000     | 330.000.000     |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                  |             |        |      | 50.000.000      | 55.000.000      |                                |                               |
|         |                   |                                                            | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah |                                                                               |                                                                                                                                                  | Laporan     | 12     | 12   | 50.000.000      | 55.000.000      |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                        |                                                                                                                                                  |             |        |      | 50.000.000      | 55.000.000      |                                |                               |
|         |                   |                                                            |                                                                                             |                                                                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                      | Laporan     | 12     | 12   | 50.000.000      | 55.000.000      |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |

| Program | Indikator Program | Kegiatan                                                         | Indikator Kegiatan                                                                                          | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Sub Kegiatan                                                             | Satuan  | Target |      | Anggaran       |                | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                    |         |        |      | 2026           | 2027           |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                    |         | 2026   | 2027 | Rp             | Rp             |                                |                               |
| 1       | 2                 | 3                                                                | 4                                                                                                           | 5                                                                | 6                                                                                  | 7       | 8      | 9    | 10             | 11             | 12                             | 13                            |
|         |                   | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                    |         |        |      | 14.325.000.000 | 12.457.500.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                  | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda |                                                                  |                                                                                    | %       | 100    | 100  | 14.325.000.000 | 12.457.500.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |         |        |      | 550.000.000    | 605.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket   | 12     | 12   | 550.000.000    | 605.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |         |        |      | 700.000.000    | 770.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Paket   | 12     | 12   | 700.000.000    | 770.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |         |        |      | 600.000.000    | 660.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Paket   | 12     | 12   | 600.000.000    | 660.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |         |        |      | 175.000.000    | 192.500.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | Paket   | 12     | 12   | 175.000.000    | 192.500.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |         |        |      | 300.000.000    | 330.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        | Paket   | 12     | 12   | 300.000.000    | 330.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |         |        |      | 9.000.000.000  | 6.600.000.000  |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Laporan | 12     | 12   | 9.000.000.000  | 6.600.000.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |         |        |      | 3.000.000.000  | 3.300.000.000  |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan | 12     | 12   | 3.000.000.000  | 3.300.000.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                    |         |        |      | 27.864.338.000 | 16.170.000.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                  | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan                         |                                                                  |                                                                                    | Paket   | 2      |      | 27.864.338.000 | 16.170.000.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |         |        |      | 1.252.500.000  | 770.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                  |                                                                                                             |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | Paket   | 4      | 4    | 1.252.500.000  | 770.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |

| Program | Indikator Program | Kegiatan                                                              | Indikator Kegiatan                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Sub Kegiatan                                                                                 | Satuan  | Target |      | Anggaran       |                | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |        |      | 2026           | 2027           |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                        |         | 2026   | 2027 | Rp             | Rp             |                             |                            |
| 1       | 2                 | 3                                                                     | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                  | 6                                                                                                      | 7       | 8      | 9    | 10             | 11             | 12                          | 13                         |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                                                                                                        |         |        |      | 26.611.838.000 | 15.400.000.000 |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit    | 30     | 40   | 26.611.838.000 | 15.400.000.000 |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |        |      | 39.358.016.000 | 33.909.093.000 |                             |                            |
|         |                   |                                                                       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda |                                                                                                                    |                                                                                                        | Laporan | 12     | 12   | 39.358.016.000 | 33.909.093.000 |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                                                                                                        |         |        |      | 8.000.000.000  | 9.900.000.000  |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Laporan | 12     | 12   | 8.000.000.000  | 9.900.000.000  |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  |                                                                                                        |         |        |      | 1.200.000.000  | 1.320.000.000  |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan | 12     | 12   | 1.200.000.000  | 1.320.000.000  |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                                                                                                        |         |        |      | 30.158.016.000 | 22.689.093.000 |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 12     | 12   | 29.108.516.000 | 22.001.593.000 |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum                                                                   | Laporan | 12     | 12   | 299.500.000    | 137.500.000    |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah                                                       | Laporan | 2      | 2    | 750.000.000    | 550.000.000    |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                        |         |        |      | 15.350.000.000 | 14.960.000.000 |                             |                            |
|         |                   |                                                                       | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan           |                                                                                                                    |                                                                                                        | Unit    | 833    |      | 15.350.000.000 | 14.960.000.000 |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |         |        |      | 400.000.000    | 440.000.000    |                             |                            |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit    | 5      | 5    | 400.000.000    | 440.000.000    |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                       |                                                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                        |         |        |      | 4.000.000.000  | 4.400.000.000  |                             |                            |

| Program | Indikator Program | Kegiatan                                                                    | Indikator Kegiatan                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Sub Kegiatan                                                                                 | Satuan      | Target |      | Anggaran       |                | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                        |             |        |      | 2026           | 2027           |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                        |             | 2026   | 2027 | Rp             | Rp             |                                |                               |
| 1       | 2                 | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                  | 6                                                                                                      | 7           | 8      | 9    | 10             | 11             | 12                             | 13                            |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit        | 182    | 182  | 4.000.000.000  | 4.400.000.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                 |                                                                                                        |             |        |      | 100.000.000    | 110.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | Unit        | 30     | 30   | 100.000.000    | 110.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           |                                                                                                        |             |        |      | 2.250.000.000  | 2.200.000.000  |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit        | 300    | 300  | 2.250.000.000  | 2.200.000.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                                                                                                        |             |        |      | 8.000.000.000  | 7.150.000.000  |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit        | 17     | 17   | 8.000.000.000  | 7.150.000.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                        |             |        |      | 600.000.000    | 660.000.000    |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | Unit        | 300    | 300  | 600.000.000    | 660.000.000    |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                        |             |        |      | 26.637.242.000 | 33.017.403.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                             | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda |                                                                                    |                                                                                                        | %           | 100    |      | 26.637.242.000 | 33.017.403.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                                                                                                        |             |        |      | 2.743.094.000  | 3.017.403.000  |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Orang/Bulan | 2      |      | 2.743.094.000  | 3.017.403.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        |                                                                                                        |             |        |      | 23.894.148.000 | 30.000.000.000 |                                |                               |
|         |                   |                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Orang/Bulan | 2      |      | 23.894.148.000 | 30.000.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |

| Program | Indikator Program                                                                              | Kegiatan                                  | Indikator Kegiatan                                                                                          | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Sub Kegiatan                                                                | Satuan  | Target |      | Anggaran       |                | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       |         |        |      | 2026           | 2027           |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       |         | 2026   | 2027 | Rp             | Rp             |                                |                            |
| 1       | 2                                                                                              | 3                                         | 4                                                                                                           | 5                                                                      | 6                                                                                     | 7       | 8      | 9    | 10             | 11             | 12                             | 13                         |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol |                                           |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       | %       | 100    | 100  | 32.173.932.000 | 28.336.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       |         |        |      | 238.000.000    | 110.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol |                                                                        |                                                                                       | %       | 100    | 100  | 238.000.000    | 110.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               |                                                                                       |         |        |      | 68.000.000     | 55.000.000     |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | Dokumen | 12     | 12   | 68.000.000     | 55.000.000     |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                       |         |        |      | 170.000.000    | 55.000.000     |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 4      | 4    | 170.000.000    | 55.000.000     |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       |         |        |      | 28.564.057.000 | 26.070.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol          |                                                                        |                                                                                       | Laporan | 12     | 12   | 28.564.057.000 | 26.070.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                         |                                                                                       |         |        |      | 24.071.431.000 | 22.000.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                   | Laporan | 12     | 12   | 24.071.431.000 | 22.000.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                       |                                                                                       |         |        |      | 4.492.626.000  | 4.070.000.000  |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                       | Laporan | 12     | 12   | 4.492.626.000  | 4.070.000.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                | Fasilitasi Keprotokolan                   |                                                                                                             |                                                                        |                                                                                       |         |        |      | 3.371.875.000  | 2.156.000.000  |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun                                                         |                                                                        |                                                                                       | Laporan | 1      | 1    | 3.371.875.000  | 2.156.000.000  |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                            |                                                                                       |         |        |      | 3.001.846.000  | 1.980.000.000  |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                      | Laporan | 12     | 12   | 3.001.846.000  | 1.980.000.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        |                                                                                       |         |        |      | 300.000.000    | 121.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                |                                           |                                                                                                             |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | Laporan | 12     | 12   | 300.000.000    | 121.000.000    |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Program | Indikator Program                                                                                   | Kegiatan                                                                    | Indikator Kegiatan                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Sub Kegiatan                                                                                   | Satuan  | Target |      | Anggaran       |               | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                          |         |        |      | 2026           | 2027          |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                          |         | 2026   | 2027 | Rp             | Rp            |                                |                            |
| 1       | 2                                                                                                   | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                                    | 5                                                                                      | 6                                                                                                        | 7       | 8      | 9    | 10             | 11            | 12                             | 13                         |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                      |                                                                                                          |         |        |      | 70.029.000     | 55.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                         | Laporan | 1      | 1    | 70.029.000     | 55.000.000    |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                          | %       | 100    | 100  | 10.535.000.000 | 9.472.100.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                          |         |        |      | 150.000.000    | 38.500.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                                                |                                                                                        |                                                                                                          | %       | 100    | 100  | 150.000.000    | 38.500.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                  |                                                                                                          |         |        |      | 150.000.000    | 38.500.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | Dokumen | 12     | 12   | 150.000.000    | 38.500.000    |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                          |         |        |      | 40.000.000     | 44.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                                                 |                                                                                        |                                                                                                          | Laporan | 12     | 12   | 40.000.000     | 44.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         |                                                                                                          |         |        |      | 40.000.000     | 44.000.000    |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | Laporan | 12     | 12   | 40.000.000     | 44.000.000    |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                     | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                          |         |        |      | 460.000.000    | 259.600.000   |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan |                                                                                        |                                                                                                          | %       | 100    | 100  | 460.000.000    | 259.600.000   |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                                                                                                          |         |        |      | 400.000.000    | 193.600.000   |                                |                            |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket   | 8      | 8    | 400.000.000    | 193.600.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                                      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                                                                                                          |         |        |      | 60.000.000     | 66.000.000    |                                |                            |

| Program | Indikator Program                                                     | Kegiatan                                     | Indikator Kegiatan                                                                                                            | Sub Kegiatan                                          | Indikator Sub Kegiatan                                                             | Satuan  | Target |      | Anggaran      |               | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                    |         |        |      | 2026          | 2027          |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                    |         | 2026   | 2027 | Rp            | Rp            |                                |                            |
| 1       | 2                                                                     | 3                                            | 4                                                                                                                             | 5                                                     | 6                                                                                  | 7       | 8      | 9    | 10            | 11            | 12                             | 13                         |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang   | 2      | 2    | 60.000.000    | 66.000.000    |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                       | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                    |         |        |      | 9.385.000.000 | 8.580.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan                                |                                                       |                                                                                    | %       | 100    | 100  | 9.385.000.000 | 8.580.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       |                                                                                    |         |        |      | 4.000.000.000 | 3.850.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                  | Paket   | 12     | 12   | 4.000.000.000 | 3.850.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |                                                                                    |         |        |      | 3.200.000.000 | 2.750.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan            | Paket   | 12     | 12   | 3.200.000.000 | 2.750.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |                                                                                    |         |        |      | 2.185.000.000 | 1.980.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan             | Paket   | 12     | 12   | 1.885.000.000 | 1.650.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan                               | Paket   | 12     | 12   | 300.000.000   | 330.000.000   |                                | OPD Provinsi               |
|         |                                                                       | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan    |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                    |         |        |      | 500.000.000   | 550.000.000   |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                  |                                                       |                                                                                    | Laporan | 12     | 12   | 500.000.000   | 550.000.000   |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               | Penyiapan Materi Pimpinan                             |                                                                                    |         |        |      | 500.000.000   | 550.000.000   |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               |                                                       | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan                                      | Dokumen | 12     | 12   | 500.000.000   | 550.000.000   |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa |                                              |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                    | %       | 100    | 100  | 204.272.000   | 284.420.000   | Biro Pengadaan Barang/Jasa     |                            |
|         |                                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah           |                                                                                                                               |                                                       |                                                                                    |         |        |      | 204.272.000   | 284.420.000   |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa |                                                       |                                                                                    | %       | 100    | 100  | 204.272.000   | 284.420.000   |                                |                            |
|         |                                                                       |                                              |                                                                                                                               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                                                                                    |         |        |      | 180.000.000   | 254.020.000   |                                |                            |

| Program | Indikator Program                                                               | Kegiatan                                  | Indikator Kegiatan                                                                                                              | Sub Kegiatan                                         | Indikator Sub Kegiatan                                                                                             | Satuan  | Target |      | Anggaran    |             | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |         |        |      | 2026        | 2027        |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |         | 2026   | 2027 | Rp          | Rp          |                                |                            |
| 1       | 2                                                                               | 3                                         | 4                                                                                                                               | 5                                                    | 6                                                                                                                  | 7       | 8      | 9    | 10          | 11          | 12                             | 13                         |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | Laporan | 12     | 12   | 180.000.000 | 254.020.000 |                                | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                                                    |         |        |      | 24.272.000  | 30.400.000  |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               | Dokumen | 12     | 12   | 24.272.000  | 30.400.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan |                                           |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    | %       | 100    | 100  | 421.074.000 | 718.000.000 | Biro BUMD dan BLUD             |                            |
|         |                                                                                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |         |        |      | 421.074.000 | 718.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan |                                                      |                                                                                                                    | %       | 100    | 100  | 421.074.000 | 718.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                                                    |         |        |      | 386.283.000 | 655.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan | Laporan | 12     | 12   | 240.000.000 | 375.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | Laporan | 12     | 12   | 146.283.000 | 280.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                                                    |         |        |      | 34.791.000  | 63.000.000  |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan                | Dokumen | 12     | 12   | 10.000.000  | 25.000.000  |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                               | Dokumen | 12     | 12   | 24.791.000  | 38.000.000  |                                |                            |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum                                    |                                           |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    | %       | 100    | 100  | 631.018.000 | 610.966.000 | Biro Hukum                     |                            |
|         |                                                                                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                    |         |        |      | 380.622.000 | 271.440.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum                      |                                                      |                                                                                                                    | %       | 100    | 100  | 380.622.000 | 271.440.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan             |                                                                                                                    |         |        |      | 380.622.000 | 271.440.000 |                                |                            |
|         |                                                                                 |                                           |                                                                                                                                 |                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                               | Orang   | 1000   | 1100 | 380.622.000 | 271.440.000 |                                | OPD Provinsi               |

| Program | Indikator Program                                                                                          | Kegiatan                           | Indikator Kegiatan                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                         | Indikator Sub Kegiatan                                                                                       | Satuan  | Target |      | Anggaran      |               | Unit Kerja Perangkat Daerah                   | Lokasi                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |         |        |      | 2026          | 2027          |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |         | 2026   | 2027 | Rp            | Rp            |                                               |                            |
| 1       | 2                                                                                                          | 3                                  | 4                                                                                                                                                                | 5                                                    | 6                                                                                                            | 7       | 8      | 9    | 10            | 11            | 12                                            | 13                         |
|         |                                                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |         |        |      | 250.396.000   | 339.526.000   |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum                                                                     |                                                      |                                                                                                              | %       | 100    | 100  | 250.396.000   | 169.763.000   |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                                              |         |        |      | 213.686.000   | 169.763.000   |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Laporan | 12     | 12   | 213.686.000   | 169.763.000   |                                               | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                                              |         |        |      | 36.710.000    | 25.587.000    |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                         | Dokumen | 12     | 12   | 36.710.000    | 25.587.000    |                                               | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              | %       | 100    | 100  | 511.956.000   | 1.022.000.000 | Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama |                            |
|         |                                                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |         |        |      | 511.956.000   | 1.022.000.000 |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra |                                                      |                                                                                                              | %       | 100    | 100  | 511.956.000   | 1.022.000.000 |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                                              |         |        |      | 450.000.000   | 910.000.000   |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Laporan | 12     | 12   | 200.000.000   | 440.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | Laporan | 12     | 12   | 250.000.000   | 470.000.000   |                                               | OPD Provinsi ; DKI JAKARTA |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                                              |         |        |      | 61.956.000    | 112.000.000   |                                               |                            |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      | Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                     | Dokumen | 12     | 12   | 8.956.000     | 17.000.000    |                                               | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                         | Dokumen | 12     | 12   | 53.000.000    | 95.000.000    |                                               | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat    |                                    |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              | %       | 100    | 100  | 1.630.155.000 | 550.000.000   | Biro Kesejahteraan dan Pemgantasan Kemiskinan |                            |
|         |                                                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                              |         |        |      | 1.630.155.000 | 550.000.000   |                                               |                            |

| Program | Indikator Program                                                                                                      | Kegiatan                                  | Indikator Kegiatan                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Sub Kegiatan                                                                                  | Satuan  | Target |      | Anggaran      |             | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                         |         | 2026   | 2027 | 2026          | 2027        |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                         |         |        |      | Rp            | Rp          |                                |                               |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                         | 4                                                                                                                          | 5                                                             | 6                                                                                                       | 7       | 8      | 9    | 10            | 11          | 12                             | 13                            |
|         |                                                                                                                        |                                           | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat                |                                                               |                                                                                                         | %       | 100    | 100  | 1.630.155.000 | 550.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                                         |         |        |      | 565.120.000   | 400.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | Laporan | 3      | 3    | 565.120.000   | 400.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         |                                                                                                         |         |        |      | 1.065.035.000 | 150.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                    | Dokumen | 6      | 6    | 1.065.035.000 | 150.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi |                                           |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                         | %       | 100    | 100  | 590.064.000   | 855.982.000 | Biro Organisasi                |                               |
|         |                                                                                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                         |         |        |      | 135.678.000   | 205.312.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi            |                                                               |                                                                                                         | %       | 100    | 100  | 135.678.000   | 205.312.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian             |                                                                                                         |         |        |      | 80.682.000    | 164.574.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                        | Dokumen | 4      | 4    | 80.682.000    | 164.574.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                                                                                                         |         |        |      | 54.996.000    | 40.738.000  |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                     | Orang   | 12     | 16   | 54.996.000    | 40.738.000  |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah        |                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                         |         |        |      | 454.386.000   | 650.670.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi |                                                               |                                                                                                         | %       | 100    | 100  | 454.386.000   | 650.670.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |                                                                                                         |         |        |      | 395.969.000   | 560.000.000 |                                |                               |
|         |                                                                                                                        |                                           |                                                                                                                            |                                                               | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi | Laporan | 12     | 12   | 207.193.000   | 330.000.000 |                                | OPD Provinsi ;<br>JAWA TENGAH |

| Program | Indikator Program                                                                                     | Kegiatan                           | Indikator Kegiatan                                                                                                     | Sub Kegiatan                                         | Indikator Sub Kegiatan                                                                   | Satuan  | Target |      | Anggaran    |             | Unit Kerja<br>Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |         |        |      | 2026        | 2027        |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |         | 2026   | 2027 | Rp          | Rp          |                                |                            |
| 1       | 2                                                                                                     | 3                                  | 4                                                                                                                      | 5                                                    | 6                                                                                        | 7       | 8      | 9    | 10          | 11          | 12                             | 13                         |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Laporan | 12     | 12   | 188.776.000 | 230.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                          |         |        |      | 58.417.000  | 90.670.000  |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi | Dokumen | 12     | 12   | 20.000.000  | 35.409.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | Dokumen | 12     | 12   | 38.417.000  | 55.261.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah |                                    |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          | %       | 100    | 100  | 346.500.000 | 420.524.000 | Biro Adm Pembangunan Daerah    |                            |
|         |                                                                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |         |        |      | 346.500.000 | 420.524.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah |                                                      |                                                                                          | %       | 100    | 100  | 346.500.000 | 420.524.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                          |         |        |      | 331.281.000 | 345.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Laporan | 24     | 24   | 331.281.000 | 345.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                          |         |        |      | 15.219.000  | 75.524.000  |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | Dokumen | 12     | 12   | 15.219.000  | 75.524.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian       |                                    |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          | %       | 100    | 100  | 217.884.000 | 225.000.000 | Biro Perekonomian              |                            |
|         |                                                                                                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                          |         |        |      | 217.884.000 | 225.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian                    |                                                      |                                                                                          | %       | 100    | 100  | 217.884.000 | 225.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                                                                                          |         |        |      | 202.884.000 | 225.000.000 |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      | Laporan | 12     | 12   | 202.884.000 | 225.000.000 |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                |                                                                                          |         |        |      | 15.000.000  |             |                                |                            |
|         |                                                                                                       |                                    |                                                                                                                        |                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | Dokumen | 12     | 12   | 15.000.000  | 20.000.000  |                                | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |

| Program                                               | Indikator Program                                          | Kegiatan                                                         | Indikator Kegiatan                                                                                      | Sub Kegiatan                                    | Indikator Sub Kegiatan                           | Satuan  | Target |      | Anggaran        |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                  |         |        |      | 2026            | 2027            |                             |                            |
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                  |         | 2026   | 2027 | Rp              | Rp              |                             |                            |
| 1                                                     | 2                                                          | 3                                                                | 4                                                                                                       | 5                                               | 6                                                | 7       | 8      | 9    | 10              | 11              | 12                          | 13                         |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                  |         |        |      | 170.000.000     | 250.000.000     | Biro Adm Pembangunan Daerah |                            |
|                                                       | Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah |                                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                  | %       | 100    |      | 170.000.000     | 250.000.000     |                             |                            |
|                                                       |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                         |                                                 |                                                  |         |        |      | 170.000.000     | 250.000.000     |                             |                            |
|                                                       |                                                            |                                                                  | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan |                                                 |                                                  | %       | 100    |      | 170.000.000     | 250.000.000     |                             |                            |
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                                                  |         |        |      | 70.000.000      | 100.000.000     |                             |                            |
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      | Dokumen | 4      | 4    | 70.000.000      | 100.000.000     |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               |                                                  |         |        |      | 100.000.000     | 150.000.000     |                             |                            |
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 6      | 6    | 100.000.000     | 150.000.000     |                             | OPD Provinsi ; JAWA TENGAH |
|                                                       |                                                            |                                                                  |                                                                                                         |                                                 |                                                  |         |        |      | 714.143.065.000 | 631.766.475.000 |                             |                            |

## 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Sekretarat Daerah pada konteks Operasional, dilakukan proses manajemen risiko level operasional dituangkan sebagaimana dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2  
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 2026

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                      | Pernyataan Risiko                   | Skala Risiko | Sebab                                                                   | Dampak                                        | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                              | Penanggung Jawab             | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| (1)                                                                     | (2)                                                                       | (3)                                 | (4)          | (5)                                                                     | (6)                                           | (7)                                                                                                                      | (8)                          | (9)                       |
| <b>STRATEGIS</b>                                                        |                                                                           |                                     |              |                                                                         |                                               |                                                                                                                          |                              |                           |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | MOU tidak terlaksana                | 12           | Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta | Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana. | Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak                                   | Asisten Pemerintah dan Kesra | September 2026            |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Gagal tercapainya kesepakatan batas | 16           | Perbedaan arah kebijakan antar daerah                                   | Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah | 1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah<br>2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota | Asisten Pemerintah dan Kesra | November 2026             |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                      | Pernyataan Risiko                                                                  | Skala Risiko | Sebab                                                                        | Dampak                                                                                                                   | Rencana Tindak Pengendalian                                  | Penanggung Jawab             | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani | 10           | Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum | kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko | Asisten Pemerintah dan Kesra | Triwulan IV 2026          |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan                                         | 12           | Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi          | Hibah tidak sesuai dengan peruntukan                                                                                     | NPHD ; Monitoring, evaluasi dan sosialisasi                  | Asisten Pemerintah dan Kesra | Triwulan II dan IV 2026   |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD    | Pernyataan Risiko                                   | Skala Risiko | Sebab                                                                                                  | Dampak                                                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                        | Penanggung Jawab            | Target Waktu Penyelesaian           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro | 12           | Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota | - Monev pelaksanaan hasil rekomendasi<br>- FGD pembahasan isu terkini terkait bidang ekonomi makro | Asisten ekonomi Pembangunan | - TW II (Mei)<br>- TW IV (Nopember) |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD    | Pernyataan Risiko                                                                              | Skala Risiko | Sebab                                                                      | Dampak                                                                                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penanggung Jawab            | Target Waktu Penyelesaian                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan | 12           | Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal, diantaranya pada SPPG</li><li>- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terhadap keamanan pangan seperti diantaranya terhadap bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG</li></ul> | Asisten Ekonomi Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"><li>- TW I (Maret)</li><li>- TW II (Juni)</li></ul> |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD    | Pernyataan Risiko                                                                                            | Skala Risiko | Sebab                                                                                                     | Dampak                                                                        | Rencana Tindak Pengendalian                                                                             | Penanggung Jawab            | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan        | 12           | Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)        | Berpengaruh terhadap penerimaan PAD                                           | Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD                                         | Asisten Ekonomi Pembangunan | 2026                      |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD | 12           | Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan | Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan | 1. Melaksanakan pemantauan langsung di lapangan secara rutin/berkala<br>2. Desk validasi data pelaporan | Asisten Ekonomi Pembangunan | 2026                      |

| <b>Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan</b>                                  | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD</b> | <b>Pernyataan Risiko</b>                       | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                            | <b>Dampak</b>                              | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Penanggung Jawab</b> | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi            | Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku | 12                  | Perubahan regulasi belum tersosialisasi | Pemberian TPP tidak tepat sasaran          | Evaluasi instrumen pemberian TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah. | Asisten Administrasi    | Triwulan III s.d IV              |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi            | Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan           | 12                  | Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat   | Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan | Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan                                                                                                                                                                        | Asisten Administrasi    | Triwulan I 2026                  |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD           | Pernyataan Risiko                                                | Skala Risiko | Sebab                                                     | Dampak                                                   | Rencana Tindak Pengendalian                                                                             | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Proses pembangunan ZI tidak berjalan                             | 12           | Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI  | Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik | Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD                                           | Asisten Administrasi | Triwulan IV 2026          |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/pihak lain | 10           | Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender | Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai                 | Dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan-peraturan Pengadaan Barang/Jasa                                | Asisten Administrasi | TW II 2026                |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda                      | 12           | Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid       | Nilai PEKPPP Setda rendah                                | 1. Melaksanakan Konsinyering penyempurnaan instrumen<br>2. Melakukan Evaluasi berkala pada PEKPPP Setda | Asisten Administrasi | TW III 2026               |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD              | Pernyataan Risiko                                                        | Skala Risiko | Sebab                                                                   | Dampak                                                 | Rencana Tindak Pengendalian                                           | Penanggung Jawab       | Target Waktu Penyelesaian |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah          | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah    | Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa | 12           | Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.          | PAD sewa gedung tidak optimal                          | Menyusun SOP peminjaman dan Pembayaran sewa                           | Asisten Administrasi   | Semester I Tahun 2026     |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah | Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah       | Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama                       | 12           | Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda | Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal          | Melaksanakan konsinyering penyusunan Manajemen risiko                 | Asisten Administrasi   | TW II 2026                |
| <b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>                          |                                                                   |                                                                          |              |                                                                         |                                                        |                                                                       |                        |                           |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                         | Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti | Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai                  | 12           | Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian         | Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak | Musyawarah dengan para pihak perihal permasalahan substansi kerjasama | Kepala Biro Pemotda KS | Triwulan III 2026         |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                               | Pernyataan Risiko                                 | Skala Risiko | Sebab                                                                                                    | Dampak                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                        | Penanggung Jawab                              | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan | 12           | Kurangnya sosialisasi dan komunikasi                                                                     | Tertundanya penetapan lokasi pembangunan                                           | Perubahan trase/desain                                             | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Triwulan IV 2026          |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                                                          | Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan        | 12           | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD                            | Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah    | Menyusun Surat Edaran kepada OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota | Kepala Biro Pemerintahan Otda                 | Triwulan II 2026          |
| <b>BIRO HUKUM</b>                                     |                                                                                                                    |                                                   |              |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                    |                                               |                           |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum                                                                       | Kesalahan atau penundaan kegiatan                 | 10           | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran | penggunaan aplikasi persuratan dengan baik dan benar               | Kepala Biro                                   | Triwulan I                |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                    | Pernyataan Risiko                                                                                          | Skala Risiko | Sebab                                                                                                     | Dampak                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                           | Penanggung Jawab  | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum                                                            | Kesalahan atau penundaan kegiatan                                                                          | 10           | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan  | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran | menyusun SOP Surat Masuk dan Surat Keluar                                                                             | Kepala Biro       | Triwulan I                |
| <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                      |                                                                                                         |                                                                                                            |              |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                       |                   |                           |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya | 12           | Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik | Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah                               | 1. Monev rutin 2. Pengembangan kompetensi ASN biro 3. Mengalokasikan anggaran untuk menduk kegiatan rumah tangga Biro | Kepala Biro Kesra | TW I, II, III, IV         |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>                              |                                                                                                         |                                                                                                            |              |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                       |                   |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                 | Pernyataan Risiko         | Skala Risiko | Sebab                                                                            | Dampak                                | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral | Menurunnya status geopark | 12           | Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark | Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan | - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan geopark dengan melibatkan stakeholder mitra (utamanya Badan Pengelola Geopark)<br>- Melakukan promosi Geopark melalui media sosia | Pengarah LHKESDM | - TW II (Juni)<br>- TW IV (Desember) |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                            | Pernyataan Risiko                         | Skala Risiko | Sebab                   | Dampak        | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                       | Penanggung Jawab         | Target Waktu Penyelesaian        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel | 15           | Penyalahgunaan anggaran | Kerugian APBD | - Melakukan monitoring pelaksanaan SOP terkait Penatausahaan Keuangan<br>- internalisasi nilai-nilai anti korupsi | Kepala Biro Perekonomian | - TW I (Maret)<br>- TW II (Juni) |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD | Pernyataan Risiko                                                      | Skala Risiko | Sebab                                            | Dampak                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab   | Target Waktu Penyelesaian              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian               | Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi | 12           | Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT | Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana | - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan<br>- Menyelenggarakan asistensi penyusunan RKA/RKP kegiatan DBHCHT<br>- Menyusun bahan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan DBHCHT Kab/Kota | Pengarah Pertanian | - TW I (Januari)<br>- TW IV (Desember) |
| BIRO BUMD                            |                                                      |                                                                        |              |                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD  | Pernyataan Risiko                                    | Skala Risiko | Sebab                                                    | Dampak                                                                                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                | Penanggung Jawab          | Target Waktu Penyelesaian                                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan    | Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)          | 10           | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat | Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Keuangan         | Kepala Biro BUMD dan BLUD | November 2026                                                                  |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha | Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)  | 10           | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat | Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Jasa Aneka Usaha | Kepala Biro BUMD dan BLUD | November 2026                                                                  |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase nilai kemandirian BLUD                     | Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD | 10           | Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD                        | Tidak berkembangnya kinerja BLUD                                                           | melakukan monitoring terkait kebijakan                                     | Kepala Biro BUMD dan BLUD | - TW I (Januari);<br>- TW II (April);<br>- TW III (Juli);<br>- TW IV (Oktober) |

| <b>Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan</b> | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD</b>                                   | <b>Pernyataan Risiko</b>                                                                                   | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                                                                             | <b>Dampak</b>                                       | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                | <b>Penanggung Jawab</b>           | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan | Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja | 10                  | Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi  | Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah | Desk tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan | Pengarah BUMD Jasa Aneka Produksi | Triwulan II                      |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD                                        | Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD                                                                  | 10                  | Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD                           | Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak  | Bentuk tim khusus dengan perwakilan dari semua unit terkait                       | Pengarah BLUD                     | Triwulan IV                      |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD                                      | Keterlambatan Pengumpulan Laporan                                                                          | 10                  | Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu | Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal           | Membuat surat tentang batas pengumpulan laporan                                   | Pengarah BUMD Jasa Anek Usaha     | Triwulan IV                      |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD | Pernyataan Risiko                                                 | Skala Risiko | Sebab                                                          | Dampak                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab                            | Target Waktu Penyelesaian |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| BIRO ADM. BANGDA                           |                                                      |                                                                   |              |                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                             |                           |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Persentase realisasi bantuan keuangan                | Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu | 12           | Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan | Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut | 1. Percepatan proses verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026<br>2. Monitoring progres percepatan penyelesaian kegiatan Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Perubahan TA. 2026 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah | TW IV Tahun 2026          |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD             | Pernyataan Risiko                                                                                          | Skala Risiko | Sebab                                                                                             | Dampak                                                       | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab              | Target Waktu Penyelesaian |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid | 16           | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat | Melakukan pencermatan progres pelaporan pada aplikasi bantuan keuangan kepada desa. Desa mana yang belum sama sekali melaporkan, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke kantor desa tersebut dan dilakukan uji sampel ke lokasi kegiatan | Analisis Kebijakan Ahli Madya | TW II Tahun 2026          |
| BIRO ORGANISASI                            |                                                                  |                                                                                                            |              |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                   | Pernyataan Risiko                      | Skala Risiko | Sebab                                                       | Dampak                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI     | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya | Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi | 12           | Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi | Pelayanan publik terganggu | Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kab/Kota secara terstruktur, terukur, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan III dan IV       |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                       | Pernyataan Risiko                                                  | Skala Risiko | Sebab                                                               | Dampak                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab       | Target Waktu Penyelesaian |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI     | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif | SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan                           | 12           | Kurangnya koordinasi antar OPD                                      | Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi         | Mempedomani SKJ sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk SKJ manajerial sesuai KepmenpanRB 409/2020, SKJ Jabatan Pelaksana sesuai KepmenpanRB nomor 01/2025, dan SKJ Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Instansi Teknis JF terkait | Pengarah/Ketua Pokja   | Triwulan I                |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI     | Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A                                   | RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan | 12           | RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh | Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan | Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD                                                                                                                                                                           | Kepala Biro Organisasi | Triwulan IV               |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                                   | Pernyataan Risiko                                         | Skala Risiko | Sebab                                                        | Dampak                                      | Rencana Tindak Pengendalian                                                                           | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan                                                    | Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur           | 12           | Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami        | Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya | Fasilitasi penerapan sistem kerja (pembuatan SK Kelompok Kerja dan penyesuaian proses bisnis dan SOP) | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan I                |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah | 12           | Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi | Kerugian finansial perangkat daerah         | Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.                                            | Kepala Biro          | Triwulan I                |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik                                                                               | Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan               | 12           | Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov | Disparitas kualitas pelayanan antar daerah  | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota                                     | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan IV               |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                                       | Pernyataan Risiko                                                                           | Skala Risiko | Sebab                                                                                 | Dampak                                                                              | Rencana Tindak Pengendalian                                                            | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi            | Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki                         | 12           | Pemalsuan laporan pemeliharaan barang                                                 | Kerugian keuangan                                                                   | Tanda tangan pejabat berwenang pada berita acara perbaikan.                            | Kasubbag Tata Usaha  | Triwulan I                |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan. | 12           | Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi. | Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan. | Menyusun dokumen pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional sesuai standar kompetensi. | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan I                |
| BIRO APEJ                                             |                                                                                                                            |                                                                                             |              |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                        |                      |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD | Pernyataan Risiko                                             | Skala Risiko | Sebab                              | Dampak                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa          | Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga | 12           | Peserta pemilihan merasa dirugikan | Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda | Melakukan review dokumen dengan teliti dan cermat antara PPK dan Pokja.<br>- Menetapkan pedoman (petunjuk teknis) standar evaluasi dokumen pemilihan.<br>- Meningkatkan Kompetensi JF PBJ melalui pelatihan, seminar, FGD, dsb. | Kepala Biro APBJ | TW 1 2026                 |
| BIRO UMUM                                                 |                                                      |                                                               |              |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                             | Pernyataan Risiko        | Skala Risiko | Sebab                    | Dampak                         | Rencana Tindak Pengendalian                              | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya kerusakan BMD | 12           | Kelalaian Penggunaan BMD | Menghambat kegiatan Oprasional | Membeikan bukti surat izin penggunaan kendaraan bermotor | Kepala Biro      | Semester I dan Semester II Tahun 2026 |

4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026

Biro-Biro lingkup Sekretariat Daerah pada tahun 2026 melaksanakan aktivitas riil/agenda dalam mendukung 136 Program Daerah sebagaimana tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

## Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026

| No. | Program Daerah                      | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Output/ Target/ Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                        | Unit Kerja Pelaksana                            | Perangkat Daerah Kolaborasi                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                    | 6                                               | 7                                                                                                                                                       |
| 1.  | Pengembangan <i>sister province</i> | 1. Pengiriman delegasi dalam forum UCLG<br>2. Pengiriman delegasi untuk pengembangan sister province/kerja sama<br>3. Memperkuat kerjasama dengan Queensland terkait sektor pendidikan, pertanian, perdagangan, investasi, iptek, perhubungan, pariwisata, pengembangan desa dan kota, serta program kembar yang nantinya dapat di implementasikan di kedua belah pihak<br>4. Perluasan kerjasama dengan CHUNGCHONGBUK-DO KOREA SELATAN terkait pendidikan dan Tenaga kerja secara umum<br>5. Perluasan kerjasama bidang kesehatan dan pariwisata dengan Fujian, Republik Rakyat Tiongkok<br>6. Perluasan kerjasama Teknologi Informasi dengan Taiwan<br>7. Perluasan kerjasama di bidang pendidikan dengan Turkey atau Mesir | 1. Menjadi anggota jejaring kerja sama internasional (UCLG) dan mendapatkan 4 negara mitra baru;<br>2. Terlaksananya joint working group dengan 3 mitra sister province (CCBD, Queensland dan Fujian);<br>3. 50 lulusan SMA/SMK di Jateng melanjutkan pendidikan di CCBD Korea Selatan;<br>4. 1 Dokumen MoU Perpanjangan Sister State dengan Queensland;<br>5. Kolaborasi Teknologi Medis, Standardisasi Global, Pengembangan Produk Herbal dan | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama | 1. Disdikbud;<br>2. DPMPSTP;<br>3. Disperindag;<br>4. Dinkop UKM;<br>5. Disporapar;<br>6. Dinkes;<br>7. Diskominfo;<br>8. Biro Kesra;<br>9. Universitas |

| No. | Program Daerah                                                                                                                                       | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                            | Output/ Target/ Volume                                                                                                                                                                                                                                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                        | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                    | 6                    | 7                           |
|     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | <p>Farmasi dan Pengembangan Layanan <i>Medical Tourism</i> Unggulan di Jawa Tengah;</p> <p>6. Kolaborasi Inovasi dan Ekonomi Digital, dan Kemitraan Industri Semikonduktor;</p> <p>7. Mendapatkan kuota beasiswa Turki/Mesir bagi para pelajar SMA/SMK.</p> |                                                                                                                                      |                      |                             |
| 2.  | Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalannya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan) | 1. KKN Tematik sesuai kebutuhan Jawa Tengah --> Sudah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan 44 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jateng | Jumlah perguruan tinggi di Jateng yang menjalin kerjasama pada ruang lingkup pengabdian masyarakat (KKN Tematik)=44 PT                                                                                                                                      | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | Biro Pemotdaker      |                             |
|     | Kerjasama dengan Bisnis                                                                                                                              | Keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah melalui CSR                                                                                                     | Penguatan Tata Kelola CSR                                                                                                                                                                                                                                   | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | Biro Pemotdaker      |                             |
|     | Kerjasama dengan Komunitas                                                                                                                           | Forum Komunikasi Bersama Komunitas                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;                                                                                             | Biro Pemotdaker      |                             |

| No. | Program Daerah                                                          | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                                                                                                                                         | Output/ Target/ Volume                                                                                                                                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                        | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                    | 6                    | 7                                                              |
|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah                                          |                      |                                                                |
|     | Memperkuat Kerjasama Pemerintah                                         | Pembuatan Forum Kepala Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | Biro Pemotdaker      |                                                                |
|     | Penguatan dan Promosi Moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri | Kerjasama Tematik dengan Kairo-Mesir dan Negara di Eropa                                                                                                                                                                                                                       | Pengembangan bidang sains & teknologi Pesantren Vokasi dan mendapat kuota 10 beasiswa bagi pelajar/ santri/ tenaga pendidik Jawa Tengah di Mesir dan Eropa | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah | Biro Pemotdaker      | 1. Kesbangpo<br>2. Biro Kesra<br>3. Universita<br>4. KBRI/KJRI |
| 2.  | Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah                      | 1. Penyusunan SK dan Peraturan Gubernur tindaklanjut Perda TJSLP;<br>2. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor identifikasi pemetaan TJSLP;<br>3. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor verifikasi data TJSLP;<br>4. Monitoring dan evaluasi data TJSLP;<br>5. Pengembangan Aplikasi; | Laporan pelaksanaan tahunan                                                                                                                                | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha Sub Kegiatan:                                   |                      |                                                                |

| No. | Program Daerah                                                                                                                                           | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                                                                            | Output/ Target/ Volume                                                                     | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Unit Kerja Pelaksana      | Perangkat Daerah Kolaborasi                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                             | 6                         | 7                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                          | 6. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor Bisnis Forum TJSLP berdasarkan hasil pemetaan (Atas, Menengah, Kecil)                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                         |
| 3   | Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora                                                    | 1. Pelaksanaan forum diaspora                                                                                                                                                                                     | 1 kali Focus Group Discussion                                                              | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha                                                                                                                                                              | Biro Pemoetdaker          | 1. Kesbangpol<br>2. Disdikbud<br>3. Disporapar<br>4. Disperindag<br>5. Dinkop UKM<br>6. KBRI/KJRI<br>7. Asosiasi Bisnis |
|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                         |
| 4.  | Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta | Fasilitasi dan Koordinasi dengan Kemenag untuk mendorong pondok-pondok yang belum mempunyai legalitas dalam dalam penerbitan Surat Kelulusan/Ijazah agar dapat diakui Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Indonesia | Teridentifikasinya santri lulusan pondok                                                   | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan | Biro Kesejahteraan Rakyat |                                                                                                                         |
| 5   | Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren                                                                                            | 1. Pemberian Hibah kepada pesantren                                                                                                                                                                               | Peningkatan kualitas pesantren dan SDM pesantren Target : 5.364 pesantren / 100.000 santri | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah                                       | Biro Kesra                | DinkopUKM<br>Dinas Pertanian dan Peternakan<br>Dinas ESDM<br>DLHK                                                       |

| No. | Program Daerah                                                                                                                                                                                                             | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                                                                      | Output/ Target/ Volume                                                                                                                          | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                             | 6                    | 7                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | sarana prasarana Pendidikan keagamaan                                                                                                                                                         |                      |                             |
| 6.  | Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi | 1. Hibah kepada Kanwil Kemenag Jateng<br>2. Hibah kepada LPTQ                                                                                                                                               | 1. Jumlah pengajar agama yang menerima insentif =230.830 orang<br>2. Jumlah penghafal kitab (Al Quran) yang menerima insentif =2000 orang       | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan           | Biro Kesra           |                             |
| 7.  | Beasiswa luar dan dalam negeri untuk santri berprestasi                                                                                                                                                                    | 1. Pemberian hibah kepada lembaga fasilitasi dan sinergi pondok pesantren dan diniyah (luar negeri)<br>2. Pemberian hibah kepada lembaga fasilitasi dan sinergi pondok pesantren dan diniyah (dalam negeri) | Memenuhi kebutuhan biaya operasional di Madrasah Aliyah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Target : siswa MA volume : 200.000 siswa | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan | Biro Kesra           |                             |
| 8.  | BOSDa Madrasah Aliyah                                                                                                                                                                                                      | Pemberian BOSDA MA                                                                                                                                                                                          | Jumlah siswa MA yang menerima BOSDa MA = 182.360 siswa                                                                                          | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan | Biro Kesra           |                             |

| No. | Program Daerah                                                                                                       | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                            | Output/ Target/ Volume                                                                       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                 | 4                                                                                            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                    | 7                           |
| 9.  | Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan                        | Penyelenggaraan Jateng Bersholawat                                                                                                                                | Terlaksananya Jateng Bersholawat                                                             | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                 | Biro Kesra           |                             |
| 8.  | Peningkatan kualitas hidup lansia                                                                                    | Koordinasi, pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui pertemuan dengan unsur terkait                                                                    | Laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup lansia      | Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial |                      |                             |
| 9.  | Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan <b>ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri</b> | 1. Monev ketersediaan <i>daycare</i> untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri;<br>2. Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada | 1. Laporan Monev ketersediaan daycare untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan                                                                                                         |                      |                             |

| No. | Program Daerah                                                      | Rencana Aktivitas Riil                                             | Output/ Target/ Volume                                                                                            | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                   | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                                  | 4                                                                                                                 | 5                                                                                                                               | 6                    | 7                           |
|     |                                                                     | Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri                            | 2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri | Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                              |                      |                             |
|     |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                      |                             |
| 10. | Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak | Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan | 100 Perkara                                                                                                       | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum<br><br>Kegiatan Bantuan Hukum<br><br>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | Biro Hukum           | LBH Kementerian Hukum       |
|     |                                                                     |                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                      |                             |

| No. | Program Daerah                                                                                                              | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                   | Output/ Target/ Volume                                                                                                                                        | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Unit Kerja Pelaksana                                                 | Perangkat Daerah Kolaborasi             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                            | 6                                                                    | 7                                       |
| 11. | Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis | 1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis | Laporan Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis | Program Perekonomian dan Pembangunan;<br>Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian; Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Biro Perekonomian                                                    | Dinas Perindag<br>Dinas Koperasi<br>UKM |
| 12. | Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim                        | 1. Pembinaan dan pengawasan kepatuhan usaha pariwisata ramah muslim                                                                                      | 1. Meningkatnya Kualitas destinasi Pariwisata                                                                                                                 | Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                    | Dinas Budparekraf                                                    | Koordinator Biro Perekonomian           |
| 13. | Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>day care</i> untuk buruh di Kawasan Industri        | 1. Fasilitasi dan koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan                                                               | Laporan Fasilitasi dan Koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan                                                               | Program Perekonomian dan Pembangunan<br>Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam<br>Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan     | 1. Dinas Pertanian dan Peternakan<br>2. Dinas Kelautan dan Perikanan | Koordinator Biro Perekonomian           |

| No. | Program Daerah                                                                                                              | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                   | Output/ Target/ Volume                                                                                                                           | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                             | Unit Kerja Pelaksana                                                 | Perangkat Daerah Kolaborasi             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                         | 6                                                                    | 7                                       |
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                                                             |                                                                      |                                         |
| 14. | Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis | 1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis | Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis | Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro |                                                                      | Dinas Perindag<br>Dinas Koperasi<br>UKM |
| 15. | Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau                                                                    | Fasilitasi dan koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau                                                                       | Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau                                                       | Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro |                                                                      | Dinas Perindag                          |
| 16. | Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)                                                                         | 1. Fasilitasi dan Koordinasi Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)                                                                         | Laporan Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)                                                                                                | Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | Biro Perekonomian                                                    | Dinas Perindag                          |
| 17. | Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida                                                       | 1. Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida                                                       | Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida                                          | Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                      | 1. Dinas Pertanian dan Peternakan<br>2. Dinas Kelautan dan Perikanan | Koordinator Biro Perekonomian           |

| No. | Program Daerah                                                                         | Rencana Aktivitas Riil                                                                                          | Output/ Target/ Volume                                                                              | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Unit Kerja Pelaksana                                                 | Perangkat Daerah Kolaborasi         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                    | 7                                   |
|     |                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                     | Sub Kegiatan:<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                                                                                      |                                                                      |                                     |
| 18. | Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok                               | Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok                              | Laporan Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok          | Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam<br>Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                  | Koordinator Biro Perekonomian       |
| 19. | Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM                                               | Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM                                              | Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM                          | Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam<br>Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 1. Dinas Pertanian dan Peternakan<br>2. Dinas Kelautan dan Perikanan | Koordinator Biro Perekonomian       |
| 20. | Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas | 1. Perumusan kebijakan berupa surat edaran untuk BUMD dan BLUD dapat menerima pegawai 3% penyandang disabilitas | Surat Edaran Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas | Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD Keuangan                                                                                                                                      | Biro BUMD dan BLUD                                                   | - Dinas Kesehatan<br>- Dinas Sosial |

| No. | Program Daerah                                                                                                                     | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                                                                                                                                                   | Output/ Target/ Volume                                                                                                                                                                         | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                             | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                         | 6                    | 7                                                                               |
|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                      | - Dinas Ketenagakerjaan                                                         |
| 21. | Fasilitasi Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD                                                                      | 1. Penyusunan Perda tentang Tata Kelola BUMD (Perda inisiatif DPRD)<br>2. Penyusunan Pergub tentang ketentuan secara teknis tata kelola bisnis, SOTK hingga SDM<br>3. Reformasi Struktur Organisasi<br>4. Peningkatan kompetensi SDM BUMD<br>5. Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola BUMD | 1. Tersusunnya Pergub dan rencana aksi tentang Tata Kelola BUMD<br>2. Tersusunnya struktur organisasi dan peningkatan kompetensi BUMD                                                          | Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Keuangan                                                                              | Biro BUMD dan BLUD   | - Biro Hukum                                                                    |
| 22. | Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari                                                           | Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan                                                                                                                                                                                                                         | Laporan Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari                                                                                       | Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan:                                                                                            | Biro Perekonomian    | Dinas pertanian dan Peternakan<br>Dinas Ketahanan pangan<br>Biro BUMD, dan BLUD |
| 23. | Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD ( <i>E-Commerce</i> ) | 1. Penyusunan kajian kelayakan bisnis <i>e-Commerce</i><br>2. Penyusunan regulasi jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemprov Jateng melalui BUMD ( <i>E-Commerce</i> )<br>3. Fasilitasi dan Koordinasi dalam membuat platform E-Commerce                              | 1. Dokumen kajian kelayakan bisnis <i>e-Commerce</i> ;<br>2. Dokumen regulasi <i>e-Commerce</i> ;<br>3. Terbangunnya jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi | Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | Biro BUMD            | - Dinas Perindag<br>- Dinas Pertanian & Peternakan<br>- Biro Perekonomian       |

| No. | Program Daerah                                                                                                                                                                       | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Output/ Target/ Volume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Unit Kerja Pelaksana                         | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                            | 7                           |
|     |                                                                                                                                                                                      | (nomor 2 dan 3 dilaksanakan apabila hasil kajian bisnis dinyatakan layak)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jawa Tengah melalui BUMD ( <i>E-Commerce</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |
|     | <b>Biro Adm. Bangda</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                              |                             |
| 24. | Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional | 1. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui melalui 1 KK 1 rumah layak huni<br>2. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan<br>3. Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga | 1. Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui RTLH<br>2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan<br>3. Laporan Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | Disperakim<br>Dispora<br>Dinas PUPR<br>BPKAD |                             |
| 25. | Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah                                                                                                      | Penyusunan Perda dan Pergub tentang kelembagaan eks Bakorwil                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tersusunnya Perda dan Pergub tentang kelembagaan eks Bakorwil                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                                                                    | Biro Organisasi                              |                             |

| No. | Program Daerah                                                   | Rencana Aktivitas Riil                                                                                                                                  | Output/ Target/ Volume                                       | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                                                                       | 4                                                            | 5                                                                                                                                                                   | 6                    | 7                           |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                              | ;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik                                                                                                                          |                      |                             |
| 26. | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya        | Penyusunan Kebijakan penggunaan baju adat daerah pada hari kamis minggu pertama dalam 1 bulan sekali, HUT Provinsi Jateng dan acara ceremonial tertentu | Surat Edaran Sekda tentang penggunaan baju adat daerah       | Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik                          | Biro Organisasi      |                             |
| 27. | Peningkatan TPP ASN                                              | Penyusunan kebijakan penunjang terkait TPP berbasis kinerja dan kelas jabatan                                                                           | Jumlah dokumen kebijakan penunjang terkait TPP yang tersusun | Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan                                        | Biro Organisasi      | BKD<br>BPKAD<br>BAPPEDA     |
| 28. | Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD | Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng                                                                                      | 100 % OPD yang terfasilitasi                                 | Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja        | Biro Organisasi      |                             |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                              |                                                                                                                                                                     |                      |                             |
| 29. | Kantor Gubernur Rumah Rakyat                                     | Pertemuan reguler pemerintah provinsi atau Gubernur dengan masyarakat secara langsung di Kantor Gubernur atau Kantor Eks Bakorwil                       | Terbangunnya gerai rumah rakyat                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Biro Umum            |                             |

| No. | Program Daerah                                                                  | Rencana Aktivitas Riil                       | Output/ Target/ Volume                 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Unit Kerja Pelaksana | Perangkat Daerah Kolaborasi |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1   | 2                                                                               | 3                                            | 4                                      | 5                                                                                                                                                                   | 6                    | 7                           |
|     | Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah | Penyediaan sarpras untuk kantor eks bakorwil | Tersedianya Sarpras untuk eks bakorwil | Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Biro Umum            |                             |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan rangkaian proses perencanaan tahun pertama Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan penjabaran RKPD tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 mengikuti prinsip *money follows program* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dijabarkan ke dalam RKA sebagai perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan dan menjamin pencapaian target-target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar target-target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2025 diharapkan menjadi titik tolak pencapaian kinerja RPJMD dan Renstra 2025-2029.

**Lampiran 1**  
**Identifikasi Risiko**

| No               | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja                                                         | Pernyataan Risiko                                                                  | Kategori Risiko  | Sebab                                                                                                  | Dampak                                                                                                                   |                                                                                 |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                    |                  |                                                                                                        | Uraian                                                                                                                   | Pihak Yang Terkena                                                              |
| (1)              | (2)                  | (3)                                                                     | (4)                                                                       | (5)                                                                                | (6)              | (7)                                                                                                    | (8)                                                                                                                      | (9)                                                                             |
| <b>STRATEGIS</b> |                      |                                                                         |                                                                           |                                                                                    |                  |                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                 |
| 1                | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | MOU tidak terlaksana                                                               | Risiko Strategis | Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta                                | Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.                                                                            | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                 |
| 2                | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Gagal tercapainya kesepakatan batas                                                | Risiko Strategis | Perbedaan arah kebijakan antar daerah                                                                  | Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah                                                                            | Pemkab/Pemkot, Masyarakat                                                       |
| 3                | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani | Risiko Strategis | Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum                           | kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                        |
| 4                | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan                                         | Risiko Fraud     | Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi                                    | Hibah tidak sesuai dengan peruntukan                                                                                     | Penerima Hibah                                                                  |
| 5                | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan                   | Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro                                | Risiko Strategis | Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota       | 1. Pemerintah Pusat<br>2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota" |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan                               | Indikator Kinerja                                       | Pernyataan Risiko                                                                                            | Kategori Risiko  | Sebab                                                                                                     | Dampak                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                                         |                                                         |                                                                                                              |                  |                                                                                                           | Uraian                                                                                     | Pihak Yang Terkena                                                                                                                                    |
| (1) | (2)                  | (3)                                                                     | (4)                                                     | (5)                                                                                                          | (6)              | (7)                                                                                                       | (8)                                                                                        | (9)                                                                                                                                                   |
| 6   | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan               | Risiko Strategis | Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan                                | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait | 1. Pemerintah Pusat<br>2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>3. Dunia Swasta<br>4. Petani, Petambak dan Nelayan<br>5. Masyarakat |
| 7   | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan        | Risiko Strategis | Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)        | Berpengaruh terhadap penerimaan PAD                                                        | BUMD dan Pemerintah Daerah                                                                                                                            |
| 8   | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD | Risiko Kepatuhan | Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan | Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan              | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                       |
| 9   | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi        | Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku                                                               | Risiko Strategis | Perubahan regulasi belum tersosialisasi                                                                   | Pemberian TPP tidak tepat sasaran                                                          | Tim TPP, Seluruh OPD                                                                                                                                  |
| 10  | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi        | Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan                                                                         | Risiko Strategis | Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat                                                                     | Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan                                                 | Pemerintah Kab/Kota                                                                                                                                   |
| 11  | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi        | Proses pembangunan ZI tidak berjalan                                                                         | Risiko Strategis | Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI                                                  | Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik                                   | OPD, Masyarakat, Pemprov (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)                                                                                            |

| No                     | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                                                                                  | Pernyataan Risiko                                                        | Kategori Risiko    | Sebab                                                                         | Dampak                                                                          |                                                   |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                        |                      |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                          |                    |                                                                               | Uraian                                                                          | Pihak Yang Terkena                                |
| (1)                    | (2)                  | (3)                                                                             | (4)                                                                                                                | (5)                                                                      | (6)                | (7)                                                                           | (8)                                                                             | (9)                                               |
| 12                     | Sasaran Strategis    | Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil         | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi                                                                   | Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/ pihak lain        | Risiko Fraud       | Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender                     | Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai                                        | OPD Jateng                                        |
| 13                     | Sasaran Strategis    | Meningkatnya kualitas pelayanan□ perangkat daerah di Sekretariat Daerah         | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah                                                     | Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda                              | Risiko Strategis   | Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid                           | Nilai PEKPPP Setda rendah                                                       | Pengguna layanan Setda                            |
| 14                     | Sasaran Strategis    | Meningkatnya kualitas pelayanan□ perangkat daerah di Sekretariat Daerah         | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah                                                     | Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa | Risiko Fraud       | Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.                | PAD sewa gedung tidak optimal                                                   | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                   |
| 15                     | Sasaran Strategis    | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah | Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah                                                        | Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama                       | Risiko Kepatuhan   | Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda       | Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal                                   | Sekretaris Daerah                                 |
| <b>BIRO PEMOTDAKER</b> |                      |                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                          |                    |                                                                               |                                                                                 |                                                   |
| 1                      | Sasaran Program      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                         | Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti                                                  | Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai                  | Risiko Kemitraan   | Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian               | Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak                          | Pemprov, Biro Pemotdaker                          |
| 2                      | Sasaran Program      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                         | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan                        | Risiko Operasional | Kurangnya sosialisasi dan komunikasi                                          | Tertundanya penetapan lokasi pembangunan                                        | Instansi pengusul, masyarakat terdampak, Gubernur |
| 3                      | Sasaran Program      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                         | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                                                          | Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan                               | Risiko Kepatuhan   | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD | Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Pemprov, Biro Pemotdaker                          |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                | Pernyataan Risiko                                                                   | Kategori Risiko    | Sebab                                                               | Dampak                                                |                                   |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                    |                                                                     | Uraian                                                | Pihak Yang Terkena                |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                                                                              | (5)                                                                                 | (6)                | (7)                                                                 | (8)                                                   | (9)                               |
| 4   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra | Laporan pertanggungjawaban disusun tidak sesuai dengan bukti riil                   | Risiko Fraud       | Pemalsuan laporan pertanggungjawaban keuangan                       | Kerugian finansial daerah                             | Biro Pemotdaker                   |
| 5   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ                                                                              | Keterlambatan LKPJ                                                                  | Risiko Operasional | Data dari OPD tidak lengkap atau lambat masuk                       | Rekomendasi DPRD tidak optimal, turunnya kepercayaan  | Pemkab/Pemkot, Masyarakat         |
| 6   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ                                                                              | Masyarakat merasa memiliki Tanah Negara atau Tanah aset milik pemerintah            | Risiko Operasional | Terjadi pembiaran penguasaan aset pemerintah oleh masyarakat        | Potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum          | Masyarakat terdampak, Gubernur    |
| 7   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ                                                                              | Gangguan ketertiban di kantor Gubernur                                              | Risiko Operasional | Koordinasi pengamanan yang lemah                                    | Terganggunya pelayanan dan keamanan lingkungan        | Pengunjuk rasa, ASN, Pemprov      |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ                                                                              | Target sertifikasi tanah tidak tercapai                                             | Risiko Operasional | Ketidaksinkronan data pertanahan & keterlambatan kebijakan daerah   | Hak atas tanah masyarakat tidak jelas, sengketa tanah | Masyarakat penerima PTSL, Pemprov |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD                                                                                                                       | Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur                                        | Risiko Operasional | Kelengkapan berkas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Tertundanya pengesahan PAW DPRD                       | Biro Pemotdaker, Legislatif       |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM                                                                                                       | Perangkat Daerah tidak melaksanakan aktivitas dalam mendukung capaian indikator SPM | Risiko Operasional | Indikator SPM tidak sesuai dengan perencanaan daerah                | Capaian indikator SPM dinilai rendah                  | OPD teknis, Biro Pemotdaker       |

| No             | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                | Pernyataan Risiko                                                                          | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                                                 | Dampak                                                                                                                                    |                                             |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                |                      |                                           |                                                                                  |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                       | Uraian                                                                                                                                    | Pihak Yang Terkena                          |
| (1)            | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                                              | (5)                                                                                        | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                   | (8)                                                                                                                                       | (9)                                         |
| 11             | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH   | Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti                | Rencana kerja sama tidak sesuai kebutuhan daerah                                           | Risiko Operasional | Analisis kebutuhan belum optimal                                                                                                                                                      | Kerja sama tidak berdampak signifikan                                                                                                     | Pemprov                                     |
| 12             | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH   | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | Ketidakpatuhan terhadap peraturan / kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama          | Risiko Kemitraan   | Tidak pahamnya OPD Provinsi dan Pemkab/ Pemkot terhadap regulasi kemitraan                                                                                                            | Berkurangnya kepercayaan mitra luar negeri terhadap Pemda                                                                                 | Pemprov, Publik                             |
| 13             | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH   | Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti | Pelaksanaan kerjasama luar negeri kurang maksimal                                          | Risiko Kemitraan   | Kurangnya partisipasi Pemda terhadap pelaksanaan kerjasama                                                                                                                            | Menghambat aktivitas bisnis dan pembangunan                                                                                               | Pemprov, masyarakat                         |
| 14             | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH   | Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah                                 | Evaluasi pelaksanaan kerjasama tidak dapat dilakukan                                       | Risiko Operasional | Tidak ada instrumen Monev terkait pelaksanaan kerjasama                                                                                                                               | Tidak termonitornya pelaksanaan kerjasama di lingkup Pemprov Jawa Tengah                                                                  | Pemprov                                     |
| <b>D HUKUM</b> |                      |                                           |                                                                                  |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                             |
| 1              | Sasaran Program      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Indeks Reformasi Hukum                                                           | Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | Ketidakhadiran Perangkat Daerah teknis terkait dalam hal pencermatan substansi teknis atau pembahasan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah                                                | Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda                                                        | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |
| 2              | Sasaran Program      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Indeks Reformasi Hukum                                                           | Produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan tidak efektif dalam pelaksanaannya     | Risiko Operasional | masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi termasuk dalam menindaklanjuti hasil kajian, analisis dan evaluasi | Banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengalami permasalahan dalam implementasinya | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                             | Pernyataan Risiko                                                                                                                              | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dampak                                                                             |                                                          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Uraian                                                                             | Pihak Yang Terkena                                       |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                           | (5)                                                                                                                                            | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (8)                                                                                | (9)                                                      |
| 3   | Sasaran Program      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota | Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | Risiko Operasional | - Penyampaian draft Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota belum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan<br>- Permohonan fasilitasi dan/atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang terlampau banyak | Uraian proses pemberian fasilitasi dan rekomendasi membutuhkan waktu lebih         | Pemerintah Kabupaten/Kota                                |
| 4   | Sasaran Program      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | Capaian Pemberian Bantuan Hukum                               | ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang bersengketa                                                                                          | Risiko Hukum       | Tidak terselesaikannya sengketa hukum masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                         | Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Biro Hukum                                 | Masyarakat pengadu/ teradu                               |
| 5   | Sasaran Program      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | Capaian Pemberian Bantuan Hukum                               | Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi                                                 | Risiko Operasional | Tidak terlaksananya verifikasi permohonan pencairan bantuan hukum                                                                                                                                                                                                                                        | Pemberian bantuan hukum tidak tepat sasaran                                        | Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya            |
| 6   | Sasaran Program      | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM                            | Rendahnya nilai capaian pelaksanaan Aksi HAM                                                                                                   | Risiko Operasional | Kurangnya pemahaman unit kerja terhadap pedoman pelaksanaan dan indikator penilaian Aksi HAM                                                                                                                                                                                                             | Nilai capaian Aksi HAM menurun atau tidak mencapai target nasional                 | Perangkat Daerah terkait                                 |
| 7   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum                  | Kesalahan atau penundaan kegiatan                                                                                                              | Risiko Operasional | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran | Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait, masyarakat |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                      | Pernyataan Risiko                                                                          | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                                                                              | Dampak                                                                             |                                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                      |                                           |                                                                                                                        |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                    | Uraian                                                                             | Pihak Yang Terkena                          |
| (1) | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                                                                                    | (5)                                                                                        | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                                                | (8)                                                                                | (9)                                         |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan              | Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | Perangkat Daerah pemrakarsa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan Produk Hukum Pengaturan yang sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan                                     | Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-undangan               | Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan | Risiko Operasional | Perangkat Daerah pemrakarsa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan Produk Hukum Penetapan yang sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan                                      | Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum | Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum                           | Risiko Operasional | Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat | Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen hukum yang tidak tersedia   | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |
| 11  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum | Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan | Risiko Operasional | Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat | Potensi kalahnya Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam proses persidangan          | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                           | Pernyataan Risiko                                                                                                                                   | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                    | Dampak                                                                                                                                    |                                             |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                      |                                           |                                                                                             |                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                          | Uraian                                                                                                                                    | Pihak Yang Terkena                          |
| (1) | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                                                         | (5)                                                                                                                                                 | (6)                | (7)                                                                                                                                      | (8)                                                                                                                                       | (9)                                         |
| 12  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan | Hasil analisis dan evaluasi belum banyak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dalam perbaikan produk hukum daerah                          | Risiko Operasional | Masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi                       | Banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengalami permasalahan dalam implementasinya | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat |
| 13  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji                                | kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan | Risiko Operasional | belum optimalnya pelaksanaan pemantauan/pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota                                            | Raperda/Raperkada yang diajukan belum secara kualitas memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah                                             | Pemerintah Kabupaten/Kota                   |
| 14  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji                                | Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya              | Risiko Operasional | belum terdapatnya kesepahaman atas penyusunan/pembentukan produk hukum daerah serta permasalahan-permasalahan menyangkut implementasinya | tidak optimalnya implementasi dari Perda/Perkada yang sudah ditetapkan                                                                    | Pemerintah Kabupaten/Kota                   |
| 15  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM   | Persentase bantuan hukum yang tertangani                                                    | Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/ atau kelompok rentan tidak optimal                                                            | Risiko Kemitraan   | Perbedaan pemahaman dan interpretasi kerja sama antara Pemerintah Daerah dan LBH                                                         | Tidak tercapainya kinerja pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/ atau kelompok rentan                                      | Masyarakat miskin dan/ atau kelompok rentan |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                          | Pernyataan Risiko                                                                         | Kategori Risiko    | Sebab                                                                             | Dampak                                                                                       |                                                          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                            |                                                                                           |                    |                                                                                   | Uraian                                                                                       | Pihak Yang Terkena                                       |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                        | (5)                                                                                       | (6)                | (7)                                                                               | (8)                                                                                          | (9)                                                      |
| 16  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | Persentase Fasilitasi HAM Daerah                                                                           | Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM                                       | Risiko Kepatuhan   | Tidak optimalnya pembinaan implementasi kabupaten kota peduli HAM                 | Kurang optimalnya kualitas pelayanan HAM di kabupaten kota                                   | Masyarakat luas                                          |
| 17  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               | Persentase masalah hukum non litigasi yang tertangani                                                      | Tidak tertanganinya seluruh permasalahan hukum non-litigasi sesuai target yang ditetapkan | Risiko Operasional | Tidak tersedianya data dan dokumen pendukung dari instansi terkait secara lengkap | Meningkatnya potensi sengketa hukum karena permasalahan tidak terselesaikan secara preventif | Masyarakat pengadu/ teradu                               |
| 18  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum | Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian                               | Risiko Operasional | Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian                                        | Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya                              | Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait             |
| 19  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum               | Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan                      | Risiko Fraud       | Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan                                | Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima                 | Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait, masyarakat |
| 20  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum               | Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran                                | Risiko Operasional | Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran              | Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum                                             | Pegawai Biro Hukum, Perangkat Daerah terkait, masyarakat |
| 21  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum               | Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan                              | Risiko Operasional | Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja                   | laporan tidak dapat disusun tepat waktu                                                      | Perangkat Daerah terkait                                 |

#### BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                       | Pernyataan Risiko                                                                                                                            | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                     | Dampak                                                                                   |                                                                                                                                           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |                                                                                                           | Uraian                                                                                   | Pihak Yang Terkena                                                                                                                        |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                     | (5)                                                                                                                                          | (6)                | (7)                                                                                                       | (8)                                                                                      | (9)                                                                                                                                       |
| 1   | Sasaran Program      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar                          | Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar     | Risiko Operasional | Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang mempedomani target kinerja yg telah ditetapkan pada RKO     | Capaian kinerja kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | 1. Sub Koordinator Sosial (pelaksana)<br>2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK)<br>3. Kepala Biro Kesra (KPA)<br>4. Sekretaris Daerah (PA) |
| 2   | Sasaran Program      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar                      | Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar | Risiko Operasional | Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang mempedomani target kinerja yg telah ditetapkan pada RKO     | Capaian kinerja kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 1. Sub Koordinator Sosial (pelaksana)<br>2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK)<br>3. Kepala Biro Kesra (KPA)<br>4. Sekretaris Daerah (PA) |
| 3   | Sasaran Program      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik                                                       | Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan                                                                                                   | Risiko Fraud       | Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi                                       | Hibah tidak sesuai dengan peruntukan                                                     | Penerima Hibah                                                                                                                            |
| 4   | Sasaran Program      | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik                                                       | Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA                                                                            | Risiko Operasional | Banyaknya usulan kegiatan hibah yang tidak didasari dengan data dukung yang lengkap                       | Hibah tidak dapat dicairkan                                                              | Penerima Hibah                                                                                                                            |
| 5   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya                                   | Risiko Operasional | Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik | Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah                                     | Biro Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                 |
| 6   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                               | Kelengkapan administrasi hibah kurang lengkap sehingga pelaporan terlambat                                                                   | Risiko Operasional | Penerimaan Hibah dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran                                              | SPJ Hibah terlambat / tidak sesuai waktu                                                 | Biro Kesra                                                                                                                                |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                           | Pernyataan Risiko                                                                                                                            | Kategori Risiko    | Sebab                                                                            | Dampak                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                                  | Uraian                                                                                    | Pihak Yang Terkena                                                                                                                                                  |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                         | (5)                                                                                                                                          | (6)                | (7)                                                                              | (8)                                                                                       | (9)                                                                                                                                                                 |
| 7   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                   | Realisasi hibah pada akhir periode                                                                                                           | Risiko Operasional | Keterlambatan pemenuhan kelengkapan administrasi hibah                           | Laporan realisasi pencairan hibah melebihi ketentuan                                      | Biro Kesra                                                                                                                                                          |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Persentase pelaksanaan pelayanan keagamaan                                                                  | Tumpang tindih tugas dan kegiatan yang tidak terlaksana                                                                                      | Risiko Kemitraan   | Duplikasi Tugas Pokok dan Fungsi antara Kemenag dengan Biro Kesra                | Pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana dengan baik                                         | Masyarakat                                                                                                                                                          |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar                                                         | Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar     | Risiko Operasional | Kurang Optimalnya dalam memantau / mengawasi pelaksanaan kegiatan                | Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | 1. Sub Koordinator Sosial, Pendidikan dan Kesehatan (pelaksana)<br>2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK)<br>3. Kepala Biro Kesra (KPA)<br>4. Sekretaris Daerah (PA) |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          | Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar                                                     | Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar | Risiko Operasional | Kurang Optimalnya dalam memantau / mengawasi pelaksanaan kegiatan                | Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 1. Sub Koordinator (pelaksana)<br>2. Koordinator Non Pelayanan Dasar (PPTK)<br>3. Kepala Biro Kesra (KPA)<br>4. Sekretaris Daerah (PA)                              |
| 11  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik                                                                                         | Risiko Operasional | Perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur dan pengelolaan yang belum efektif | Rekam jejak aset sulit ditelusuri keberadaannya                                           | Biro Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                           |
| 12  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat | Data kepegawaian tidak valid                                                                                                                 | Risiko Operasional | Pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala             | Terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)                              | Pegawai Biro Kesra                                                                                                                                                  |

| No                       | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                       | Pernyataan Risiko                                                                                                          | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                             | Dampak                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                      |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                   | Uraian                                                                                     | Pihak Yang Terkena                                                                                                                                   |
| (1)                      | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                                                                                                     | (5)                                                                                                                        | (6)                | (7)                                                                                                               | (8)                                                                                        | (9)                                                                                                                                                  |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN</b> |                      |                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                    |                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| 1                        | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan                                                    | Sinkronisasi program/kegiatan Ekonomi Makro menjadi kurang efektif                                                         | Risiko Operasional | Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas | Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan tidak optimal                       | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan<br>2. Pemerintah Kab/Kota                                                                                        |
| 2                        | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Sinkronisasi program/kegiatan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM menjadi kurang efektif                           | Risiko Operasional | Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas | Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan tidak optimal                       | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan<br>Pemerintah Kab/Kota<br>2. Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi UKM<br>3. Masyarakat                      |
| 3                        | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup                                                                              | Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral tidak dapat diimplementasikan | Risiko Operasional | Data yang dimiliki OPD belum terkompilasi dengan baik                                                             | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait | OPD sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral                                                                                |
| 4                        | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral                                                                    | Menurunnya status geopark                                                                                                  | Risiko Kemitraan   | Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark                                  | Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan                                                      | 1. OPD sektor Pariwisata<br>2. Badan Pengelola Geopark<br>3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat wilayah Geopark didalam wilayah administrasinya |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Pernyataan Risiko                                                                                                | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                     | Dampak                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                           | Uraian                                                                                                                                                                                                                                  | Pihak Yang Terkena                                                                                                           |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                                                | (5)                                                                                                              | (6)                | (7)                                                                                                                                                       | (8)                                                                                                                                                                                                                                     | (9)                                                                                                                          |
| 5   | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                            | Rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan tidak dapat diimplementasikan | Risiko Operasional | Data yang dimiliki OPD belum terkompilasi dengan baik                                                                                                     | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait                                                                                                                                              | OPD sektor Pertanian (Pertanian, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan)                                                 |
| 6   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian                                    | Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel                                                                        | Risiko Fraud       | Penyalahgunaan anggaran                                                                                                                                   | Kerugian APBD                                                                                                                                                                                                                           | 1. ASN lingkup Biro Perekonomian<br>2. OPD Mitra                                                                             |
| 7   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro                                                                                 | Pengolahan dan penyajian data bidang Ekonomi Makro menjadi kurang efektif dan efisien                            | Risiko Operasional | Keterbatasan sumber data/pengumpulan data                                                                                                                 | Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat                                                                                   | Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota                                                                         |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pengolahan dan penyajian data bidang PerindagkopUKM menjadi kurang efektif dan efisien                           | Risiko Operasional | 1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data<br>2. Human Error (Kurang partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi tim panitia/peserta) | 1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.<br>2. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>2. Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi UKM<br>3. Masyarakat |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Pernyataan Risiko                                                                                                        | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                                                                                                                           | Dampak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pihak Yang Terkena                                                                                                                                                       |
| (1) | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                                                                                                | (5)                                                                                                                      | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9)                                                                                                                                                                      |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Permintaan data/kegiatan prioritas di PerindagkopUKM tidak dipenuhi Kab/Kota                                             | Risiko Operasional | 1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas<br>2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah | 1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebij akan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.<br>2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebij akan belum dijalankan oleh kab/Kota | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>2. Pelaku Industri, Perdagangan dan Koperasi UKM<br>3. Masyarakat                                             |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Pengolahan dan penyajian data bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kurang efektif dan efisien. | Risiko Operasional | 1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data<br>2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas<br>3. Kesalahan logistic/sistem/jaringan                                                   | 1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebij akan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.<br>2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal.                                                            | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>2. Calon Investor dan Investor<br>3. Dunia Usaha<br>4. Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>5. Masyarakat |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Pernyataan Risiko                                                                                                    | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                                                                                                                           | Dampak                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pihak Yang Terkena                                                                                                                                                       |
| (1) | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                                                                                                | (5)                                                                                                                  | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (9)                                                                                                                                                                      |
| 11  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota | Risiko Operasional | 1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas<br>2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah | 1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.<br>2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebijakan belum dijalankan oleh kab/Kota | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>2. Calon Investor dan Investor<br>3. Dunia Usaha<br>4. Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>5. Masyarakat |
| 12  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian                                                                                             | Data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai                                                                         | Risiko Operasional | Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat                                                                                                                                                                                                                           | pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>2. Dunia Swasta<br>3. Petani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)<br>4. Masyarakat                        |
| 13  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian                                                                                             | Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi                                               | Risiko Kepatuhan   | Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT                                                                                                                                                                                                                | Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana                                                                                                                                | 1. Pemerintah Pusat<br>2. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota                                                                                           |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                               | Pernyataan Risiko                                                            | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                         | Dampak                                                                                                               |                                                            |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                           |                                                                 |                                                                              |                    |                                                                                               | Uraian                                                                                                               | Pihak Yang Terkena                                         |
| (1) | (2)                  | (3)                                       | (4)                                                             | (5)                                                                          | (6)                | (7)                                                                                           | (8)                                                                                                                  | (9)                                                        |
| 14  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan                             | Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal                        | Risiko Operasional | Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal | 1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas<br>2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal                     | OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat |
| 15  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dari hasil panen | Risiko Operasional | Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan                  | - Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal<br>- Kerugian finansial bagi pembudidaya                 | 1. Masyarakat<br>2. Dunia usaha                            |
| 16  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Tidak sesuai kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan                         | Risiko Operasional | Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata                                               | Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut                                                              | 1. Masyarakat<br>2. Dunia usaha                            |
| 17  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup                   | Penurunan fungsi DAS Prioritas di Jawa Tengah                                | Risiko Operasional | Kualitas vegetasi, lahan dan air sebagai komponen Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun          | Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor                                        | OPD ampuan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat |
| 18  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN      | Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup                   | Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor saja       | Risiko Operasional | Pengelolaan mangrove terpisah-pisah oleh OPD yang terlibat dan berkepentingan                 | Adanya tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan agenda kegiatan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Tengah | OPD ampuan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat |

| No                        | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                   | Pernyataan Risiko                                                                         | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                     | Dampak                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                      |                                                       |                                                                                                     |                                                                                           |                    |                                                                                           | Uraian                                                                                                                         | Pihak Yang Terkena                                                                                                                                                                          |
| (1)                       | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                 | (5)                                                                                       | (6)                | (7)                                                                                       | (8)                                                                                                                            | (9)                                                                                                                                                                                         |
| 19                        | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral                                             | Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana | Risiko Operasional | Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi                        | Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan | 1. Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/Kota<br>2. Calon Investor dan Investor<br>3. Pelaku sektor transportasi, sektor industri, sektor bangunan gedung dan sektor rumah tangga |
| 20                        | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian | Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro Perekonomian                                    | Risiko Operasional | Penyimpanan dokumen dan arsip dinamis belum sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku | Terhambatnya layanan kearsipan di Biro Perekonomian                                                                            | 1. ASN lingkup Biro Perekonomian<br>2. OPD Mitra                                                                                                                                            |
| <b>BIRO BUMD DAN BLUD</b> |                      |                                                       |                                                                                                     |                                                                                           |                    |                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| 1                         | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan                                                  | Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)                                               | Risiko Fraud       | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil                                  | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat                                     | BUMD dan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  |
| 2                         | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha                                               | Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)                                       | Risiko Fraud       | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil                                  | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat                                     | BUMD dan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                  |
| 3                         | Sasaran Program      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                                   | Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD                                      | Risiko Kepatuhan   | Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD                                                         | Tidak berkembangnya kinerja BLUD                                                                                               | BLUD                                                                                                                                                                                        |

| No                      | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                              | Pernyataan Risiko                                                                                          | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                   | Dampak                                                               |                                               |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                         |                      |                                                       |                                                                                                |                                                                                                            |                    |                                                                                                         | Uraian                                                               | Pihak Yang Terkena                            |
| (1)                     | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                            | (5)                                                                                                        | (6)                | (7)                                                                                                     | (8)                                                                  | (9)                                           |
| 4                       | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan                | Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro BUMD dan BLUD                                                    | Risiko Operasional | Penyimpanan dokumen dan arsip tidak sesuai                                                              | Terhambatnya layanan kearsipan di Biro BUMD dan BLUD                 | Biro BUMD dan BLUD                            |
| 5                       | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Pemilihan direksi BUMD Keuangan tidak sesuai keahlian                                                      | Risiko Kemitraan   | Penunjukan pihak ketiga tidak kredibel                                                                  | BUMD tidak berkembang                                                | BUMD dan Pemerintah Daerah                    |
| 6                       | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan | Keterlambatan penginputan laporan kinerja keuangan pada sistem SiPete                                      | Risiko Operasional | Kurangnya koordinasi antara BUMD dan Pemerintah Daerah                                                  | Laporan Kinerja tidak dapat dilihat dalam sistem                     | BUMD dan Pemerintah Daerah                    |
| 7                       | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan  | Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja | Risiko Operasional | Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi | Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah                  | BUMD dan Pemerintah Daerah                    |
| 8                       | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD                                         | Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD                                                                  | Risiko Operasional | Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD                          | Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak                   | BUMD dan Pemerintah Daerah                    |
| <b>BIRO ADM. BANGDA</b> |                      |                                                       |                                                                                                |                                                                                                            |                    |                                                                                                         |                                                                      |                                               |
| 1                       | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | Persentase realisasi bantuan keuangan                                                          | Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu                                          | Risiko Operasional | Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan                                          | Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut | 1. Pemerintah Kabupaten/Kota<br>2. Masyarakat |
| 2                       | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah                                       | Data kinerja pada e-controlling kinerja tidak valid                                                        | Risiko Operasional | SKPD belum melengkapi data Kinerja pada Aplikasi e-Controlling Kinerja                                  | Data tidak dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan      | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah               |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                     | Pernyataan Risiko                                                                                                                                                               | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                         | Dampak                                                                                           |                                 |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                               | Uraian                                                                                           | Pihak Yang Terkena              |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                   | (5)                                                                                                                                                                             | (6)                | (7)                                                                                           | (8)                                                                                              | (9)                             |
| 3   | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan                            | Agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja                                                                            | Risiko Operasional | Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar SKPD                                                | Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau Program Strategis tidak terjadi                   | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| 4   | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN                                                        | Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan disimulasikan                                           | Risiko Operasional | Sistem aplikasi belum siap digunakan untuk kegiatan simulasi                                  | Materi yang di sosialisasikan/ didiseminasikan tidak dapat terinformasi secara utuh atau optimal | SKPD Provinsi                   |
| 5   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah | Informasi yang disajikan pada media informasi Biro tidak relevan                                                                                                                | Risiko Operasional | Informasi yang disajikan lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik | Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah                                             | Pengguna Media / Masyarakat     |
| 6   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah                                            | Indikator kinerja yang ditetapkan tidak selaras dengan regulasi yang mengatur pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Risiko Operasional | Perubahan SOTK Setda                                                                          | Kualitas perencanaan Setda kurang baik                                                           | Biro-biro lingkup Setda         |
| 7   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah                        | Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap                                                                                                                              | Risiko Operasional | Tata cara penyusunan RKO belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di SKPD                     | Waktu pelaksanaan desk menjadi lebih lama/tidak optimal                                          | SKPD Provinsi Jawa Tengah       |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja                                                              | Pernyataan Risiko                                                                  | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                             | Dampak                                                                                              |                                                                        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                            |                                                                                |                                                                                    |                    |                                                                                                                                                   | Uraian                                                                                              | Pihak Yang Terkena                                                     |
| (1) | (2)                  | (3)                                        | (4)                                                                            | (5)                                                                                | (6)                | (7)                                                                                                                                               | (8)                                                                                                 | (9)                                                                    |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah | Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap              | Risiko Operasional | Pagu APBN (Dekon TP) sering terjadi penyesuaian/perubahan menyesuaikan kebijakan Pusat                                                            | Kegiatan tidak dapat dilaksanakan                                                                   | SKPD Provinsi Jawa Tengah Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah | Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu                         | Risiko Operasional | Perangkat Daerah kurang melakukan koordinasi internal                                                                                             | RKO (APBD) sebagai bahan pengendalian menjadi tidak valid                                           | Biro Administrasi Pembangunan Daerah                                   |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah | Data realisasi fisik APBD kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan  | Risiko Kepatuhan   | Ketidakpatuhan user pelaporan e-controlling APBD                                                                                                  | Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan                  | Biro Administrasi Pembangunan Daerah                                   |
| 11  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah | Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik | Risiko Operasional | Pelaksana PSN di Jawa Tengah belum memahami pentingnya memberikan laporan progres dan hasil kegiatan secara periodik, kepada Pemprov Jawa Tengah. | Kesulitan dalam menyusun laporan progres pelaksanaan PSN kepada Gubernur                            | Biro Administrasi Pembangunan Daerah                                   |
| 12  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah | Target keuangan dan fisik RKO berubah                                              | Risiko Operasional | Perubahan jadwal / pergeseran kegiatan dan anggaran tidak diinformasikan                                                                          | Penatausahaan ikut berubah (RAK dan SPD), pengendalian kegiatan dan anggaran berpotensi tidak tepat | Biro Administrasi Pembangunan Daerah                                   |
| 13  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah | Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid                | Risiko Operasional | Pelaksanaan monitoring tidak didampingi oleh personil yang membidangi dan/atau tidak disertai data dukung yang dibutuhkan                         | Proses monitoring menjadi tidak efektif, efisien dan optimal                                        | Biro Administrasi Pembangunan Daerah                                   |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja                                                               | Pernyataan Risiko                                                                                          | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                       | Dampak                                                                                 |                                                                    |
|-----|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                            |                                                                                 |                                                                                                            |                    |                                                                                                                                             | Uraian                                                                                 | Pihak Yang Terkena                                                 |
| (1) | (2)                  | (3)                                        | (4)                                                                             | (5)                                                                                                        | (6)                | (7)                                                                                                                                         | (8)                                                                                    | (9)                                                                |
| 14  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah | Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan                                         | Risiko Operasional | Adanya Kepala Daerah baru atau anggota dewan baru                                                                                           | Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan      | 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah<br>2. Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 15  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah | Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi                                                  | Risiko Operasional | Kurangnya tingkat partisipasi pengiriman laporan oleh OPD Kab/Kota                                                                          | Tidak tersedianya data valid yang mencakup seluruh kegiatan sesuai progres di lapangan | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                    |
| 16  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah | Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan                                               | Risiko Operasional | Pelaksanaan monitoring hanya dapat berupa sampling                                                                                          | Hasil data untuk analisis kebijakan menjadi kurang valid                               | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                    |
| 17  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah | Proses verifikasi capaian progress pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat                                   | Risiko Operasional | Bagian Pembangunan Kab/Kota yang hadir dalam Rakor tidak dapat memberikan informasi kendala permasalahan dan progress real time di lapangan | Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam           | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                    |
| 18  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah | Kendala operasional dalam proses updating data pelaksanaan Bankeu secara manual                            | Risiko Operasional | Belum terfasilitasinya seluruh OPD pengelola kegiatan Bantuan Keuangan pada 35 Kabupaten/Kota                                               | Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam           | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                    |
| 19  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                | Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid | Risiko Kepatuhan   | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan                                           | Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat                           | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                    |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                      | Pernyataan Risiko                                                                           | Kategori Risiko    | Sebab                                                                            | Dampak                                                                                                         |                                      |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                                        |                                                                                             |                    |                                                                                  | Uraian                                                                                                         | Pihak Yang Terkena                   |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                                    | (5)                                                                                         | (6)                | (7)                                                                              | (8)                                                                                                            | (9)                                  |
| 20  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN            | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                 | Rekomendasi kebijakan teknis tidak dapat disusun karena kurangnya koordinasi lintas OPD     | Risiko Operasional | Tidak adanya forum koordinasi reguler dengan OPD Teknis                          | Rekomendasi kebijakan teknis tidak terpenuhi secara jumlah maupun substansi                                    | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah      |
| 21  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan                | Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan | Risiko Operasional | Terdapat perbedaan persepsi pada pengampu evaluasi masing-masing Biro            | Laporan hasil evaluasi tidak dapat digunakan secara optimal sebagai bahan perbaikan kinerja periode berikutnya | Biro-biro lingkup Setda              |
| 22  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Hilangnya aset                                                                              | Risiko Fraud       | Penyalahgunaan aset                                                              | Reputasi Biro Bangsa menjadi kurang baik                                                                       | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 23  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik                                        | Risiko Operasional | Perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur dan pengelolaan yang belum efektif | Rekam jejak aset sulit ditelusuri keberadaannya                                                                | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 24  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Data kepegawaian tidak valid                                                                | Risiko Operasional | Pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala             | Terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)                                                   | Pegawai Biro                         |
| 25  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel                                                   | Risiko Operasional | Penyalahgunaan anggaran                                                          | Kerugian APBD                                                                                                  | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                      | Pernyataan Risiko                                                            | Kategori Risiko    | Sebab                                                                 | Dampak                                                                      |                                      |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                                        |                                                                              |                    |                                                                       | Uraian                                                                      | Pihak Yang Terkena                   |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                                    | (5)                                                                          | (6)                | (7)                                                                   | (8)                                                                         | (9)                                  |
| 26  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Kerusakan arsip                                                              | Risiko Operasional | Kurang memadainya sarana penyimpanan arsip fisik                      | Hilangnya informasi penting dan terganggunya administrasi                   | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 27  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan              | Risiko Operasional | Tidak tersampainya dokumen surat pada bagian administrasi persuratan  | Reputasi Biro Bangsa menjadi kurang baik                                    | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |
| 28  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak | Risiko Operasional | Proses pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan rencana pengadaan | Kualitas barang jasa yang tidak sesuai dapat mengurangi efektifitas kinerja | Biro Administrasi Pembangunan Daerah |

#### BIRO ORGANISASI

|   |                 |                             |                                                                                            |                                                                    |                  |                                                                     |                                                    |                                      |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Sasaran Program | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya                     | Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi                             | Risiko Kepatuhan | Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi         | Pelayanan publik terganggu                         | Pemerintah Kab/Kota                  |
| 2 | Sasaran Program | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif | SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan                           | Risiko Kepatuhan | Kurangnya koordinasi antar OPD                                      | Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi         | OPD, Kab/Kota                        |
| 3 | Sasaran Program | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A                                   | RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan | Risiko Kepatuhan | RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh | Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan | OPD, Pemprov Jawa Tengah, Masyarakat |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                      | Pernyataan Risiko                                         | Kategori Risiko    | Sebab                                                        | Dampak                                                                                     |                               |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                                        |                                                           |                    |                                                              | Uraian                                                                                     | Pihak Yang Terkena            |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                                    | (5)                                                       | (6)                | (7)                                                          | (8)                                                                                        | (9)                           |
| 4   | Sasaran Program      | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan                                                    | Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur           | Risiko Kepatuhan   | Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami        | Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya                                                | OPD, ASN                      |
| 5   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah | Risiko Fraud       | Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi | Kerugian finansial perangkat daerah                                                        | Biro Organisasi               |
| 6   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota                            | Dokumen ABK tidak tersusun                                | Risiko Operasional | Data beban kerja tidak tersedia                              | Perhitungan kebutuhan pegawai tidak valid                                                  | OPD, Kab/Kota                 |
| 7   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi                                    | Data tidak valid atau tidak lengkap                       | Risiko Operasional | Data kelembagaan tidak mutakhir                              | Indeks Kematangan Organisasi Daerah tidak menggambarkan kondisi riil kelembagaan di daerah | OPD                           |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota                     | Rekomendasi tidak menjawab kebutuhan riil                 | Risiko Operasional | Tidak adanya justifikasi kebutuhan organisasi yang kuat      | Tumpang tindih tugas antar perangkat daerah baru                                           | Pem Kab/Kota                  |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan                                                           | Data evaluasi tidak lengkap atau salah input              | Risiko Operasional | Kurangnya SDM memahami instrumen evaluasi                    | Nilai SPBE rendah, tidak mencerminkan kondisi riil                                         | OPD, Pemprov                  |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik                                                                               | Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan               | Risiko Operasional | Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov | Disparitas kualitas pelayanan antar daerah                                                 | Kab/Kota, Masyarakat, Pemprov |

| No               | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja                                                                                                          | Pernyataan Risiko                                                                           | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                 | Dampak                                                                              |                          |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                  |                      |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                             |                    |                                                                                       | Uraian                                                                              | Pihak Yang Terkena       |
| (1)              | (2)                  | (3)                                                       | (4)                                                                                                                        | (5)                                                                                         | (6)                | (7)                                                                                   | (8)                                                                                 | (9)                      |
| 11               | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD                                                                           | Hasil penilaian tidak objektif atau tidak sesuai realisasi                                  | Risiko Operasional | Kesalahan interpretasi dalam pemberian nilai                                          | Nilai RB berpotensi menurun                                                         | OPD                      |
| 12               | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota                                                                      | Capaian RB kabupaten/kota rendah                                                            | Risiko Operasional | Fasilitasi tidak optimal                                                              | Penggunaan laporan hasil fasilitasi sebelumnya                                      | Pem Kab/Kota             |
| 13               | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               | Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya                                                                         | Fasilitasi tidak optimal                                                                    | Risiko Operasional | Jadwal fasilitasi tidak terlaksana sesuai rencana                                     | Target Nilai SAKIP tidak tercapai                                                   | OPD, Kab/Kota            |
| 14               | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH                       | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi                                | Risiko Operasional | Kurangnya pencatatan dan pengawasan barang                                            | Kehilangan barang                                                                   | Biro Organisasi          |
| 15               | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH                       | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki                         | Risiko Fraud       | Pemalsuan laporan pemeliharaan barang                                                 | Kerugian keuangan                                                                   | Biro Organisasi          |
| 16               | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH                       | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi            | Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan. | Risiko Operasional | Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi. | Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan. | OPD, Kab/Kota            |
| <b>BIRO APBJ</b> |                      |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                             |                    |                                                                                       |                                                                                     |                          |
| 1                | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa                                                                                | Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga                               | Risiko Kepatuhan   | Peserta pemilihan merasa dirugikan                                                    | Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda                                  | OPD Provinsi Jawa Tengah |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja                                                             | Pernyataan Risiko                                                                                                                                                                                                                      | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                | Dampak                                                                                                                                                      |                                                                   |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                      | Uraian                                                                                                                                                      | Pihak Yang Terkena                                                |
| (1) | (2)                  | (3)                                                       | (4)                                                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                    | (6)                | (7)                                                                                  | (8)                                                                                                                                                         | (9)                                                               |
| 2   | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik                            | Tidak dipatuhinya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan marketplace (Blangkon Jateng)                                                                                                                                   | Risiko Kemitraan   | Terjadinya pengingkaran terhadap perjanjian kerjasama dari pihak market place        | PBJ yang dilakukan oleh SKPD tidak sesuai dengan aturan yang berlaku                                                                                        | Penyedia dan SKPD di Lingkup Pemprov Jateng                       |
| 3   | Sasaran Program      | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ | Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kematangan UKPBJ) Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan target<br>-Terhambatnya capaian UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi level 3 (proaktif) | Risiko Kepatuhan   | Banyaknya bukti dukung yang harus dipenuhi sedangkan personil yang dimiliki terbatas | -Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kurang maksimal<br>-UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) | UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah                    |
| 4   | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa         | Arsip tersebar di berbagai tempat                                                                                                                                                                                                      | Risiko Operasional | kurang sarana penyimpanan arsip fisik                                                | arsip rusak dan hilang                                                                                                                                      | OPD BIRO APBJ                                                     |
| 5   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                     | Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi                                                                                                                                    | Risiko Operasional | keterbatasan pemahaman Konsolidasi di tingkat OPD                                    | Masih ditemukan potensi kemahalan harga pada barang/jasa dengan spesifikasi yang sama                                                                       | K/L/PD Khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                  |
| 6   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa    | Terganggunya proses pelaksanaan PBJ                                                                                                                                                                                                    | Risiko Operasional | - Kurangnya tingkat pemahaman pelaku PBJ<br>- Permasalahan di sistem / aplikasi      | Proses Pengadaan Tertunda                                                                                                                                   | Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait) |

| No               | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan                 | Indikator Kinerja                                                                                                             | Pernyataan Risiko                                                    | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                                                                                                                   | Dampak                                                                           |                                                               |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                      |                                                           |                                                                                                                               |                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                         | Uraian                                                                           | Pihak Yang Terkena                                            |
| (1)              | (2)                  | (3)                                                       | (4)                                                                                                                           | (5)                                                                  | (6)                | (7)                                                                                                                                                                                     | (8)                                                                              | (9)                                                           |
| 7                | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa                                                          | Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa Tengah menjadi PKPBJ        | Risiko Kepatuhan   | Kekurangan/revisi pemenuhan bukti dukung oleh UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) belum semua di approve oleh LKPP | UKPBJ Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 4 (strategis) | Biro APBJ                                                     |
| 8                | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa | Data kepegawaian tidak valid                                         | Risiko Operasional | pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala                                                                                                                    | terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)                     | Pegawai di Biro APBJ                                          |
| <b>BIRO UMUM</b> |                      |                                                           |                                                                                                                               |                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                               |
| 1                | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda              | Terjadinya kerusakan BMD                                             | Risiko Operasional | Kelalaian Penggunaan BMD                                                                                                                                                                | Menghambat kegiatan Oprasional                                                   | Pimpinan, Pengguna Barang Milik Daerah                        |
| 2                | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                           | Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah pimpinan. | Risiko Operasional | Adanya kesalahan sumber data yang diperoleh.                                                                                                                                            | Menurunkan reputasi pimpinan                                                     | Perangkat Daerah dan Lembaga/ Organisasi Selain Pemerintahan. |
| 3                | Sasaran Program      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol                                | Editing narasi berita pimda terhambat                                | Risiko Operasional | Kurangnya pemenuhan data dari OPD teknis                                                                                                                                                | Sebagian kegiatan/ statement pimpinan tidak jadi tayang di media                 | Pokja Publikasi dan Hubungan Media                            |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                           | Pernyataan Risiko                                                                                 | Kategori Risiko    | Sebab                                                                              | Dampak                                                    |                                                                                                         |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                             |                                                                                                   |                    |                                                                                    | Uraian                                                    | Pihak Yang Terkena                                                                                      |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                         | (5)                                                                                               | (6)                | (7)                                                                                | (8)                                                       | (9)                                                                                                     |
| 4   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun                                    | ASN menerima gaji dan tunjangan tepat waktu                                                       | Risiko Kepatuhan   | Rendahnya kesadaran ASN dalam memperbarui data tunjangan keluarga                  | Temuan pemeriksa                                          | ASN Setda Prov. Jateng                                                                                  |
| 5   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah                                 | Terjaminnya keakuratan Laporan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah                     | Risiko Operasional | Kurang tertibnya penginputan data Barang persediaan pada aplikasi SIM Aset         | Laporan Barang persediaan pada akhir periode tidak sesuai | Pimpinan, Pengurus Barang                                                                               |
| 6   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah                 | Tersedianya layanan peminjaman asset pada Biro umum                                               | Risiko Fraud       | penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik Pemerintah Daerah                      | PAD sewa gedung tidak optimal                             | Pemerintah provinsi Jawa tengah                                                                         |
| 7   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda | Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan baik                                       | Risiko Operasional | Pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan dalam SHS (Standat Harga Satuan)      | Proses pembayaran terhambat                               | Sub Bagian lain dan Biro-biro lingkup Setda Jateng                                                      |
| 8   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan                         | Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Setda Provinsi Jawa Tengah berupa meubelair            | Risiko Operasional | Pembelian barang menunggu reviu TKDN dari Inspektorat                              | Belum tersedianya Barang ketika diperlukan                | Pengguna Barang Milik Daerah                                                                            |
| 9   | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda  | Pimpinan ASN Provinsi dan Masyarakat                                                              | Risiko Operasional | Petugas kebersihan tidak maksimal dalam membersihkan ruangan                       | Suasana kerja kurang nyaman                               | Pimpinan dan pegawai SETDA                                                                              |
| 10  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan            | Terciptanya kondisi kendaraan siap operasional & Legalitas kelengkapan kendaraan lebih terkontrol | Risiko Operasional | Kurangnya koordinasi antara pemegang kendaraan dengan koordinator servis kendaraan | Pelaksanaan kegiatan terhambat                            | Pegawai di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah & Dinas OPD saat melaksanakan kegiatan di kantor Setda |

| No  | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan             | Indikator Kinerja                                                                                                                                          | Pernyataan Risiko                                                                                                                | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                | Dampak                                                                                                          |                                                                                     |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                      |                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                    |                                                                                      | Uraian                                                                                                          | Pihak Yang Terkena                                                                  |
| (1) | (2)                  | (3)                                                   | (4)                                                                                                                                                        | (5)                                                                                                                              | (6)                | (7)                                                                                  | (8)                                                                                                             | (9)                                                                                 |
| 11  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima dana penunjang operasional tepat waktu                                            | Risiko Fraud       | Berkas pencairan dana penunjang pimpinan tertunda untuk ditandatangani oleh Pimpinan | Terdapat keluhan dari pimpinan                                                                                  | Kepala Daerah                                                                       |
| 12  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan                                                            | Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah selama 12 Bulan                                                          | Risiko Operasional | Agenda Pimpinan yang Dinamis yang memerlukan kebutuhan yang mendadak                 | Terdapat keluhan dari pimpinan                                                                                  | Biro Umum, Penyedia Jasa                                                            |
| 13  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan                                               | Memberikan kontribusi dalam menyajikan data dukung publikasi berupa foto, video dan berita terkait dengan agenda pimpinan daerah | Risiko Operasional | Beberapa lokasi peliputan memerlukan perizinan khusus                                | Tidak dapat menyajikan publikasi pada lokasi tersebut                                                           | Pimpinan Daerah, Pokja Publikasi dan Hubungan Media, Masyarakat                     |
| 14  | Sasaran Kegiatan     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun                                                                                                        | Agenda Pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar                                                                            | Risiko Operasional | Dinamika atau perubahan kegiatan Pimpinan yang tinggi                                | Fasilitasi keprotokolan dan Acara yang dihadiri Pimpinan Daerah dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana awal | Protokol Kementerian Lembaga Daerah, OPD Prov. Jateng, Instansi vertikal, BUMN/BUMD |

**Lampiran 2**  
**Analisis Risiko**

| Pernyataan Risiko                                                                  | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                            |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                    | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                     | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| (1)                                                                                | (2)                     | (3)          | (4)          | (5)                   | (6)                                                                                                                                        | (7)                   | (8)                | (9)          | (10)         |
| <b>STRATEGIS</b>                                                                   |                         |              |              |                       |                                                                                                                                            |                       |                    |              |              |
| MOU tidak terlaksana                                                               | 4                       | 5            | 20           | Ada                   | Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah daerah yang akan mekasanakan kerjasama.                                                       | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Gagal tercapainya kesepakatan batas                                                | 4                       | 5            | 20           | Ada                   | 1. Sosialisasi Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah<br>2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Kab/Kota | Belum Memadai         | 4                  | 4            | 16           |
| Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Meningkatkan upaya pendokumentasian dalam administrasi pemerintahan                                                                        | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |
| Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan                                         | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | "1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan hibah<br>2. Monitoring evaluasi pelaksananaan hibah"                                                 | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro                                | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Koordinasi terkait hasil rakor yang sudah menjadi keputusan                                                                                | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |

| Pernyataan Risiko                                                                                            | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                         |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                              | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                  | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan               | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan | Belum Memadai         | 4                  | 3            | 12           |
| Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan        | 4                       | 4            | 16           | Belum Ada             | monitoring dan evaluasi kinerja secara On The Spot ke BUMD                              | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melaksanakan Rakor Pengendalian APBD                                                    | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku                                                               | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Penyesuaian Kebijakan Pemberian TPP                                                     | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan                                                                         | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melaksanakan fasilitasi penyusunan Perda/Perkada SOTK                                   | Belum Memadai         | 4                  | 3            | 12           |
| Proses pembangunan ZI tidak berjalan                                                                         | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melakukan pembinaan pembangunan zona Integritas pada TPI OPD                            | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |

| Pernyataan Risiko                                                        | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                           |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                          | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                    | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/ pihak lain        | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Pelaksanaan review HPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku                               | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |
| Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda                              | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melaksanakan Sosialisasi PEKPPP ke Biro-biro lingkup Setda                                | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Melakukan pengawasan oleh atasan langsung                                                 | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama                       | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melaksanakan desk MR                                                                      | Belum Memadai         | 4                  | 3            | 12           |
| <b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>                   |                         |              |              |                       |                                                                                           |                       |                    |              |              |
| Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai                  | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Koordinasi secara intensif dengan OPD Provinsi dan kab kota terkait kerjasama luar negeri | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan                        | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | 1. Konsultasi Publik Ulang<br>2. Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terkena      | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan                               | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Koordinasi dengan Kemendagri                                                              | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Laporan pertanggungjawaban disusun tidak sesuai dengan bukti riil        | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Cross check antara SPJ dengan realisasi kegiatan                                          | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                   | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                    |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                     | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                             | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Keterlambatan LKPJ                                                                  | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Konsinyering dengan OPD Prov Jateng                                                                                | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Masyarakat merasa memiliki Tanah Negara atau Tanah aset milik pemerintah            | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang merasa menguasai aset                                                  | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Gangguan ketertiban di kantor Gubernur                                              | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Pendekatan secara persuasif dengan koordinator lapangan unjuk rasa                                                 | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Target sertifikasi tanah tidak tercapai                                             | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Sosialisasi terkait PTSL Kab/Kota dengan masyarakat                                                                | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur                                        | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Sosialisasi                                                                                                        | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Perangkat Daerah tidak melaksanakan aktivitas dalam mendukung capaian indikator SPM | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Sosialisasi PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM                  | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Rencana kerja sama tidak sesuai kebutuhan daerah                                    | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Penyusunan analisis kebutuhan berbasis data dan usulan OPD                                                         | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Ketidakpatuhan terhadap peraturan / kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama   | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Sosialisasi regulasi Permendagri no 25 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                              | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                        |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                 | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Pelaksanaan kerjasama luar negeri kurang maksimal                                                                                              | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kab/Kota                                  | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Evaluas pelakaksanaan kerjasama tidak dapat dilakukan                                                                                          | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Pelaksaaan monev kerjasamma lingkup Provinsi Jawa Tengah                               | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| <b>BIRO HUKUM</b>                                                                                                                              |                         |              |              |                       |                                                                                        |                       |                    |              |              |
| Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan                                                     | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |
| Produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya                                                      | 4                       | 1            | 4            | Ada                   | melakukan sosialisasi pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum                   | Memadai               | 3                  | 1            | 3            |
| Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota                                  | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                              | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                   |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                            | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang bersengketa                                          | 2                       | 3            | 6            | Ada                   | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya                                                           | Memadai               | 1                  | 3            | 3            |
| Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | '- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan LBH<br>- Meningkatkan jumlah LBH yang bekerjasama dengan PemProv | Memadai               | 1                  | 3            | 3            |
| Rendahnya nilai capaian pelaksanaan Aksi HAM                                                   | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas Perangkat Daerah melalui rapat evaluasi rutin Aksi HAM              | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |
| Kesalahan atau penundaan kegiatan                                                              | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,                                                   | Memadai               | 2                  | 5            | 10           |
| Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan     | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah                            | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |
| Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan     | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah                            | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                          | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                               |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                            | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                        | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum                                                           | 4                       | 1            | 4            | Ada                   | Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum | Memadai               | 3                  | 1            | 3            |
| Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan                                 | 3                       | 1            | 3            | Ada                   | Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum | Memadai               | 2                  | 1            | 2            |
| Hasil analisis dan evaluasi belum banyak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait dalam perbaikan produk hukum daerah | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Menyederhanakan format laporan analisis dan evaluasi agar lebih mudah dipahami dan menonjolkan rekomendasi praktis                                                            | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                                   | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                             |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                     | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                      | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya              | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan tidak optimal                                                             | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan di Jateng | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |
| Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM                                                                                                 | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | meningkatkan upaya pembinaan HAM di Kabupaten/Kota                                                                                          | Memadai               | 1                  | 4            | 4            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                        | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                   |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                          | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                            | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Tidak tertanganinya seluruh permasalahan hukum non-litigasi sesuai target yang ditetapkan                                                | 2                       | 3            | 6            | Ada                   | Menyediakan basis data dan sistem pelaporan kasus non-litigasi secara digital untuk memantau progres penyelesaian | Memadai               | 1                  | 3            | 3            |
| Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian                                                                              | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Meningkatkan kepatuhan pelaporan kepegawaian                                                                      | Memadai               | 1                  | 4            | 4            |
| Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan                                                                     | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan                                       | Memadai               | 1                  | 4            | 4            |
| Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran                                                                               | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan barang milik daerah                                                | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |
| Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan                                                                             | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,                                                   | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |
| <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                                                                                         |                         |              |              |                       |                                                                                                                   |                       |                    |              |              |
| Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pelayanan Dasar                    | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                            | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                    |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                              | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                             | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan                                                                                                   | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | 1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan hibah<br>2. Monitoring evaluasi pelaksanaan hibah             | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA                                                                            | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | 1. Koordinasi dengan OPD terkait dalam perencanaan hibah<br>2. Koordinasi dengan pengusul pokir    | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya                                   | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | 1. membuat SOP Pelayanan Ketatausahaan                                                             | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Kelengkapan administrasi hibah kurang lengkap sehingga pelaporan terlambat                                                                   | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | 1. Rencana pencairan hibah sesuai jadwal perencanaan<br>2. Sosialisasi Template SPJ dan Pelaporan  | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                            | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                             |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                              | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                      | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Realisasi hibah pada akhir periode                                                                                                           | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | 1. Koordinasi dengan pengusul pokir<br>2. Surat teguran kepada lembaga perihal laporan pertanggungjawaban hibah                                                             | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Tumpang tindih tugas dan kegiatan yang tidak terlaksana                                                                                      | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | 1. Koordinasi Tusi masing-masing agar tidak tumpang tindih<br>2. Pembagian tugas yang sesuai                                                                                | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Dasar     | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial                                                             | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Non Pelayanan Dasar | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampuan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang, Permasdes & P3AP2KB, Nakertras & Adminduk Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                          | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                 |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                            | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                          | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik                                                                       | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | 1. Pencatatan kebutuhan aset per bagian melalui RKBMD<br>2. Pengajuan permohonan kebutuhan ke Biro Umum<br>3. Koordinasi Intens | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Data kepegawaian tidak valid                                                                                               | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bendahara Gaji Biro Umum                                                                  | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>                                                                                                   |                         |              |              |                       |                                                                                                                                 |                       |                    |              |              |
| Sinkronisasi program/kegiatan Ekonomi Makro menjadi kurang efektif                                                         | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan                                                               | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Sinkronisasi program/kegiatan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM menjadi kurang efektif                           | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan                                                               | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral tidak dapat diimplementasikan | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral                   | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                  | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                         | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Menurunnya status geopark                                                                                        | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | 'Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Energi Sumber Daya Mineral | Belum Memadai         | 4                  | 3            | 12           |
| Rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Peternakan, Pangan, Kelautan dan Perikanan tidak dapat diimplementasikan | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian                   | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel                                                                        | 4                       | 5            | 20           | Ada                   | Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan    | Belum Memadai         | 3                  | 5            | 15           |
| Pengolahan dan penyajian data bidang Ekonomi Makro menjadi kurang efektif dan efisien                            | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan              | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Pengolahan dan penyajian data bidang PerindagkopUKM menjadi kurang efektif dan efisien                           | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan              | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                        | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                                                                        |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                          | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                                                                 | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Permintaan data/kegiatan prioritas di PerindagkopUKM tidak dipenuhi Kab/Kota                                             | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan                                                                                                                                                  | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Pengolahan dan penyajian data bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi kurang efektif dan efisien. | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan                                                                                                                                                      | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota     | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan                                                                                                                                                  | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai                                                                             | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | '- Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi<br>- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                            | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                                          |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                              | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                                   | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi       | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | 'Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang-undangan bidang cukai                                                        | Belum Memadai         | 4                  | 3            | 12           |
| Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal                        | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal                                                                          | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dari hasil panen | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan                      | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan                                        | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                         | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                      |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                           | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                               | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Penurunan fungsi DAS Prioritas di Jawa Tengah                                             | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor saja                    | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah                | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah pada kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi             | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro Perekonomian                                    | 2                       | 3            | 6            | Ada                   | Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah                                                              | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |
| <b>BIRO BUMD</b>                                                                          |                         |              |              |                       |                                                                                                                                                      |                       |                    |              |              |
| Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)                                               | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Monitoring ke BUMD Jasa Keuangan terkait                                                                                                             | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |

| Pernyataan Risiko                                                                                           | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                         |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                             | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                  | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)                                                         | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Monitoring ke BUMD terkait                                                              | Memadai               | 2                  | 5            | 10           |
| Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD                                                        | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Koordinasi dengan BLUD                                                                  | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |
| Hilangnya jejak dokumen dan arsip di Biro BUMD dan BLUD                                                     | 2                       | 3            | 6            | Ada                   | Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |
| Pemilihan direksi BUMD Keuangan tidak sesuai keahlian                                                       | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Dilakukan Beauty Contest pada saat pemilihan pihak ke 3                                 | Memadai               | 1                  | 3            | 3            |
| Keterlambatan penginputan laporan kinerja keuangan pada sistem SiPete                                       | 2                       | 5            | 10           | Ada                   | Membuat surat edaran terkait batas penginputan laporan kinerja ke dalam sistem SiPete   | Memadai               | 1                  | 5            | 5            |
| Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Monitoring Kinerja triwulanan BUMD                                                      | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |
| Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD                                                                   | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Membuat ceklist dokumen                                                                 | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |

| Pernyataan Risiko                                                                                    | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                     |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                      | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                              | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Keterlambatan Pengumpulan Laporan                                                                    | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Melakukan pemantauan menggunakan alat komunikasi seperti WA / email                                 | Belum Memadai         | 2                  | 5            | 10           |
| Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan                                      | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Menyediakan agenda / jadwal secara elektronik                                                       | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
|                                                                                                      |                         |              |              |                       |                                                                                                     |                       |                    |              |              |
| <b>BIRO ADM. BANGDA</b>                                                                              |                         |              |              |                       |                                                                                                     |                       |                    |              |              |
| Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu                                    | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kab/Kota                                                          | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Data kinerja pada e-controlling kinerja tidak valid                                                  | 4                       | 2            | 8            | Ada                   | Pelaksanaan monitoring secara berkala kepada OPD, surat tentang notifikasi input capaian kinerja TW | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja | 5                       | 2            | 10           | Ada                   | Menyusun rekomendasi hasil koordinasi dan pengendalian                                              | Memadai               | 5                  | 1            | 5            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                     | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                       | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan disimulasikan | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Pemutakhiran sistem E-RKO                                                                                                                                                                                                                                                                     | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Informasi yang disajikan pada media informasi Biro tidak relevan                                                                      | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | 1. menyusun tim pengelola media informasi digital biro<br>2. membuat SOP pengelolaan media informasi digital<br>3. Monev rutin media informasi digital<br>4. Pengembangan kompetensi tim media informasi digital Biro<br>5. Mempublikasi konten yang fokusnya terkait Data Pembangunan Daerah | Belum Memadai         | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                                                               | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                              |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                 | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                       | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Indikator kinerja yang ditetapkan tidak selaras dengan regulasi yang mengatur pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Desk Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                          | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |
| Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap                                                                                                                              | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Desk/Koordinasi Penyusunan RKO                                                                               | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap                                                                                                           | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Koordinasi dengan SKPD Pengelola dan DJPB Provinsi Jawa Tengah                                               | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu                                                                                                                      | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Desk/Koordinasi Penyusunan RKO                                                                               | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Data realisasi fisik APBD kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan                                                                                               | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD secara berkala melalui Aplikasi e-controlling APBD | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                                  | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                      |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                    | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                               | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi dengan pelaksana PSN di Jawa Tengah                                                                                                       | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Target keuangan dan fisik RKO berubah                                              | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi dengan Subbag Program SKPD                                                                                                                | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid                | 3                       | 2            | 6            | Ada                   | Koordinasi dengan Subbag Program SKPD sebelum monitoring                                                                                             | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan                 | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | 1. Penyusunan Surat Edaran Sekda Kepada Bupati/Walikota<br>2. Pemantauan progres verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026                         | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |
| Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi                          | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | 1. Pengumpulan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor<br>2. Desk progres pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                                          | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                                        |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                            | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                                 | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan                                               | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | 1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor<br>2. Penambahan sasaran monitoring pada APBD Perubahan TA. 2026                 | Memadai               | 4                  | 2            | 8            |
| Proses verifikasi capaian progress pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat                                   | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | 1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor<br>2. Penambahan sasaran monitoring pada APBD Perubahan TA. 2026                 | Memadai               | 4                  | 2            | 8            |
| Kendala operasional dalam proses updating data pelaksanaan Bankeu secara manual                            | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | 1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor<br>2. Penambahan sasaran OPD pengelola kegiatan Bankeu yang diundang dalam Rakor | Memadai               | 4                  | 2            | 8            |
| Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid | 4                       | 5            | 20           | Ada                   | Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa                                                                                                       | Belum Memadai         | 4                  | 4            | 16           |

| Pernyataan Risiko                                                                           | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                 |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                             | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                          | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Rekomendasi kebijakan teknis tidak dapat disusun karena kurangnya koordinasi lintas OPD     | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Melakukan FGD dengan OPD terkait sesuai dengan isu strategis yang dibahas                                                       | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |
| Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Desk Penyusunan Laporan LKjIP Setda bersama Biro lingkup Setda                                                                  | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Hilangnya aset                                                                              | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | 1. Penggunaan BA dalam serah terima aset<br>2. Rekon Aset Biro Bangda<br>3. Update KIB internal Biro Bangda                     | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |
| Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik                                        | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | 1. Pencatatan kebutuhan aset per bagian melalui RKBMD<br>2. Pengajuan permohonan kebutuhan ke Biro Umum<br>3. Koordinasi Intens | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Data kepegawaian tidak valid                                                                | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bendahara Gaji Biro Umum                                                                  | Memadai               | 2                  | 4            | 8            |

| Pernyataan Risiko                                                            | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                  |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                              | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                           | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel                                    | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | 1. Verifikasi 2 lapis internal Biro Bangda dan verifikator Biro Umum<br>2. Internalisasi nilai-nilai antikorupsi | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Kerusakan arsip                                                              | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Digitalisasi arsip melalui sistem informasi kearsipan                                                            | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan              | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | 1. Adanya agenda digital pada kalender pimpinan<br>2. Adanya informasi agenda kegiatan dengan media elektronik   | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | rekonsiliasi pengadaan aset bersama biro umum                                                                    | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| <b>BIRO ORGANISASI</b>                                                       |                         |              |              |                       |                                                                                                                  |                       |                    |              |              |
| Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi                                       | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melaksanakan visitasi/fasilitasi pembentukan UPTD                                                                | Memadai               | 4                  | 3            | 12           |
| SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan                                     | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata kelola organisasi dan manajemen kepegawaian yang berlaku              | Memadai               | 4                  | 3            | 12           |

| Pernyataan Risiko                                                  | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                         |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                    | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                  | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Meningkatkan pemahaman pentingnya reformasi birorkasi sebagai dasar dalam perbaikan tata kelola dan budaya birokrasi agar RB lebih berdampak langsung kepada masyarakat | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur                    | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Meningkatkan pemahaman dan mendorong penerapan sistem kerja sesuai ketentuan.                                                                                           | Memadai               | 4                  | 3            | 12           |
| Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah          | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Penunjukan Pengelola dan Pengurus Barang di setiap OPD                                                                                                                  | Memadai               | 4                  | 3            | 12           |
| Dokumen ABK tidak tersusun                                         | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata kelola organisasi dan manajemen kepegawaian yang berlaku                                                                     | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Data tidak valid atau tidak lengkap                                | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Melaksanakan rakor kelembagaan yang salah satu agendanya adalah pembahasan pemenuhan data yang valid dan relevan dalam hal pengajuan IKOD                               | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Rekomendasi tidak menjawab kebutuhan riil                          | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Telaah staf sesuai regulasi dan kebutuhan riil daerah                                                                                                                   | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |

| Pernyataan Risiko                                                   | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                  |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                     | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                           | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Data evaluasi tidak lengkap atau salah input                        | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | - Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi SPBE<br>- Identifikasi instrumen evaluasi pemerintahan digital yang telah dikonversikan dari indeks SPBE | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan                         | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Meningkatkan komitmen Kepala Daerah di Jateng dalam penyelenggaraan pelayanan publik.                                                                            | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |
| Hasil penilaian tidak objektif atau tidak sesuai realisasi          | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Menyelenggarakan workshop pemahaman indikator RB                                                                                                                 | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Capaian RB kabupaten/kota rendah                                    | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Menyelenggarakan workshop pemahaman indikator RB                                                                                                                 | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Fasilitasi tidak optimal                                            | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Menambah frekuensi pendampingan daring dan tatap muka                                                                                                            | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi        | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Inventarisasi barang milik daerah berkala                                                                                                                        | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Adanya mekanisme permintaan perbaikan barang melalui pengurus barang.                                                                                            | Belum Memadai         | 3                  | 4            | 12           |

| Pernyataan Risiko                                                                                    | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                                                                          |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                      | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan.          | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Telah dilakukan fasilitasi beberapa jenis pengembangan kompetensi terhadap sebagian kecil ASN.                                                                                                                           | Belum Memadai         | 4                  | 3            | 12           |
| <b>BIRO APBJ</b>                                                                                     |                         |              |              |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                       |                    |              |              |
| Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga                                        | 3                       | 5            | 15           | Ada                   | Melakukan review dokumen dengan teliti dan cermat antara PPK dan Pokja.<br>- Menetapkan pedoman (petunjuk teknis) standar evaluasi dokumen pemilihan.<br>- Sosialisasi/Fasilitasi peratran dibidang PBJ.                 | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Tidak dipatuhinya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan marketplace (Blangkon Jateng) | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | Melakukan monitoring dan evaluasi kepada marketplace yang akan bekerjasama melalui Program Blangkon Jateng (Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah) mulai dari persiapan bergabung sampai dengan pelaksanaan kerjasama | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                                                                                                                  | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                         |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                  | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kematangan UKPBJ) Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan target Terhambatnya capaian UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi level 3 (proaktif) | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Melakukan mentoring, koordinasi dan mendorong UKPBJ di wilayah Provinsi Jawa Tengah agar segera melengkapi bukti dukung | Memadai               | 1                  | 4            | 4            |
| Arsip tersebar di berbagai tempat                                                                                                                                                                                                  | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Melakukan penataan arsip semaksimal mungkin sesuai kaidah2 penataan arsip                                               | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |
| Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi                                                                                                                                | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan (LKPP) dan Seluruh User (SKPD)                                                     | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |

| Pernyataan Risiko                                                    | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                                                                                                                                     |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                      | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                                                                                                                              | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Terganggunya proses pelaksanaan PBJ                                  | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Pendampingan pelaksanaan dan penanganan permasalahan terhadap penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik beserta Sistem Pendukungnya (SPSE, eKatalog, SiRUP, SIKAP, Toko Daring) | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa Tengah menjadi PKPBJ        | 2                       | 3            | 6            | Ada                   | Koordinasi dengan LKPP RI untuk membahas pemenuhan data dukung yg sudah di upload pada siukpbj                                                                                      | Memadai               | 1                  | 3            | 3            |
| Data kepegawaian tidak valid                                         | 2                       | 3            | 6            | Ada                   | melakukann koordinasindengan pegawain terkait                                                                                                                                       | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |
| <b>BIRO UMUM</b>                                                     |                         |              |              |                       |                                                                                                                                                                                     |                       |                    |              |              |
| Terjadinya kerusakan BMD                                             | 4                       | 4            | 16           | Ada                   | Mengajukan daftar kendaraan yang akan di asuransikan                                                                                                                                | Memadai               | 3                  | 4            | 12           |
| Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah pimpinan. | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Koordinasi dengan LS (Leading Sector)                                                                                                                                               | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Editing narasi berita pimda terhambat                                | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Mempunyai SK Narahubung antar lembaga                                                                                                                                               | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                                 | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                               |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                   | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                                        | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| ASN menerima gaji dan tunjangan tepat waktu                                                       | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Membagikan SKUMPTK kepada pegawai yang di isi secara periodik                 | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Terjaminnya keakuratan Laporan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah                     | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Melaksanakan rekonsiliasi barang persediaan setiap triwulan                   | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Tersedianya layanan peminjaman asset pada Biro umum                                               | 3                       | 4            | 12           | Ada                   | melakukan pengawasan oleh atasan langsung                                     | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |
| Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terlaksana dengan baik                                       | 3                       | 2            | 6            | Ada                   | Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan terkait regulasi SHS          | Memadai               | 2                  | 2            | 4            |
| Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di Setda Provinsi Jawa Tengah berupa meubelair            | 4                       | 3            | 12           | Ada                   | Penyusunan dokumen RKBMD secara akurat                                        | Memadai               | 3                  | 3            | 9            |
| Pimpinan ASN Provinsi dan Masyarakat                                                              | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Koordinasi dengan penyedia jasa untuk peningkatan kinerja petugas kebersihan  | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |
| Terciptanya kondisi kendaraan siap operasional & Legalitas kelengkapan kendaraan lebih terkontrol | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Pengecekan service secara berkala mobil dinas dan berkoordinasi dengan driver | Memadai               | 2                  | 3            | 6            |

| Pernyataan Risiko                                                                                                                | Skala/Nilai Risiko yang |              |              | Pengendalian yang Ada |                                                                 |                       | Skala/Nilai Residu |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                  | Skala Probabilitas      | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/Belum Ada         | Uraian                                                          | Memadai/Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerima dana penunjang operasional tepat waktu                                            | 2                       | 4            | 8            | Ada                   | Koordinasi dengan TU Pimpinan perihal pengajuan BOP tepat waktu | Memadai               | 1                  | 4            | 4            |
| Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah selama 12 Bulan                                                          | 1                       | 3            | 3            | Ada                   | Koordinasi dengan penyedia jasa                                 | Memadai               | 1                  | 2            | 2            |
| Memberikan kontribusi dalam menyajikan data dukung publikasi berupa foto, video dan berita terkait dengan agenda pimpinan daerah | 1                       | 4            | 4            | Ada                   | Koordinasi dengan LS (Leading Sector)                           | Memadai               | 1                  | 3            | 3            |
| Agenda Pimpinan dapat berjalan dengan baik dan lancar                                                                            | 3                       | 3            | 9            | Ada                   | Mediasi dan koordinasi dengan Leading Sector                    | Memadai               | 3                  | 2            | 6            |

**LAMPIRAN 3**  
**RISIKO PRIORITAS**

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                            | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>    | <b>Sebab</b>                                                                                           | <b>Dampak</b>                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                         | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>               | <b>(4)</b>                                                                                             | <b>(5)</b>                                                                                                               |
| <b>STRATEGIS</b>                                                                   |                     |                          |                                                                                                        |                                                                                                                          |
| MOU tidak terlaksana                                                               | 12                  | Sekretaris Daerah        | Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta                                | Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.                                                                            |
| Gagal tercapainya kesepakatan batas                                                | 16                  | Sekretaris Daerah        | Perbedaan arah kebijakan antar daerah                                                                  | Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah                                                                            |
| Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani | 10                  | Sekretaris Daerah        | Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum                           | kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan                                         | 12                  | Kepala Biro Kesra        | Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi                                    | Hibah tidak sesuai dengan peruntukan                                                                                     |
| Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro                                | 12                  | Kepala Biro Perekonomian | Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota       |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                                                      | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>     | <b>Sebab</b>                                                                                              | <b>Dampak</b>                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                                   | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>                | <b>(4)</b>                                                                                                | <b>(5)</b>                                                                                |
| Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan               | 12                  | Kepala Biro Perekonomian  | Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan                                | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampuan dan stakeholder terkait |
| Deviden yang di terima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan        | 12                  | Kepala Biro BUMD dan BLUD | Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)        | Berpengaruh terhadap penerimaan PAD                                                       |
| Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD | 12                  | Kepala Biro Adm Bangda    | Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan | Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan             |
| Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku                                                               | 12                  | Kepala Biro Organisasi    | Perubahan regulasi belum tersosialisasi                                                                   | Pemberian TPP tidak tepat sasaran                                                         |
| Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan                                                                         | 12                  | Kepala Biro Organisasi    | Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat                                                                     | Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan                                                |
| Proses pembangunan ZI tidak berjalan                                                                         | 12                  | Kepala Biro Organisasi    | Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI                                                  | Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik                                  |
| Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/ pihak lain                                            | 10                  | Kepala Biro PBJ           | Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender                                                 | Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai                                                  |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                  | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>  | <b>Sebab</b>                                                                  | <b>Dampak</b>                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                               | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>             | <b>(4)</b>                                                                    | <b>(5)</b>                                                                      |
| Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda                              | 12                  | Sekretaris Daerah      | Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid                           | Nilai PEKPPP Setda rendah                                                       |
| Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa | 12                  | Kepala Biro Umum       | Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.                | PAD sewa gedung tidak optimal                                                   |
| Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama                       | 12                  | Kepala Biro Adm Bangda | Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda       | Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal                                   |
| <b>BIRO PEMOTDAKER</b>                                                   |                     |                        |                                                                               |                                                                                 |
| Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai                  | 12                  | Biro Pemotdaker        | Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian               | Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak                          |
| Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan                        | 12                  | Biro Pemotdaker        | Kurangnya sosialisasi dan komunikasi                                          | Tertundanya penetapan lokasi pembangunan                                        |
| Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan                               | 12                  | Biro Pemotdaker        | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD | Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| <b>BIRO HUKUM</b>                                                        |                     |                        |                                                                               |                                                                                 |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                                                    | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>        | <b>Sebab</b>                                                                                              | <b>Dampak</b>                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                                 | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>                   | <b>(4)</b>                                                                                                | <b>(5)</b>                                                                         |
| Kesalahan atau penundaan kegiatan                                                                          | 10                  | Kepala Biro Hukum            | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan  | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran |
| Kesalahan atau penundaan kegiatan                                                                          | 10                  | Kepala Biro Hukum            | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan  | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran |
| <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                                                           |                     |                              |                                                                                                           |                                                                                    |
| Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya | 12                  | Koordinator Bidang Keagamaan | Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik | Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah                               |
| <b>BIRO PEREKONOMIAN</b>                                                                                   |                     |                              |                                                                                                           |                                                                                    |
| Menurunnya status geopark                                                                                  | 12                  | Kepala Biro Perekonomian     | Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark                          | Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan                                              |
| Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel                                                                  | 15                  | Kepala Biro Perekonomian     | Penyalahgunaan anggaran                                                                                   | Kerugian APBD                                                                      |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>     | <b>Sebab</b>                                             | <b>Dampak</b>                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                             | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>                | <b>(4)</b>                                               | <b>(5)</b>                                                                                                                                                        |
| Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi | 12                  | Pengarah Pertanian        | Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT         | Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana |
| <b>BIRO BUMD DAN BLUD</b>                                              |                     |                           |                                                          |                                                                                                                                                                   |
| Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)                            | 10                  | Kepala Biro BUMD dan BLUD | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat                                                                        |
| Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)                    | 10                  | Kepala Biro BUMD dan BLUD | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat                                                                        |
| Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD                   | 10                  | Biro BUMD dan BLUD        | Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD                        | Tidak berkembangnya kinerja BLUD                                                                                                                                  |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                                                     | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>                       | <b>Sebab</b>                                                                                             | <b>Dampak</b>                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                                  | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>                                  | <b>(4)</b>                                                                                               | <b>(5)</b>                                                           |
| Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja | 10                  | Kepala Biro BUMD dan BLUD                   | Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi  | Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah                  |
| Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD                                                                   | 10                  | Biro BUMD dan BLUD                          | Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD                           | Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak                   |
| Keterlambatan Pengumpulan Laporan                                                                           | 10                  | Biro BUMD dan BLUD                          | Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu | Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan<br><br>□        |
| <b>BIRO ADM. BANGDA</b>                                                                                     |                     |                                             |                                                                                                          |                                                                      |
| Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu                                           | 12                  | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah | Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan                                           | Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                                                    | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b>         | <b>Sebab</b>                                                                                      | <b>Dampak</b>                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                                 | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>                    | <b>(4)</b>                                                                                        | <b>(5)</b>                                                   |
| Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid | 16                  | Analisis Kebijakan Ahli Madya | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat |
| <b>BIRO ORGANISASI</b>                                                                                     |                     |                               |                                                                                                   |                                                              |
| Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi                                                                     | 12                  | Biro Organisasi               | Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi                                       | Pelayanan publik terganggu                                   |
| SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan                                                                   | 12                  | Biro Organisasi               | Kurangnya koordinasi antar OPD                                                                    | Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi                   |
| RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan                                         | 12                  | Biro Organisasi               | RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh                               | Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan           |
| Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur                                                            | 12                  | Biro Organisasi               | Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami                                             | Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya                  |
| Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah                                                  | 12                  | Kepala Biro                   | Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi                                      | Kerugian finansial perangkat daerah                          |
| Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan                                                                | 12                  | Biro Organisasi               | Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov                                      | Disparitas kualitas pelayanan antar daerah                   |

| <b>Risiko Prioritas</b>                                                                     | <b>Skala Risiko</b> | <b>Pemilik Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                                                          | <b>Dampak</b>                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                  | <b>(2)</b>          | <b>(3)</b>            | <b>(4)</b>                                                                            | <b>(5)</b>                                                                          |
| Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki                         | 12                  | Biro Organisasi       | Pemalsuan laporan pemeliharaan barang                                                 | Kerugian keuangan                                                                   |
| Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan. | 12                  | Subbag Tata Usaha     | Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi. | Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan. |
| <b>BIRO APBJ</b>                                                                            |                     |                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga                               | 12                  | Kepala Biro PBJ       | Peserta pemilihan merasa dirugikan                                                    | Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda                                  |
| <b>BIRO UMUM</b>                                                                            |                     |                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Terjadinya kerusakan BMD                                                                    | 12                  | Kepala Biro           | Kelalaian Penggunaan BMD                                                              | Menghambat kegiatan Oprasional                                                      |

**LAMPIRAN 4**  
**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

| <b>Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan</b>                                  | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD</b>               | <b>Pernyataan Risiko</b>                                                           | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                                                 | <b>Dampak</b>                                                                                                            | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                                                        | <b>Penanggung Jawab</b>      | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                              | <b>(2)</b>                                                                | <b>(3)</b>                                                                         | <b>(4)</b>          | <b>(5)</b>                                                                   | <b>(6)</b>                                                                                                               | <b>(7)</b>                                                                                                                | <b>(8)</b>                   | <b>(9)</b>                       |
| <b>STRATEGIS</b>                                                        |                                                                           |                                                                                    |                     |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                              |                                  |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | MOU tidak terlaksana                                                               | 12                  | Perbedaan peraturan antar Pemerintah daerah dan/atau Badan Usaha/Swasta      | Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.                                                                            | Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak                                    | Asisten Pemerintah dan Kesra | September 2026                   |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Gagal tercapainya kesepakatan batas                                                | 16                  | Perbedaan arah kebijakan antar daerah                                        | Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah                                                                            | 1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah<br>2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daerah antar Kab/kota | Asisten Pemerintah dan Kesra | November 2026                    |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Peningkatan jumlah tuntutan hukum terhadap pemerintah daerah yang tidak tertangani | 10                  | Ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan atau perjanjian dengan ketentuan hukum | kerugian keuangan daerah, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah | Mengurangi frekuensi kejadian dan dampak dari terjadi risiko                                                              | Asisten Pemerintah dan Kesra | Triwulan IV 2026                 |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                      | Pernyataan Risiko                                   | Skala Risiko | Sebab                                                                                                  | Dampak                                                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                        | Penanggung Jawab             | Target Waktu Penyelesaian           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| (1)                                                                     | (2)                                                                       | (3)                                                 | (4)          | (5)                                                                                                    | (6)                                                                                                                | (7)                                                                                                | (8)                          | (9)                                 |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan          | 12           | Penyelenggaraan Hibah terindikasi tindakan koruptif dan gratifikasi                                    | Hibah tidak sesuai dengan peruntukan                                                                               | NPHD ; Monitoring, evaluasi dan sosialisasi                                                        | Asisten Pemerintah dan Kesra | Triwulan II dan IV 2026             |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan                   | Lemahnya rekomendasi kebijakan bidang ekonomi makro | 12           | Tidak sinkronnya regulasi kebijakan bidang ekonomi makro antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | Kebijakan bidang ekonomi makro tidak ditindaklanjuti oleh OPD Pemerintah Prov. Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/kota | - Monev pelaksanaan hasil rekomendasi<br>- FGD pembahasan isu terkini terkait bidang ekonomi makro | Asisten ekonomi Pembangunan  | - TW II (Mei)<br>- TW IV (Nopember) |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD    | Pernyataan Risiko                                                                                    | Skala Risiko | Sebab                                                                                              | Dampak                                                                                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab            | Target Waktu Penyelesaian        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| (1)                                                                     | (2)                                                     | (3)                                                                                                  | (4)          | (5)                                                                                                | (6)                                                                                        | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                          | (8)                         | (9)                              |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan tidak dapat diimplementasikan       | 12           | Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika kebijakan                         | Rekomendasi tidak relevan untuk diimplementasikan oleh OPD ampunan dan stakeholder terkait | - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal, diantaranya pada SPPG<br>- Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait terhadap keamanan pangan seperti diantaranya terhadap bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku MBG | Asisten Ekonomi Pembangunan | - TW I (Maret)<br>- TW II (Juni) |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Deviden yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan | 12           | Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi) | Berpengaruh terhadap penerimaan PAD                                                        | Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD                                                                                                                                                                                                              | Asisten Ekonomi Pembangunan | 2026                             |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD    | Pernyataan Risiko                                                                                            | Skala Risiko | Sebab                                                                                                     | Dampak                                                                        | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab            | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1)                                                                     | (2)                                                     | (3)                                                                                                          | (4)          | (5)                                                                                                       | (6)                                                                           | (7)                                                                                                                                                                                                                        | (8)                         | (9)                       |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan | Ketidaktepatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kegiatan yg bersumber dari APBD | 12           | Ketidakpatuhan SKPD dalam melaporkan kondisi faktual progres pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan | Laporan progres pelaksanaan APBD tidak menggambarkan kondisi faktual/lapangan | 1. Melaksanakan pemantauan langsung di lapangan secara rutin/berkala<br>2. Desk validasi data pelaporan                                                                                                                    | Asisten Ekonomi Pembangunan | 2026                      |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi        | Kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku                                                               | 12           | Perubahan regulasi belum tersosialisasi                                                                   | Pemberian TPP tidak tepat sasaran                                             | Evaluasi instrumen pemberian TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah. | Asisten Administrasi        | Triwulan III s.d IV       |

| <b>Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan</b>                                  | <b>Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD</b>    | <b>Pernyataan Risiko</b>                                         | <b>Skala Risiko</b> | <b>Sebab</b>                                              | <b>Dampak</b>                                            | <b>Rencana Tindak Pengendalian</b>                                                                      | <b>Penanggung Jawab</b> | <b>Target Waktu Penyelesaian</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>(1)</b>                                                              | <b>(2)</b>                                                     | <b>(3)</b>                                                       | <b>(4)</b>          | <b>(5)</b>                                                | <b>(6)</b>                                               | <b>(7)</b>                                                                                              | <b>(8)</b>              | <b>(9)</b>                       |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan                             | 12                  | Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat                     | Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan               | Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan                                                     | Asisten Administrasi    | Triwulan I 2026                  |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Proses pembangunan ZI tidak berjalan                             | 12                  | Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI  | Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik | Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD                                           | Asisten Administrasi    | Triwulan IV 2026                 |
| Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil | Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi               | Terjadinya benturan kepentingan dari pelaku pengadaan/pihak lain | 10                  | Adanya kepentingan penyedia agar dapat memenangkan tender | Hasil pelaksanaan pengadaan tidak sesuai                 | Dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan-peraturan Pengadaan Barang/Jasa                                | Asisten Administrasi    | TW II 2026                       |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah | Kegagalan dalam pelaksanaan PEKPPP di Setda                      | 12                  | Kurangnya komitmen untuk memberikan data yang valid       | Nilai PEKPPP Setda rendah                                | 1. Melaksanakan Konsinyering penyempurnaan instrumen<br>2. Melakukan Evaluasi berkala pada PEKPPP Setda | Asisten Administrasi    | TW III 2026                      |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD              | Pernyataan Risiko                                                        | Skala Risiko | Sebab                                                                   | Dampak                                                 | Rencana Tindak Pengendalian                                           | Penanggung Jawab       | Target Waktu Penyelesaian |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| (1)                                                                             | (2)                                                               | (3)                                                                      | (4)          | (5)                                                                     | (6)                                                    | (7)                                                                   | (8)                    | (9)                       |
| Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah          | Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah    | Adanya temuan ketidaksesuaian antara pengguna gedung dan penerimaan sewa | 12           | Penyalahgunaan pembayaran sewa gedung milik pemerintah daerah.          | PAD sewa gedung tidak optimal                          | Menyusun SOP peminjaman dan Pembayaran sewa                           | Asisten Administrasi   | Semester I Tahun 2026     |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah | Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah       | Terdapat duplikat risiko dengan penyebab yang sama                       | 12           | Biro-biro tidak mematuhi kaidah dalam penyusunan manajemen risiko Setda | Kualitas Manajemen Risiko Setda belum optimal          | Melaksanakan konsinyering penyusunan Manajemen risiko                 | Asisten Administrasi   | TW II 2026                |
| <b>BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA</b>                          |                                                                   |                                                                          |              |                                                                         |                                                        |                                                                       |                        |                           |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                                         | Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti | Tujuan kerjasama antar kedua belah pihak tidak tercapai                  | 12           | Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian         | Menurunnya tingkat kepercayaan antar kedua belah pihak | Musyawarah dengan para pihak perihal permasalahan substansi kerjasama | Kepala Biro Pemotda KS | Triwulan III 2026         |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                               | Pernyataan Risiko                                 | Skala Risiko | Sebab                                                                                                    | Dampak                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                        | Penanggung Jawab                              | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| (1)                                                   | (2)                                                                                                                | (3)                                               | (4)          | (5)                                                                                                      | (6)                                                                                | (7)                                                                | (8)                                           | (9)                       |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti | Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan | 12           | Kurangnya sosialisasi dan komunikasi                                                                     | Tertundanya penetapan lokasi pembangunan                                           | Perubahan trase/desain                                             | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Triwulan IV 2026          |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               | Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah                                                          | Dokumen LPPD tidak sesuai dengan ketentuan        | 12           | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mematuhi kaidah penyusunan dokumen LPPD                            | Turunnya nilai kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah    | Menyusun Surat Edaran kepada OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota | Kepala Biro Pemerintahan Otda                 | Triwulan II 2026          |
| <b>BIRO HUKUM</b>                                     |                                                                                                                    |                                                   |              |                                                                                                          |                                                                                    |                                                                    |                                               |                           |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum                                                                       | Kesalahan atau penundaan kegiatan                 | 10           | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran | penggunaan aplikasi persuratan dengan baik dan benar               | Kepala Biro                                   | Triwulan I                |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                    | Pernyataan Risiko                                                                                          | Skala Risiko | Sebab                                                                                                     | Dampak                                                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                           | Penanggung Jawab  | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| (1)                                                   | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                        | (4)          | (5)                                                                                                       | (6)                                                                                | (7)                                                                                                                   | (8)               | (9)                       |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum                                                            | Kesalahan atau penundaan kegiatan                                                                          | 10           | Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan  | Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran | menyusun SOP Surat Masuk dan Surat Keluar                                                                             | Kepala Biro       | Triwulan I                |
| BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                             |                                                                                                         |                                                                                                            |              |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                       |                   |                           |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat | Tidak didatarkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya | 12           | Informasi yang disajikan sering kali lebih mementingkan perspektif internal daripada kegunaan bagi publik | Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah                               | 1. Monev rutin 2. Pengembangan kompetensi ASN biro 3. Mengalokasikan anggaran untuk menduk kegiatan rumah tangga Biro | Kepala Biro Kesra | TW I, II, III, IV         |
| BIRO PEREKONOMIAN                                     |                                                                                                         |                                                                                                            |              |                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                       |                   |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                            | Pernyataan Risiko                         | Skala Risiko | Sebab                                                                            | Dampak                                | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                    | Penanggung Jawab         | Target Waktu Penyelesaian            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| (1)                                                   | (2)                                                                                             | (3)                                       | (4)          | (5)                                                                              | (6)                                   | (7)                                                                                                                                                                                                                                            | (8)                      | (9)                                  |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                  | Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral                            | Menurunnya status geopark                 | 12           | Pengembangan geopark belum menjadi agenda OPD yang menjadi Tim Pengelola Geopark | Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan | - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan geopark dengan melibatkan stakeholder mitra (utamanya Badan Pengelola Geopark)<br>- Melakukan promosi Geopark melalui media sosial | Pengarah LHKESDM         | - TW II (Juni)<br>- TW IV (Desember) |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian | Bukti dukung SPJ keuangan tidak akuntabel | 15           | Penyalahgunaan anggaran                                                          | Kerugian APBD                         | - Melakukan monitoring pelaksanaan SOP terkait Penatausahaan Keuangan<br>- internalisasi nilai-nilai anti korupsi                                                                                                                              | Kepala Biro Perekonomian | - TW I (Maret)<br>- TW II (Juni)     |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD | Pernyataan Risiko                                                      | Skala Risiko | Sebab                                                    | Dampak                                                                                                                                                            | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                      | Penanggung Jawab          | Target Waktu Penyelesaian              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| (1)                                  | (2)                                                  | (3)                                                                    | (4)          | (5)                                                      | (6)                                                                                                                                                               | (7)                                                                                                                                                                                              | (8)                       | (9)                                    |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian               | Tim Sekretariat DBHCHT terlambat dalam menyampaikan perubahan regulasi | 12           | Adanya dinamika regulasi dalam penggunaan DBHCHT         | Tim Sekretariat DBHCHT tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan tidak dapat memberikan rekomendasi/solusi yang tepat bagi OPD pelaksana | - Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan<br>- Menyelenggarakan asistensi penyusunan RKA/RKP kegiatan DBHCHT<br>- Menyusun bahan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan DBHCHT Kab/Kota | Pengarah Pertanian        | - TW I (Januari)<br>- TW IV (Desember) |
| <b>BIRO BUMD</b>                     |                                                      |                                                                        |              |                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                           |                                        |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan   | Laporan kinerja tidak valid (BUMD Keuangan)                            | 10           | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat                                                                        | Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Keuangan                                                                                                                               | Kepala Biro BUMD dan BLUD | November 2026                          |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan      | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                          | Pernyataan Risiko                                                                                          | Skala Risiko | Sebab                                                                                                   | Dampak                                                                                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                       | Penanggung Jawab                  | Target Waktu Penyelesaian                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                  | (2)                                                                                           | (3)                                                                                                        | (4)          | (5)                                                                                                     | (6)                                                                                        | (7)                                                                               | (8)                               | (9)                                                                            |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha                                         | Laporan kinerja tidak valid (BUMD Jasa Aneka Usaha)                                                        | 10           | Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil                                                | 1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD<br>2. Keputusan yang diambil kurang tepat | Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Jasa Aneka Usaha        | Kepala Biro BUMD dan BLUD         | November 2026                                                                  |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase nilai kemandirian BLUD                                                             | Kebijakan yang ditetapkan tidak dijalankan oleh BLUD                                                       | 10           | Ketidakpatuhan regulasi dari BLUD                                                                       | Tidak berkembangnya kinerja BLUD                                                           | melakukan monitoring terkait kebijakan                                            | Kepala Biro BUMD dan BLUD         | - TW I (Januari);<br>- TW II (April);<br>- TW III (Juli);<br>- TW IV (Oktober) |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan | Terdapat BUMD Non Keuangan yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja | 10           | Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi | Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah                                        | Desk tindaklanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan | Pengarah BUMD Jasa Aneka Produksi | Triwulan II                                                                    |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD     | Pernyataan Risiko                                                 | Skala Risiko | Sebab                                                                                                    | Dampak                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                  | Penanggung Jawab                            | Target Waktu Penyelesaian |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| (1)                                        | (2)                                                      | (3)                                                               | (4)          | (5)                                                                                                      | (6)                                                                  | (7)                                                                                                                                                                          | (8)                                         | (9)                       |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN       | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD   | Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD                         | 10           | Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD                           | Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditolak                   | Bentuk tim khusus dengan perwakilan dari semua unit terkait                                                                                                                  | Pengarah BLUD                               | Triwulan IV               |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN       | Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD | Keterlambatan Pengumpulan Laporan                                 | 10           | Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu | <input type="checkbox"/> Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal   | Membuat surat tentang batas pengumpulan laporan                                                                                                                              | Pengarah BUMD Jasa Anek Usaha               | Triwulan IV               |
| <b>BIRO ADM. BANGDA</b>                    |                                                          |                                                                   |              |                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                             |                           |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Persentase realisasi bantuan keuangan                    | Kegiatan bantuan keuangan pada kab/Kota tidak selesai tepat waktu | 12           | Keterbatasan waktu efektif pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan                                           | Masyarakat tidak bisa segera menerima manfaat dari kegiatan tersebut | 1. Percepatan proses verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026<br>2. Monitoring progres percepatan penyelesaian kegiatan Bantuan Keuangan Kab/Kota APBD Perubahan TA. 2026 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah | TW IV Tahun 2026          |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD             | Pernyataan Risiko                                                                                          | Skala Risiko | Sebab                                                                                             | Dampak                                                       | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab              | Target Waktu Penyelesaian |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| (1)                                        | (2)                                                              | (3)                                                                                                        | (4)          | (5)                                                                                               | (6)                                                          | (7)                                                                                                                                                                                                                                                      | (8)                           | (9)                       |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid | 16           | Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan | Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat | Melakukan pencermatan progres pelaporan pada aplikasi bantuan keuangan kepada desa. Desa mana yang belum sama sekali melaporkan, dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi ke kantor desa tersebut dan dilakukan uji sampel ke lokasi kegiatan | Analisis Kebijakan Ahli Madya | TW II Tahun 2026          |
| BIRO ORGANISASI                            |                                                                  |                                                                                                            |              |                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                       | Pernyataan Risiko                        | Skala Risiko | Sebab                                                       | Dampak                                     | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| (1)                             | (2)                                                                                        | (3)                                      | (4)          | (5)                                                         | (6)                                        | (7)                                                                                                                                                                                                                                           | (8)                  | (9)                       |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI     | Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya                     | Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi   | 12           | Kebutuhan dan urgensi pembentukan UPTD tidak diidentifikasi | Pelayanan publik terganggu                 | Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kab/Kota secara terstruktur, terukur, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku                                                                                    | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan III dan IV       |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI     | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif | SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan | 12           | Kurangnya koordinasi antar OPD                              | Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi | Mempedomani SKJ sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk SKJ manajerial sesuai KepmenpanRB 409/2020, SKJ Jabatan Pelaksana sesuai KepmenpanRB nomor 01/2025, dan SKJ Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Instansi Teknis JF terkait | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan I                |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                                   | Pernyataan Risiko                                                  | Skala Risiko | Sebab                                                               | Dampak                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                           | Penanggung Jawab       | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| (1)                                                   | (2)                                                                                                                    | (3)                                                                | (4)          | (5)                                                                 | (6)                                                | (7)                                                                                                   | (8)                    | (9)                       |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A                                                               | RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan | 12           | RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh | Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan | Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD                                   | Kepala Biro Organisasi | Triwulan IV               |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan                                                    | Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur                    | 12           | Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami               | Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya        | Fasilitasi penerapan sistem kerja (pembuatan SK Kelompok Kerja dan penyesuaian proses bisnis dan SOP) | Pengarah/Ketua Pokja   | Triwulan I                |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah          | 12           | Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi        | Kerugian finansial perangkat daerah                | Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.                                            | Kepala Biro            | Triwulan I                |
| PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                           | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik                                                                               | Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan                        | 12           | Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov        | Disparitas kualitas pelayanan antar daerah         | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota                                     | Pengarah/Ketua Pokja   | Triwulan IV               |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                       | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                                       | Pernyataan Risiko                                                                           | Skala Risiko | Sebab                                                                                 | Dampak                                                                              | Rencana Tindak Pengendalian                                                            | Penanggung Jawab     | Target Waktu Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| (1)                                                   | (2)                                                                                                                        | (3)                                                                                         | (4)          | (5)                                                                                   | (6)                                                                                 | (7)                                                                                    | (8)                  | (9)                       |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi            | Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki                         | 12           | Pemalsuan laporan pemeliharaan barang                                                 | Kerugian keuangan                                                                   | Tanda tangan pejabat berwenang pada berita acara perbaikan.                            | Kasubbag Tata Usaha  | Triwulan I                |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi | Dokumen kebutuhan pengembangan kompetensi tidak tersusun sesuai standar kompetensi jabatan. | 12           | Kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN dalam menyusun dokumen pengembangan kompetensi. | Pengembangan kebutuhan kompetensi tidak didasarkan atas standar kompetensi jabatan. | Menyusun dokumen pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional sesuai standar kompetensi. | Pengarah/Ketua Pokja | Triwulan I                |
| <b>BIRO APBJ</b>                                      |                                                                                                                            |                                                                                             |              |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                        |                      |                           |

| Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD                                                             | Pernyataan Risiko                                             | Skala Risiko | Sebab                              | Dampak                                             | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                                                                                                     | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| (1)                                                       | (2)                                                                                                              | (3)                                                           | (4)          | (5)                                | (6)                                                | (7)                                                                                                                                                                                                                             | (8)              | (9)                                   |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa                                                                      | Munculnya Sanggah / Sanggah Banding / Aduan dari Pihak ketiga | 12           | Peserta pemilihan merasa dirugikan | Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda | Melakukan review dokumen dengan teliti dan cermat antara PPK dan Pokja.<br>- Menetapkan pedoman (petunjuk teknis) standar evaluasi dokumen pemilihan.<br>- Meningkatkan Kompetensi JF PBJ melalui pelatihan, seminar, FGD, dsb. | Kepala Biro APBJ | TW 1 2026                             |
| <b>BIRO UMUM</b>                                          |                                                                                                                  |                                                               |              |                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                       |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     | Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda | Terjadinya kerusakan BMD                                      | 12           | Kelalaian Penggunaan BMD           | Menghambat kegiatan Oprasional                     | Membeikan bukti surat izin penggunaan kendaraan bermotor                                                                                                                                                                        | Kepala Biro      | Semester I dan Semester II Tahun 2026 |